



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Kotamobagu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dan dapat diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun Ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai visi, misi, tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu tahun 2019-2023.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tersebut untuk mewujudkan Visi, misi, tujuan telah ditetapkan 3 Misi, 12 Sasaran dan 28 Indikator Sasaran.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat ALLAH SWT Laporan Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.

Hasil penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2020 dengan nilai 66,83 (B), di tahun ini kami mencoba melakukan penyesuaian dalam menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Kotamobagu yang tentunya disesuaikan pula dengan format dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

Tahun 2021 ini memuat hasil pengukuran kinerja dari 12 sasaran dan 28 Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2023.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, bahkan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis data, penulisan hingga penerbitan laporan ini. Terima kasih

Kotamobagu, 2022

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU INSPEKTORAT DAERAH

Jl. A. Yani Nomor 02 Kotamobagu, Kode Pos 95711

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Kotamobagu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kotamobagu, 30 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH

INSPEKTORAT
DAERAH

YUSRIN MANTALI, S.Kom

NIP: 19800604 200802 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah	1
1.1.2. Administrasi dan Luas Wilayah.....	3
1.1.3. Kependudukan.....	3
1.2. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Kotamobagu	4
1.3. Struktur Organisasi	5
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.5. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2021	18
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019- 2023	18
2.1.1. Visi.....	19
2.1.2. Misi	20
2.1.3. Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan (IKU) 2021.....	27
2.2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023	30
2.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN.....	33
2.2.2. PERBANDINGAN IKU SEBELUM DAN IKU SESUDAH PERUBAHAN	34
2.2.3. Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2021	94
2.2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021	104
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	111



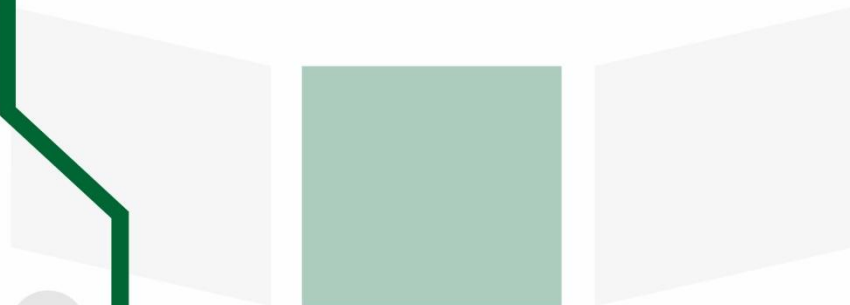
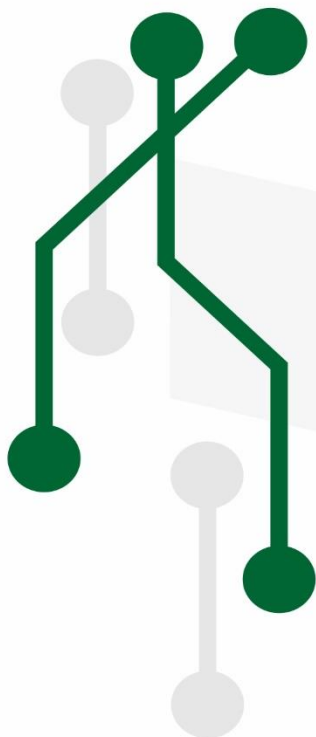
3.1.	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021.....	111
3.1.1.	Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021	112
3.1.2.	Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu	115
3.2.	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RPJMD PERUBAHAN 2021 - 2023	190
BAB IV	P E N U T U P.....	249
4.1.	Kesimpulan	249
4.2.	Saran	249



BAB I



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah

Letak Geografis dan Batas Wilayah

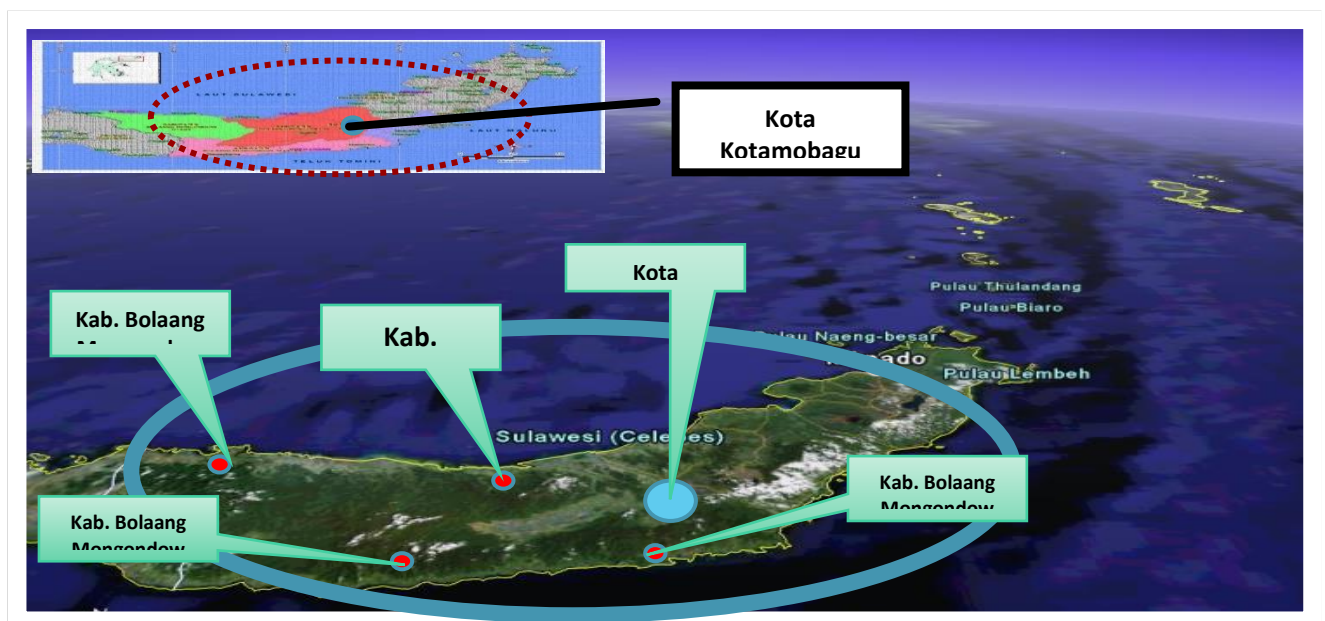
Letak geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi $124^{\circ}15' 9,56''$ – $124^{\circ}21' 1,93''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}41' 16,29''$ - $0^{\circ}46' 14,8''$ Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Passi Barat;
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Modayag;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lolayan;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Passi Barat.

Terletak pada jarak ± 180 km di selatan Ibu Kota Provinsi (Kota Manado). Kota Kotamobagu secara Administratif terbagi dalam 4 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 15 Desa. Yang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 108,89$ km² (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Secara geografis letak Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolmong. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa di wilayah Bolmong Raya pada khususnya dan kawasan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Dengan demikian Kota Kotamobagu menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, *event-event* Nasional/Internasional yang akan diselenggarakan di Bolmong Raya. Pelayanan yang maksimal bagi pemenuhan kebutuhan warga masyarakat juga menjadi tuntutan utama, karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga masyarakat terhadap barang dan jasa. Dampak dari semua ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan sarana transportasi masyarakat, timbulnya kemacetan, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya angka kemiskinan, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota.

Gambar 1.1
Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara



1.1.2. Administrasi dan Luas Wilayah

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara dan berjarak lebih kurang 180 Km dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif Kota Kotamobagu terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan dengan luas wilayah $\pm 108,89 \text{ km}^2$ (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Secara Administrasi, Kota Kotamobagu terbagi menjadi empat kecamatan dengan luas wilayah (daratan) adalah $131,92 \text{ Km}^2$ dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kota Kotamobagu menurut Wilayah 2020

No	Kecamatan	Luas (Km)	Persentase
1	Kotamobagu Timur	23.69	0.45
2	Kotamobagu Selatan	62.97	0.17
3	Kotamobagu Barat	12.20	0.08
4	Kotamobagu Utara	10.04	0.07

Sumber: Kota Kotamobagu dalam angka 2020

1.1.3. Kependudukan

Sebagai daerah otonomi baru setelah terjadi pemekaran tahun 2007, Kota Kotamobagu yang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 68,06 \text{ km}^2$ (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara).

Kota Kotamobagu memiliki 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 15 desa dengan Jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Kotamobagu Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk 2021
1	Kotamobagu Selatan	17.154	16.017	33.171
2	Kotamobagu Timur	15.787	14.972	30.759
3	Kotamobagu Barat	21.593	20.544	42.137
4	Kotamobagu Utara	9.094	8.599	17.693
Kota Kotamobagu		63.628	60.132	123.760

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Barat sebaliknya terendah di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

1.2. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Kotamobagu

Pemerintah Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi pendidikan, kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanahan (kelompok infrastruktur dan tata ruang), Urusan Lingkungan Hidup (kelompok fisik dan lingkungan), Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemudaan Dan Olahraga, Komunikasi Dan Informatika

(Kelompok sosial budaya), Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (kelompok kependudukan) Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian Dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi), Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan), Pertanian, Perternakan, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Kelompok Bidang Pertanian).

1.3. Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang resmi penerapannya pada tanggal 29 Desember 2020. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu, PERDA Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian, 21 (dua puluh satu) Dinas dan 5 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD dan 4 (empat) Kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

A. Dinas-Dinas dalam Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu:

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerja Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Pertanian dan Perikanan;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Sosial;
14. Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Dinas Lingkungan Hidup;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
21. Dinas Pendidikan

B. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Bagian-Bagian dalam Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
4. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Bagian Umum;
8. Bagian Organisasi.

D. Kecamatan.

1. Kecamatan Kotamobagu Barat.

2. Kecamatan Kotamobagu Utara.
3. Kecamatan Kotamobagu Selatan.
4. Kecamatan Kotamobagu Timur.

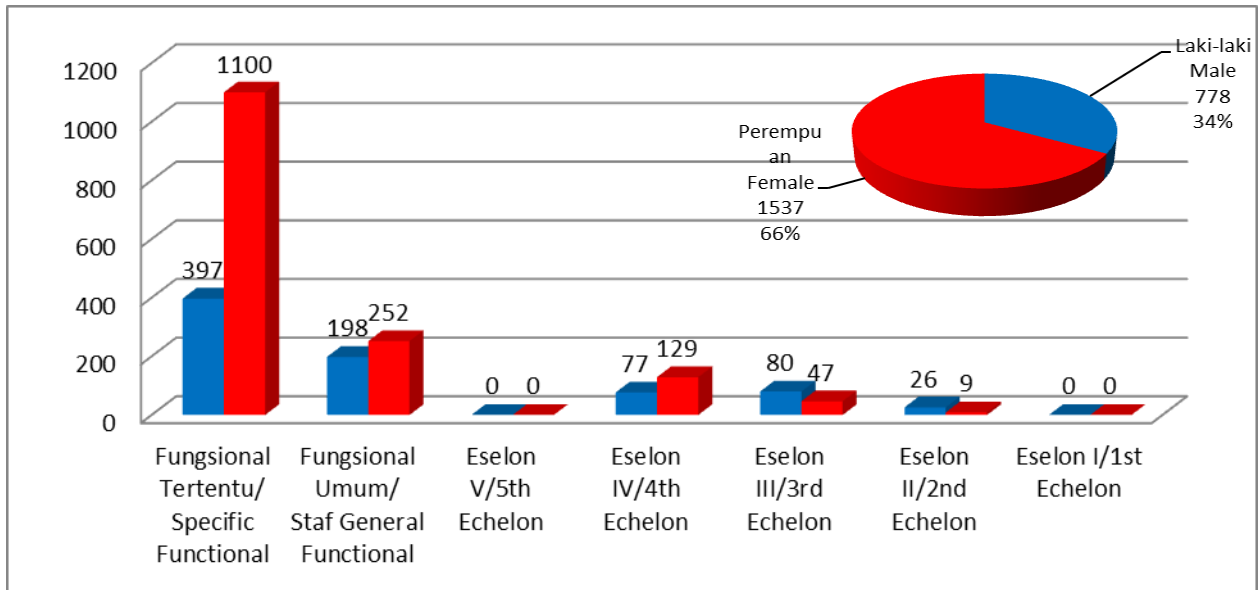
Selain kelembagaan diatas, terdapat pula Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan membawahi 3 bagian:

1. Bagian Risalah dan Persidangan ;
2. Bagian Keuangan ; dan
3. Bagian Umum

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

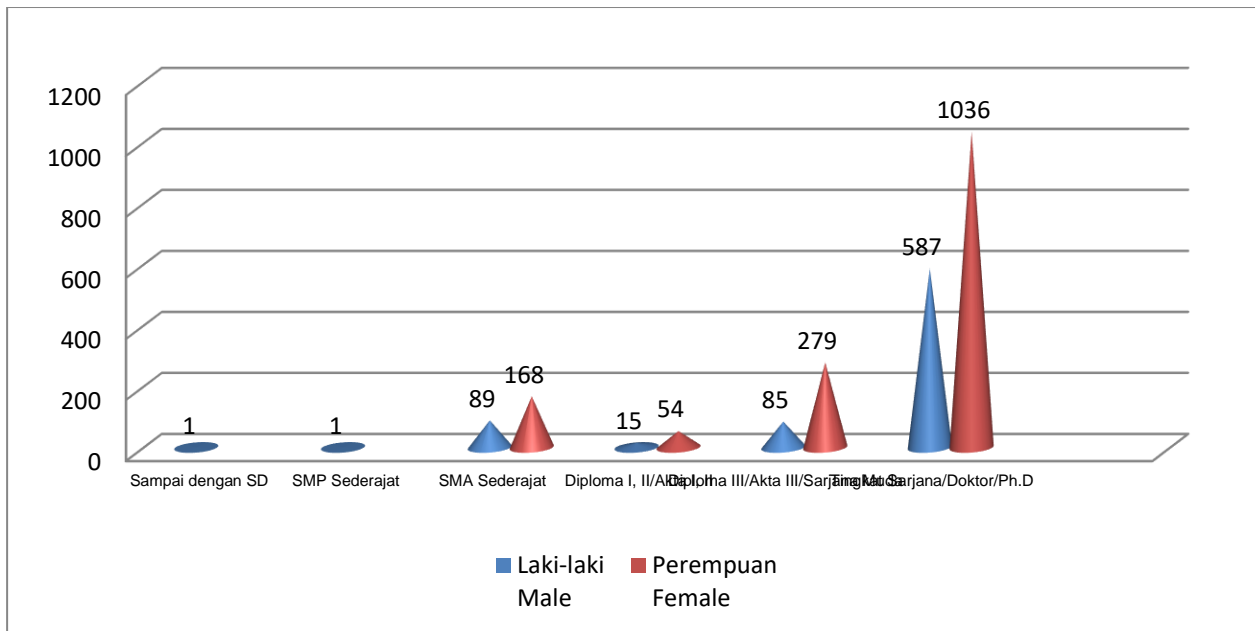
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Selama ini pada umumnya di instansi pemerintahan belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan masih rendahnya produktivitas pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintahan. Maka dengan penerapan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam manajemen Sumber Daya Manusia menyusun Pedoman Pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerapan evaluasi kinerja keseluruhan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dimaksudkan untuk mengelola potensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dalam mengelola potensi dan kualitas sumber Daya Manusia ASN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin



Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu Bulan Desember 2021

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu Bulan Desember 2021

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja masing- masing urusan, dan relevansinya dengan kebijakan periode rencana. Dari hasil analisis diperoleh gambaran permasalahan umum terkait penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

- a) Terbatasan akses kelembagaan dan sarana prasarana PAUD;
- b) Relatif rendahnya partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan (dewan Pendidikan, Yayasan, komite, pemerintah, swasta, masyarakat);
- c) Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*difabel*);
- d) Belum tersedianya Universitas Negeri Kota Kotamobagu;
- e) Masih kurangnya fasilitas Pendidikan berbasis teknologi informasi dan Pendidikan kearifan lokal;

2. Urusan Kesehatan

- a) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan
- b) Masih tingginya penyakit-penyakit menular dan tidak menular (HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD)
- c) Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat
- d) Ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan reagensia laboratorium yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah kunjungan pasien
- e) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan relatif rendah.
- f) Pelayanan Puskesmas yang belum Optimal
- g) Kurang Ketersediaan Dokter Ahli
- h) RSUD Kota Kotamobagu Belum berstandar ISO 9001:2015

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum adanya Konektifitas Jalan Lingkar (*ringroad*) antar wilayah tetangga
- b) Integrasi Infrastruktur, Sarana Prasarana Publik, Penataan Bangunan dan Lingkungannya belum sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Kotamobagu
- c) Belum adanya konsep pengembangan antar wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interkasi yang saling mendukung
- d) Belum memadainya sistem drainase perkotaan
- e) Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi
- f) Penegakan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang belum optimal dilaksanakan
- g) Masih kurangnya pemanfaatan ruang terbuka hijau
- h) Masih adanya kondisi jalan yang mangalami kerusakan ringan sedang dan berat tersebar di wilayah Kota Kotamobagu
- i) Belum Optimalnya Pemanfaatan Dokumen RDTR sebagai acuan dalam pembangunan wilayah
- j) Perda RTRW tidak relevan lagi dengan kondisi Kota Kotamobagu
- k) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kotamobagu

4. Urusan Perumahan

- a) Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
- b) Masih adanya Kawasan kumuh perkotaan
- c) Rendahnya infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, jamban)
- d) Ketersediaan basis data perumahan yang akurat dan komprehensif
- e) Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan
- f) Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- g) Belum adanya pemerataan pemasangan Penerangan Jalan Umum

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana pada OPD belum memadai
- b) Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal

- c) Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
 - d) Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam.
6. Urusan Perhubungan
- a) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan baik kuantitas maupun kualitasnya
 - b) Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan
 - c) Belum terpenuhinya standar keselamatan alat transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat
 - d) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan dan pengemudi melakukan pengujian kendaraan secara berkala.
 - e) Sistem transportasi antar wilayah belum tertata dengan baik
7. Urusan Lingkungan Hidup
- a) Belum semua sungai yang ditetapkan status baku mutu lingkungannya
 - b) Menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan masih adanya pembangunan pemukiman di kawasan daerah aliran sungai
 - c) Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
8. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan
 - b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Tingginya pengaruh negative dari globalisasi bagi anak dan remaja
 - b) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan
 - c) Masih adanya tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a) Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KB dan KS (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)
 - b) Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri
 - c) Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB, di tengah kecenderungan semakin meningkatnya jumlah PUS
11. Urusan Sosial
 - a) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor
 - c) Belum optimalnya penanggulangan bencana sosial
 - d) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
12. Urusan Ketenagakerjaan
 - a) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah.
 - b) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
 - c) Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja.
 - d) Belum optimalnya tingkat pengangguran terbuka
 - e) Kurangnya SDM yang berkualitas , Keterampilan dan Kreatifitas
13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi
 - b) Rendahnya sumberdaya kelembagaan koperasi dan akses pasar
 - c) Masih adanya koperasi tidak aktif dan belum berbadan hukum
 - d) Kurang optimalnya kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya
 - e) Rendahnya minat kewirausahaan dan pengembangan mutu produk UMKM
 - f) Terbatasnya sarana dan prasarana UMKM.
14. Urusan Penanaman Modal
 - a) Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata
 - b) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya
 - c) Jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha
 - d) Belum optimalnya penerapan Community Development (CD) atau Corporate

Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha

- e) Belum adanya perda yang mengatur tentang investasi di Kota Kotamobagu
- f) Daya dukung peluang-peluang investasi, terutama kesiapan lahan belum memadai.

15. Urusan Kebudayaan

- a) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
- b) Belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat
- c) Data-data bidang kebudayaan belum terinventarisasi secara akurat dan lengkap
- d) Belum tersedianya informasi terkait kalender budaya tentang upacara-upacara adat yang diselenggarakan di perkampungan adat.
- e) Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya
- f) Kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- g) Belum Optimalnya keragaman seni dan budaya

16. Urusan Pariwisata

- a) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang pariwisata secara holistik
- b) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan yang menjadi ikon Kota Kotamobagu
- c) Minimnya promosi pariwisata.

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga
- b) Terbatasnya akses untuk menyalurkan minat, bakat dan kreatifitas generasi muda
- c) Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a) Pendidikan politik masyarakat masih rendah

- b) Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (sengketa tanah, perkelahian, penganiyaan, kenakalan remaja, prostitusi, kumpul kebo, miras, dan pencurian
19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- a) Masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antar organisasi perangkat daerah (OPD)
 - b) Belum semua desa/kelurahan menyelesaikan persehatian batas wilayah administrasi desa/kelurahan
 - c) Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur
 - d) Belum semua aset daerah (bergerak dan tidak bergerak) didata dan memiliki legalitas
 - e) Sistem pembinaan jenjang karir ASN belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan
 - f) Masih ada Perda yang belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.
 - g) Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan belum optimal
 - h) Belum optimalnya pelayanan publik di semua lini
 - i) Lemahnya Penagakan supremasi hukum
 - j) Masih perlunya peningkatan kualitas APIP dalam melakukan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan review dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin.
 - k) Masih perlunya penguatan pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, review laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
 - l) Perlunya peningkatan pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di

tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- m) Masih perlunya peningkatan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- n) Perlunya peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan.
- o) Masih belum optimalnya pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- p) Perlunya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- q) Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah tentang penggunaan dana kelurahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien serta tidak

tumpang tindih.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- b) Kapasitas sumber daya aparatur lembaga kemasyarakatan desa yang masih terbatas
- c) Belum optimal kemitraan antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa
- d) Menurunnya modal sosial, budaya gotong royong, di tingkat masyarakat Desa
- e) Belum Optimalnya Pemanfaatan DD dan ADD
- f) Perlu adanya kajian peralihan status dari desa menjadi kelurahan

21. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Belum semua OPD memiliki sistem pendataan yang baik dan akurat
- b) Belum ada sinkronisasi data antara OPD dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan bank data dalam perumusan kebijakan pembangunan
- c) Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan belum optimal;
- d) Pemanfaatan IPTEK dan TI di masyarakat masih kurang
- e) Pemerataan akses internet gratis bagi masyarakat belum optimal
- f) Pengendalian dan integrasi aplikasi pemerintah belum optimal
- g) Pengembangan pelayanan public administrasi yang berbasis TI dan Komunikasi belum optimal

22. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

- a) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan
- b) Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan
- c) Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan bahan bacaan di Perpustakaan Desa/Kelurahan
- d) Pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD belum optimal
- e) Kurangnya tenaga arsiparis di masing-masing OPD.
- f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip secara Digital

23. Urusan Pertanian dan Perikanan

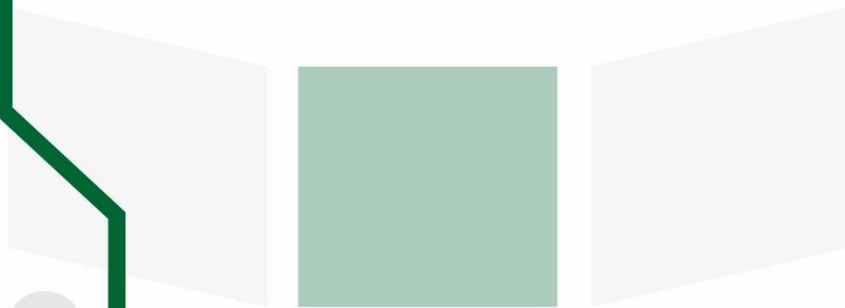
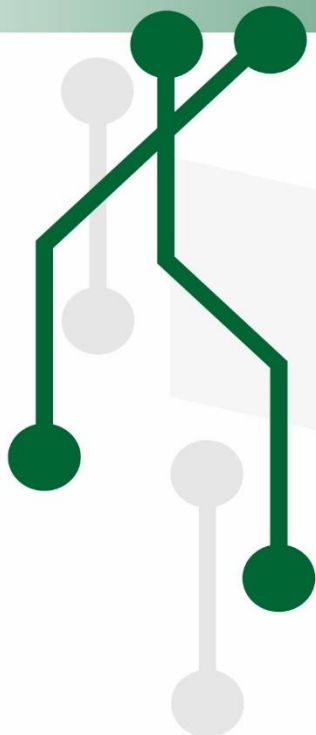
- a) Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian perkebunan dan peternakan;

- b) Belum optimalnya pembangunan pertanian berbasis kawasan.
 - c) Belum optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan
 - d) Terbatasnya akses pembudidaya terhadap permodalan
 - e) Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi lestarinya
 - f) Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
 - g) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian
 - h) Belum optimalnya penggunaan RPH
 - i) Masih terbatasnya tenaga penyuluh baik kuantitas dan kualitas (kompetensi penyuluh)
 - j) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Petani
24. Urusan Perdagangan
- a) Terbatasnya sarana dan Prasarana perdagangan/distribusi
 - b) Belum optimalnya kegiatan promosi komoditi perdagangan
 - c) Kurangnya akses sistem jaringan informasi perdagangan
 - d) Masih banyaknya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan.
 - e) Perlindungan Konsumen belum optimal
25. Urusan perindustrian
- a) Masih rendahnya jumlah dan kompetensi aparatur dan kelompok usaha kecil menengah
 - b) Rendahnya nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
 - c) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah
 - d) Penguasaan teknologi masih rendah
26. Urusan Ketahanan Pangan
- a) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Harus lebih ditingkatkan
 - b) Pola Konsumsi Masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman
 - c) Stabilitas harga masih Fluktuatif

BAB II



PERENCANAAN KINERJA 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2021

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disebut dengan (RPJMD) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Kotamobagu dewasa ini serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi 5 (lima) tahun mendatang, pasangan Ir. Tatong Bara (Walikota) dan Nayodo Koerniawan, SH (Wakil Walikota) membuat Visi Kota Kotamobagu 2019-2023 sebagai berikut:

“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Didalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 tersebut terdapat lima gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu ta Jasa, Perdagangan, Kebudayaan Lokal, Masyarakat Sejahtera, dan Berdaya Saing. Kelima kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kota Jasa, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing, dan meningkatkan pelayanan publik.

Perdagangan, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

Kebudayaan Lokal, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “Moposad dan Pogogutat Motolu Adi”.

Masyarakat Sejahtera, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdaya saing, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dibutuhkan serangkaian Misi sebagai langkah-langkah untuk mewujudkan Visi tersebut.

2.1.2. Misi

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam perwujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Kotamobagu pada akhir periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2018-2023 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2018-2023.

Adapun *Matriks Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Kotamobagu terdapat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Matrik Review RPJMD Kota Kotamobagu

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	
1	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pdrb per kapita (adhk)	Rupiah	23,68	25,09	26,50	27,91	29,32	30,73	30,73
					Tingkat pengangguran (%)	Persen	5,71	5,68	5,60	5,55	5,50	5,00	5,00
				Menurunnya angka kemiskinan	Pdrb per kapita (adhb)	Rupiah	17,06	17,53	18,00	18,47	18,94	19,41	19,41
					Persentase penduduk miskin	Persen	5,96	5,94	5,92	5,91	5,90	5,88	5,88
2	Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara	Persentase panjang jalan kondisi baik dengan kecepatan > 40 km/jam	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase panjang jalan kondisi baik dengan kecepatan > 40 km/jam	Persen	69,26	73,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	
	daerah dan berwawasan lingkungan	terpadu dan merata			Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	86,80	86,91	87,06	87,13	87,20	87,27	87,27
Persentase kesesuaian ruang			Persentase kesesuaian ruang		Persen	- ,00	100	100	100	100	100	100,00	
Persentase rumah tangga berakses air bersih		Meningkatnya penataan lingkungan pemukiman dan perkotaan	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Persen	22,08	24.00	26.00	28.00	30.00	32.00	32,00		
Persentase rumah tinggal ber sanitasi			Persentase rumah tinggal ber sanitasi	Persen	85,00	88,38	91,32	94,26	97,19	100	100,00		
Persentase rumah layak huni			Persentase rumah layak huni	Persen	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100.00	100,00		
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka		Presentase destinasi yang di kembangkan	Meningkatnya destinasi pariwisata daerah	Presentase destinasi yang di kembangkan	Persen	5	-	40	60	80	100	100.00	

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	
		mewujudkan daya saing global			Presentase budaya yang dilestarikan	Persen	25	50	75	85	95	100	100
		Meningkatkan investasi daerah	Nilai investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi	Ruah	3,928,588,264,774	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000
3	Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pedekatan data rill didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan berbasis e-government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai	63,70	70	75	80	80	80	80.00
					Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini bpk)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00
					Zona kepatuhan	Nilai	74	81.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	
					pelayanan public								
					Cakupan area publik ber akses teknologi informasi	Persen	18	36	64	100	100	100	100.00
				Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Presentase peningkatan pad	Persen	- ,00	10	10	10	10	10	50,00
		Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah	Persen	100	100.00	100	100	100	100.00	100.00
					Persentase penanganan konflik social	Persen	100	100.00	100	100	100	100.00	100.00

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD	
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5		
		serta penanggulangan terhadap bencana		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	100	100.00	100	100	100	100	100.00	100,00
	Meningkatkan kualitas hidup keluarga	Kota layak anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Predikat kota layak anak	Predikat	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA		100,00	
Indeks pembangunan gender (ipg)		Indeks pembangunan gender (ipg)		Persen	94,78	94,80	94,82	94,84	94,86	94,88	94,88			
Indeks pemberdayaan gender (idg)		Indeks pemberdayaan gender (idg)		Indeks	57,48	57,48	57,49	57,50	57,51	57,52	57,52			
	Meningkatkan kualitas sdm	Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas,	Persentase atlet olahraga yang berprestasi tingkat regional/nasional	Persen	42,14	45.00	48.00	50.00	60.00	75.00		75,00	

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Target Akhir RPJMD
		Uraian	Indikator kinerja tujuan	Uraian	Indikator sasaran			Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	
				kompetitif dan kreatif	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,97	10,19	10,41	10,63	10,85	11,07	11,07
					Angka harapan hidup	Tahun	69,72	69,74	69,75	69,77	69,78	69,80	69,80
					Persentase organisasi pemuda yang berprestasi tingkat regional/nasional	Persen	0	-	12,50	25,00	38,00	50,00	50,00

2.1.3. Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan (IKU) 2021

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu sebagaimana terlihat dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PDRB per kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	23,68	25,09	26,50	27,91	29,32	30,73	30,73
Tingkat Pengangguran (%)	5,71	5,68	5,60	5,55	5,50	5,00	5,00
PDRB Perkapita (ADHK) (dalam juta rupiah)	17,06	17,53	18,00	18,47	18,94	19,41	19,41
Persentase penduduk miskin (%)	5,96	5,94	5,92	5,91	5,90	5,88	5,88
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	69,26	73,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	86,80	86,91	87,06	87,13	87,20	87,27	87,27
Persentase Kesesuaian Ruang (%)	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)	85,00	88,38	91,32	94,26	97,19	100,00	100,00

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100,00	100,00
Persentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	5,00	- ,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Nilai Investasi (Rupiah)	3.928.588.264.774,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	7.000.000.000,00
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) (Nilai)	63,70	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	74,37	81,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	18,18	36,36	63,64	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Peningkatan PAD (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Persentase penegakan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
cakupan penanganan bencana (Indeks)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (Kategori)	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,78	94,80	94,82	94,84	94,86	94,88	94,88
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,48	57,48	57,49	57,50	57,51	57,52	57,52
Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%)	42,14	45,00	47,50	50,00	60,00	75,00	75,00
Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	9,97	10,19	10,41	10,63	10,85	11,07	11,07
Angka harapan hidup (Tahun)	69,72	69,74	69,75	69,77	69,78	69,80	69,80
Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)	- ,00	- ,00	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	25	50	75	85	95	100	100

Sumber: RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023

2.2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Tim penyusun LKIP dan Tim penyusun RPJMD perubahan Pemerintah Kota Kotamobagu atas Dokumen RPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023, serta menindak lanjuti permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/504/AA.05/2021, maka telah dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk Indikator Kinerja Utama pada RPJMD yang disahkan melalui Peraturan daerah kota kotamobagu Nomor 01 tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 03 tahun 2019 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah kota kotamobagu tahun 2018-2023.

Adapun Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Pemerintah Kota Kotamobagu terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini:

TABEL 2.3

KESELARASAN RPJMD PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2021	2022	2023			2021	2022	2023
MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	72	72	72,50	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Pendidikan	0,69	0,7	0,7
						Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,5	70,6	70,7
						Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	5,4	5,4	5,37
						Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	MADYA	MADYA	MADYA
							Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95,37	95,37	95,40
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,5	5,6	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK (juta rupiah)	2.526.665,03	2.665.631,61	2.814.906,98
						Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	170	343	343
						Meningkatnya Infrastruktur yang	Indeks Infrastruktur	54,99	55,01	55,09

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2021	2022	2023			2021	2022	2023
						Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	58,23	58,33	58,34
							Nilai SAKIP	70	71	72
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	55	55	55	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP
							Indeks SPBE	2,5	2,75	2,85
							Indeks Pelayanan Publik	70	70	88

2.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah sesudah Perubahan RPJMD Kota kotamobagu Tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 2.4
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN RPJMD
KOTA KOTAMOBAGU 2018-2023

ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondi si Kinerj a pada Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			target	target	target	Target
Indeks Kualitas Pendidikan	INDEKS		0,69	0,7	0,70	0,70
Angka Harapan Hidup	TAHUN		70,50	70,60	70,70	70,70
Persentase Kemiskinan	PERSEN		5,4	5,4	5,37	5,37
Predikat Kota Layak Anak	PREDIKAT		MADYA	MADYA	MADYA	MADYA
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	INDEKS		95,37	95,37	95,40	95,40
PDRB ADHK	JUTA RUPIAH		2.526.665, 03	2.665.631, 61	2.814.906, 98	2.814.906, 98
Nilai Investasi	MILIAR RUPIAH		170	343	343	5.000
Indeks Infrastruktur	INDEKS		54,99	55,01	55,09	55,09

ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondi si Kinerj a pada Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			target	target	target	Target
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	INDEKS		58,23	58,33	58,44	58,44
Nilai SAKIP	NILAI		70	71	72	72
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	OPINI		WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks SPBE	INDEKS		2,5	2,75	2,85	2,85
Indeks Pelayanan Publik	INDEKS		70	70	88	88

2.2.2. PERBANDINGAN IKU SEBELUM DAN IKU SESUDAH PERUBAHAN

untuk perbandingan Iku sebelum dan Iku sesudah perubahan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.5
PERBANDINGAN IKU SEBELUM DAN IKU SESUDAH PERUBAHAN

IKU SEBELUM					IKU SESUDAH						
Indikator	Target Capaian			Kondisi Akhir	Indikator	Satuan	kondisi awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2021	2022	2023					target	target	target	Target
PDRB per kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	27,91	29,32	30,73	30,73	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
Tingkat Pengangguran (%)	5,55	5,5	5	5	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
PDRB Perkapita (ADHK) (dalam juta rupiah)	18,47	18,94	19,41	19,41	PDRB ADHK	JUTA RUPIAH		2.526.665.03	2.665.631.61	2.814.906.98	2.814.906.98
Persentase penduduk miskin (%)	5,91	5,9	5,88	5,88	Persentase Kemiskinan	PERSEN		5,4	5,4	5,37	5,37
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	77	80	82	82	Indeks Infrastruktur	INDEKS		54,99	55,01	55,09	55,09
Persentase Kesesuaian Ruang (%)	100	100	100	100							

IKU SEBELUM					IKU SESUDAH						
Indikator	Target Capaian			Kondisi Akhir	Indikator	Satuan	kondisi awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2021	2022	2023					target	target	target	
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	28	30	32	32							
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)	94,26	97,19	100	100							
Persentase Rumah Layak Huni (%)	98,78	99,49	100	100							
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	87,13	87,2	87,27	87,27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	INDEKS		58,23	58,33	58,44	58,44
Presentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	60	80	100	100	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
Nilai Investasi (Rupiah)	1.400.000.000.000.00	1.400.000.000.000.00	1.400.000.000.000.00	7.000.000.000.000.00	Nilai Investasi	MILIAR RUPIAH		170	343	343	5.000
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan	80	80	80	80	Nilai SAKIP	NILAI		70	71	72	72

IKU SEBELUM					IKU SESUDAH						
Indikator	Target Capaian			Kondisi Akhir	Indikator	Satuan	kondisi awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2021	2022	2023					target	target	target	Target
daerah (AKIP) (Nilai)											
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	OPINI		WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	90	95	95	95	Indeks Pelayanan Publik	INDEKS		70	70	88	88
Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	100	100	100	100	Indeks SPBE	INDEKS		2,5	2,75	2,85	2,85
Presentase Peningkatan PAD (%)	10	10	10	10	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
Persentase penegakan peraturan daerah (%)	100	100	100	100	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						

IKU SEBELUM					IKU SESUDAH						
Indikator	Target Capaian			Kondisi Akhir	Indikator	Satuan	kondisi awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2021	2022	2023					target	target	target	
Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100	100	100	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
cakupan penanganan bencana (Indeks)	100	100	100	100	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (Kategori)	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA	Predikat Kota Layak Anak	PREDIKAT		MADYA	MADYA	MADYA	MADYA
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,84	94,86	94,88	94,88	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	INDEKS		95,37	95,37	95,4	95,4
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,5	57,51	57,52	57,52							
Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%)	50	60	75	75	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						

IKU SEBELUM					IKU SESUDAH						
Indikator	Target Capaian			Kondisi Akhir	Indikator	Satuan	kondisi awal	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2021	2022	2023					target	target	target	Target
Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	10,63	10,85	11,07	11,07	Indeks Kualitas Pendidikan	INDEKS		0,69	0,7	0,7	0,7
Angka harapan hidup (Tahun)	69,77	69,78	69,8	69,8	Angka Harapan Hidup	TAHUN		70,5	70,6	70,7	70,7
Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)	25	37,5	50	50	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						
Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	85	95	100	100	SUDAH DISESUAIKAN/DIHILANGKAN						

TABEL 2.5

Rencana Kerja Pemerintah Kota Kotamobagu 2021 s/d 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
SEMUA URUSAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	2.878.458.872	100,00	3.746.825.245	100,00	4.213.014.927	100,00	10.838.299.044	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	2.781.611.784	100,00	3.178.497.000	100,00	3.513.000.000	100,00	9.473.108.784	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	3.037.856.783	100,00	3.063.662.141	100,00	3.228.000.000	100,00	9.329.518.924	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	1.893.808.694	100,00	3.034.790.374	100,00	3.286.341.900	100,00	8.214.940.968	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	90,00	2.906.386.661	90,00	7.182.605.845	90,00	6.812.539.845	90,00	16.901.532.351	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	3.849.612.194	100,00	6.724.594.050	100,00	7.050.670.154	100,00	17.624.876.398	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	2.346.817.380	100,00	2.881.879.380	100,00	3.773.300.000	60,00	9.001.996.760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	4.708.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	14.128.910.336	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	2.491.482.000	100,00	2.647.255.950	100,00	2.646.440.250	100,00	7.785.178.200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	2.083.917.096	100,00	12.775.388.546	100,00	2.625.388.546	100,00	17.484.694.188	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	5.335.550.124	100,00	6.508.000.000	100,00	7.064.000.000	100,00	18.907.550.124	Dinas Pertanian dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	100,00	3.100.961.516	100,00	3.444.273.366	100,00	4.205.080.600	100,00	10.750.315.482	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	90,00	3.114.900.000	90,00	5.053.000.000	90,00	6.068.500.000	90,00	14.236.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	19.951.034.709	100,00	20.218.694.952	100,00	20.507.204.389	60,00	60.676.934.050	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	3.968.499.300	100,00	4.923.999.300	100,00	4.923.999.300	100,00	13.816.497.900	Bagian Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	933.252.150	100,00	909.652.150	100,00	914.652.150	100,00	2.757.556.450	Bagian Pemerintahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	814.000.000	100,00	835.000.000	100,00	835.000.000	100,00	2.484.000.000	Bagian Hukum

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	517.232.550	100,00	932.986.000	100,00	932.986.000	100,00	2.383.204.550	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	317.661.350	100,00	506.319.200	100,00	548.352.000	60,00	1.372.332.550	Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	566.840.250	100,00	719.340.250	100,00	719.340.250	100,00	2.005.520.750	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	321.387.650	100,00	1.565.100.000	100,00	838.200.000	100,00	2.724.687.650	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Kinerja Organisasi	%	- ,00	100,00	572.000.000	100,00	1.196.500.000	100,00	1.446.500.000	100,00	3.215.000.000	Bagian Organisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	20.954.278.709	100,00	23.421.680.132	100,00	24.388.041.632	100,00	68.764.000.473	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kegiatan Layanan	%	100,00	100,00	4.163.044.636	100,00	4.925.200.000	100,00	4.939.700.000	10	14.027.944.636	Badan Perencanaan Penelitian dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Perkantoran									0,00		Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	90,00	6.435.628.980	90,00	6.730.547.530	90,00	6.500.466.078	90,00	19.666.642.588	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	1.301.567.607	100,00	12.049.640.014	100,00	3.645.710.350	100,00	16.996.917.971	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	90,00	6.116.320.325	90,00	5.162.096.084	90,00	9.338.456.913	90,00	20.616.873.322	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	3.009.901.604	100,00	3.344.488.104	100,00	3.834.488.104	100,00	10.188.877.812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	95,00	572.440.880	95,00	3.316.007.500	95,00	3.316.007.500	95,00	7.204.455.880	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	6.260.813.786	100,00	6.986.554.000	100,00	7.382.554.000	60,00	20.629.921.786	Kotamobagu Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	4.090.389.997	100,00	4.360.440.000	100,00	4.587.175.000	60,00	13.038.004.997	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	7.434.032.358	100,00	7.712.291.518	100,00	7.772.579.268	100,00	22.918.903.144	Kotamobagu Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	4.159.617.721	100,00	4.165.437.271	100,00	4.313.908.115	60,00	12.638.963.107	Kotamobagu Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	89.310.021.508	100,00	89.570.595.508	100,00	89.573.595.508	100,00	268.454.212.524	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	41.708.244.000	100,00	42.185.923.870	100,00	43.310.045.064	100,00	127.204.212.934	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	2.706.212.550	100,00	3.211.261.750	100,00	3.677.500.000	100,00	9.594.974.300	UPTD RSUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	95,00	610.916.400	95,00	761.000.000	95,00	736.000.000	95,00	2.714.916.400	UPTD FARMASI

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	7.518.337.946	100,00	8.738.278.916	100,00	10.453.137.800	100,00	26.709.754.662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	95,00	4.203.124.450	95,00	4.493.279.750	95,00	4.617.718.450	95,00	20.444.682.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	98,00	3.412.521.252	98,00	2.911.400.152	98,00	3.069.558.155	98,00	9.393.479.559	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	95,00	2.223.044.012	95,00	2.697.914.150	95,00	3.356.024.250	95,00	8.276.982.412	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95,00	95,00	2.625.898.950	95,00	2.523.568.490	95,00	2.868.948.000	95,00	8.018.415.440	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	%	- ,00	100,00	3.760.765.834	100,00	4.249.790.000	100,00	4.320.290.000	100,00	12.330.845.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	- ,00	87,99	35.531.658.491	88,59	49.168.363.461	89,20	43.399.182.461	89,20	128.099.204.413	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	- ,00	0,52		0,46		0,41		0,41		
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	- ,00	59,04		65,55		72,78		72,78		
	Angka pendidikan yang ditamatkan (SMP/MTs)	%	- ,00	2,23		2,26		2,29		2,29		
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	- ,00	95,99		96,16		96,32		96,32		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	- ,00	99,83		99,93		99,97		99,97		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	- ,00	86,97		87,49		88,01		88,01		
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	- ,00	90,92		92,55		94,22		94,22		
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	- ,00	78,93		79,33		79,73		79,73		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	- ,00	78,23		78,85		79,47		79,47		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	- ,00	0,07		0,05		0,04		0,04		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	- ,00	80,72		83,52		86,42		86,42		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	- ,00	87,99		88,59		89,20		89,20		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	- ,00	99,87		99,90		99,93		99,93		
	Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI)	%	- ,00	1,67		1,69		1,71		1,71		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	- ,00	86,67		93,33		95,01		95,01		
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	- ,00	61,79		64,44		66,99		66,99		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	- ,00	82,14	181.902.100	82,14	273.021.600	82,14	273.021.600	49,28	727.945.300	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	- ,00	81,01	475.367.900	81,53	400.000.000	82,05	400.000.000	82,05	1.275.367.900	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah/Lembaga Kursus yang dikelola Masyarakat yang	%	- ,00	- ,00	0	100,00	82.000.000	100,00	82.000.000	60,00	164.000.000	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	memiliki Izin Operasional Aktif											
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase Sekolah yang aktif menerapkan Hari Khusus Berbahasa Daerah	%	- ,00	46,62	0	46,62	167.877.830	46,62	175.000.000	46,62	342.877.830	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	- ,00	100,00	34.850.078.829	100,00	38.371.804.734	100,00	36.344.098.946	100,00	109.565.982.509	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	- ,00	0,42		0,42		0,42		0,42	0,42	0,42	
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	- ,00	100,00		100,00		100,00			100,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	%	80,60	82,00	87.692.356.943	85,00	81.443.839.440	90,00	83.014.160.000	90,00	252.150.356.383		UPTD RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinasi tentang mutu obat	paket/kali	- ,00	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	135.000.000		UPTD FARMASI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%	- ,00	90,00	1.548.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	4.032.000.000		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	%	49,52	18,75	5.276.832.800	17,97	5.000.000.000	17,66	4.800.000.000	54,38	15.076.832.800		UPTD RSUD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Yang Memiliki Izin	%	- ,00	100,00	222.426.000	100,00	378.668.600	100,00	416.535.460	100,00	1.017.630.060	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	- ,00	90,00	585.715.200	90,00	602.000.000	90,00	697.000.000	90,00	1.884.715.200	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi kewenangan kota	Persen	- ,00	83,00	1.552.811.213	83,00	6.571.543.470	85,00	8.612.040.000	85,00	16.736.394.683	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	Persen	50,00	80,00	6.425.136.909	90,00	7.434.661.909	100,00	9.900.000.000	100,00	23.759.798.818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan fasilitas penanganan sampah di perkotaan	Persen	- ,00	70,00	207.870.900	70,00	722.870.900	80,00	700.000.000	80,00	1.630.741.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	40,59	41,46	2.504.818.987	42,00	2.831.818.987	45,00	5.378.379.200	45,00	10.715.017.174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80,00	95,79	1.720.989.850	98,42	3.807.154.075	100,00	8.300.000.000	100,00	13.828.143.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan paving dikawasan strategis daerah	Persen	60,00	80,00	901.171.966	95,00	3.314.671.966	100,00	5.600.000.000	100,00	9.815.843.932	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	Persen	- ,00	60,00	89.676.200	70,00	2.353.186.425	70,00	3.600.000.000	70,00	6.042.862.625	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya	Persen	- ,00	- ,00	0	- ,00	0	70,00	400.000.000	70,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN KOTA DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM)	Persen	70,56	74,00	19.889.449.045	74,00	45.452.738.259	74,70	68.664.000.000	74,70	134.006.187.304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	- ,00	70,00	49.766.800	70,00	200.000.000	80,00	400.000.000	80,00	649.766.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	20,69	39,43	578.159.400	39,43	2.416.007.100	39,58	4.803.567.500	39,58	7.797.734.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	1.515.896.137	100,00	660.475.000	100,00	648.160.000	100,00	2.824.531.137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program	Persen	- ,00	23,08		38,46		38,46		38,46		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pemerintah Kab/Kota											
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	Persen	93,80	100,00	6.528.451.700	100,00	3.812.315.000	100,00	2.062.315.000	100,00	12.403.081.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi kumuh	Persen	- ,00	- ,00	0	26,62	1.750.000.000	40,00	2.500.000.000	40,00	4.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	17,81	19,35	8.628.012.102	27,06	8.231.675.000	39,94	8.159.175.000	39,94	25.018.862.102	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Persen	- ,00	- ,00	0	14,29	54.700.000	28,57	109.400.000	42,86	164.100.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	- ,00	85,00	1.773.620.000	85,00	4.049.825.000	90,00	3.599.825.000	52,00	9.423.270.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Anggota Linmas yang diberdayakan	%	- ,00	100,00	600.000.000	100,00	0	100,00	0	60,00	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan kerugian material dan korban bencana	Persen	- ,00	90,00	57.458.000	90,00	238.636.960	90,00	2.191.812.500	90,00	2.487.907.460	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00			10,00
	Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	- ,00	62,79	501.550.000	62,79	1.169.170.000	62,79	1.037.420.000	62,79	2.708.140.000	2.708.140.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Waktu tanggap respon time	waktu	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	penanganan kebakaran											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan	%	- ,00	3,15	278.971.700	5,26	304.000.000	7,36	628.400.000	7,36	1.211.371.700	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	- ,00	23,95	221.052.450	23,95	455.354.000	23,95	626.854.000	23,95	1.303.260.450	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani melalui perlindungan dan jaminan sosial	%	- ,00	100,00	93.569.000	100,00	248.645.786	100,00	429.510.000	100,00	771.724.786	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pengelolaan Taman makam pahlawan	%	100,00	100,00	50.294.000	100,00	74.972.827	100,00	200.000.000	100,00	325.266.827	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100,00	100,00	151.973.600	100,00	138.340.500	100,00	72.152.000	100,00	362.466.100	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	- ,00	3,75	100.000.000	6,00	300.000.000	8,00	500.000.000	8,00	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	- ,00	3,71	150.000.000	3,71	400.000.000	3,71	750.000.000	3,71	1.300.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	- ,00	31,25	100.000.000	64,14	145.000.000	88,82	190.000.000	88,82	435.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	- ,00	- ,00	0	90,00	30.000.000	90,00	30.000.000	90,00	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	58,65	58,75	250.000.000	58,80	1.300.000.000	58,85	1.350.000.000	58,85	2.900.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan Korban kekerasan per 1000 orang penduduk (usia 18 tahun ke atas)	%	- ,00	0,10	708.710.000	0,09	738.010.000	0,08	775.510.000	0,08	2.222.230.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	38,51	95,37	680.843.200	95,38	940.000.000	95,39	1.185.791.000	95,39	2.806.634.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rasio anak yang terdata di Kabupaten/Kota per 1000 anak (Usia kandungan -18 tahun)	%	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	%	- ,00	100,00	155.000.000	100,00	215.000.000	100,00	275.000.000	100,00	645.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	%	- ,00	0,11	607.375.200	0,12	802.500.000	0,14	730.000.000	0,14	2.139.875.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	(%)	100,00	100,00	2.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	60,00	44.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN												
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	%	15,00	15,00	958.489.920	15,00	1.442.686.800	15,00	2.071.475.000	9,00	4.472.651.720	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,00	91,00		91,00		91,00		54,60		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor	5,00	5,00	68.960.000	5,00	91.580.000	5,00	113.330.000	3,00	273.870.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	(%)	90,00	90,00	55.474.460	90,00	111.029.000	90,00	166.423.500	54,00	332.926.960	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin	Persen	- ,00	100,00	147.485.000	- ,00	0	- ,00	0	100,00	147.485.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	lokasi yang diterbitkan											
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	Persen	- ,00	100,00	39.892.700	100,00	15.500.000	100,00	15.500.000	100,00	70.892.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	- ,00	100,00	18.960.750	- ,00	0	- ,00	0	100,00	18.960.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	- ,00	100,00	76.648.800	- ,00	0	- ,00	0	100,00	76.648.800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Persen	- ,00	100,00	56.933.300	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	156.933.300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	- ,00	100,00	239.797.200	- ,00	0	- ,00	0	100,00	239.797.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	171.511.050	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	211.511.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI USAHA KEGIATAN YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	80,00	479.970.900	85,00	100.000.000	90,00	1.250.000.000	90,00	1.829.970.900	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI PARAMETER PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	Persen	- ,00	100,00	241.392.200	100,00	351.000.000	100,00	470.000.000	100,00	1.062.392.200	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LOKASI PENGELOLAAN KEANEKARAGAM	persen	- ,00	- ,00	0	100,00	500.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	AN HAYATI (KEHATI)											
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASI USAHA/KEGIATAN YANG MENDAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	100,00	10.322.000	100,00	10.500.000	100,00	25.000.000	100,00	45.822.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Penghargaan	- ,00	1,00	46.908.000	1,00	53.000.000	1,00	65.000.000	3,00	164.908.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI	Persen	95,83	96,00	7.130.479.300	96,50	8.089.000.000	97,00	10.050.000.000	97,00	25.269.479.300	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Dokumen	%	- ,00	91,00	97.522.650	95,00	195.806.714	98,00	240.000.000	98,00	533.329.364	Dinas Kependudukan dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pelayanan Pencatatan Sipil											Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	- ,00	91,00	640.865.050	95,00	435.060.100	98,00	668.000.000	98,00	1.743.925.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Sarana SIAK yang terpelihara	%	- ,00	91,00	173.111.000	95,00	196.764.900	98,00	260.000.000	98,00	629.875.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk	%	- ,00	91,00	8.769.300	95,00	79.300.400	98,00	100.000.000	98,00	188.069.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penatan Desa	%	- ,00	- ,00	0	100,00	300.000.000	100,00	200.000.000	100,00	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	- ,00	- ,00	0	33,33	300.000.000	46,67	450.000.000	80,00	750.000.000	Dinas Pemberdayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
												Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%	- ,00	100,00	1.061.901.777	100,00	2.289.222.752	100,00	1.250.000.000	100,00	4.601.124.529	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang diberdayakan	%	- ,00	18,64	43.241.150	59,32	835.000.000	59,32	775.000.000	59,32	1.653.241.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Rata Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Jumlah	2,38	2,10	189.905.800	2,07	644.016.400	2,04	552.016.400	1,24	1.385.938.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Presentase	25,00	75,00	2.291.638.090	75,00	2.387.574.300	75,00	2.434.574.300	45,00	7.113.786.690	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Presentase Anggota	Presentase	68,25	68,50	137.105.600	68,75	3.357.000.000	69,00	3.357.200.000	41,25	6.851.305.600	Dinas Pengendalian Penduduk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kelompok Yang Ber-KB											dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prsentase Fasilitasi Keselamatan Berlalu lintas	Persentase	- ,00	80,00	1.626.240.000	80,00	11.338.259.500	80,00	19.099.543.750	48,00	32.064.043.250	Dinas Perhubungan
	Jumlah Titik Pengawasan	Titik	15,00	20,00		25,00		25,00		21,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	%	- ,00	100,00	5.683.000.000	100,00	7.460.470.000	100,00	7.015.126.000	100,00	20.158.596.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase diseminasi dan layanan infomasi publik yang dilaksanakan sesai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	SOP yang telah ditetapkan												
	Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	- ,00	57,00		75,00		100,00		100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan Dinas Kominfo	%	- ,00	75,00	2.993.000.000	90,00	5.170.095.000	100,00	5.890.142.500	100,00	14.053.237.500		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai	%	- ,00	45,00		90,00		100,00		100,00	100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	dengan ketentuan perundang-undangan											
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	- ,00	22,00		90,00		100,00		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	- ,00	33,33	32.522.800	60,60	32.522.800	100,00	50.000.000	100,00	115.045.600	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	- ,00	69,69	172.985.400	84,84	172.985.400	100,00	207.582.480	100,00	553.553.280	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	%	- ,00	3,28	534.383.500	3,28	852.318.600	3,59	1.030.782.320	3,59	2.417.484.420	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	- ,00	- ,00	0	0,79	112.500.000	- ,00	112.500.000	- ,00	225.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		74,33	- ,00	0	91,66	550.000.000	100,00	400.000.000	100,00	950.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentasi Promosi Penanaman Modal		- ,00	14,29	15.000.000	42,86	200.000.000	42,86	200.000.000	42,86	415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentasi Pelayanan Penerbitan Perizinan		100,00	- ,00	0	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	60,00	430.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan		- ,00	33,07	322.573.000	49,41	322.573.000	100,00	322.573.000	36,50	967.719.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Penanaman Modal											Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi	Nilai	81,00	- ,00	0	85,00	35.000.000	86,00	35.000.000	84,00	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase wirausaha muda	%	71,43	80,95	2.250.000.000	88,10	2.250.000.000	100,00	2.250.000.000	100,00	6.750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pelatih yang berkualitas	%	91,23	94,74	66.404.000.000	98,25	66.404.000.000	100,00	66.404.000.000	58,60	199.212.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pembinaan cabang olahraga	%	80,77	84,62		88,46		92,31		53,08		
	Persentase sarana dan prasarana olahraga	%	41,67	50,00		58,33		66,67		35,00		
	Persentase pembinaan atlet muda	%	57,14	60,71		64,29		67,86		38,57		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik Sektoral	%	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	535.000.000	100,00	365.000.000	100,00	930.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seuruh titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) pemerintah daerah yang ditetapkan	%	- ,00	- ,00	0	100,00	395.000.000	100,00	390.000.000	100,00	785.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan	%	- ,00	- ,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	infomasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan budaya daerah	%	- ,00	100,00	110.000.000	100,00	355.000.000	100,00	355.000.000	100,00	820.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM yang menguasai kesenian tradisional	%	- ,00	- ,00	0	100,00	35.000.000	- ,00	0	- ,00	35.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	%	- ,00	- ,00	0	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	- ,00	33,00	100.000.000	66,00	500.000.003	100,00	500.000.003	100,00	1.100.000.006	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Pengunjung	- ,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Koleksi Buku yang tersedia Di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku	- ,00	18.351,00	19.851,00	21.351,00	21.351,00	21.351,00	21.351,00	21.351,00	21.351,00	
	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah Buku	- ,00	2.496,00	2.796,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Jumlah Perpustakaan	- ,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Kunjungan	- ,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tercapainya Pengelolaan Asip Dinamis Di OPD	Dokumen	- ,00	43,00	36.542.200	43,00	790.000.000	43,00	200.000.000	43,00	1.026.542.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah Yang Mengelolah Arsip Secara baku	OPD	- ,00	421,00	89.935.900	7.236,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	439.935.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	Ton	- ,00	791,00	812.951.050	801,00	2.415.400.000	813,00	2.390.000.000	813,00	5.618.351.050	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	- ,00	- ,00		90,00		90,00		90,00		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	%	- ,00	- ,00	0	80,00	50.000.000	80,00	60.000.000	80,00	110.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya	%	- ,00	100,00	54.000.000	93,00	875.000.000	93,00	175.000.000	93,00	1.104.000.000	Dinas Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	tarik destinasi pariwisata											dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang di promosikan	%	- ,00	- ,00	0	84,00	664.550.000	84,00	664.550.000	84,00	1.329.100.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100,00	100,00	29.296.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	60,00	149.296.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	%	- ,00	- ,00	1.484.220.150	0,13	2.830.000.000	0,13	2.825.000.000	0,13	7.139.220.150	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan	%	- ,00	85,00	963.077.650	85,00	4.126.000.000	85,00	1.450.000.000	85,00	6.539.077.650	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	%	- ,00	100,00	274.228.500	100,00	955.000.000	100,00	941.000.000	100,00	2.170.228.500	Dinas Pertanian dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	penyakit hewan menular											
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	- ,00	100,00	37.227.650	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	157.227.650	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase gabungan kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas	%	- ,00	80,00	263.967.250	80,00	920.000.000	80,00	985.000.000	80,00	2.168.967.250	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Penunjang sarana dan Prasarana	%	- ,00	75,00	441.000.000	75,00	1.225.200.000	100,00	375.000.000	50,00	2.041.200.000	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ambang Batas Kenaikan Harga	%	- ,00	- ,00	0	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	50.000.000	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	%	- ,00	- ,00	0	2,11	83.200.000	5,28	106.292.000	5,28	189.492.000	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk dalam Negeri yang dipromosikan dan dipasarkan	%	- ,00	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	307.751.250	Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	- ,00	- ,00	0	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri	%	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	(IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang Dikembangkan	%	70,87	16,51	650.000.000	27,23	1.350.000.000	27,13	2.050.000.000	27,13	4.050.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	%	- ,00	- ,00	0	20,00	300.000.000	20,00	350.000.000	20,00	650.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	%	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00		
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	100,00	1.355.000.000	100,00	2.235.000.000	100,00	2.450.000.000	100,00	6.040.000.000	Bagian Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	Persentase	- ,00	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	2.850.000.000	Bagian Hukum
	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase	- ,00	90,00		90,00		90,00	90,00	90,00		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	80,00	13.342.289.670	80,00	17.618.527.065	80,00	17.800.000.000	48,00	48.760.816.735	Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD	Nilai	- ,00	3,60	320.000.000	3,80	320.000.000	4,00	320.000.000	2,28	960.000.000	Bagian Pemerintahan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pengawasan harga bahan pangan, migas bersubsidi dan kegiatan pembangunan daerah	Persen	- ,00	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	1.123.920.000	Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa	%	100,00	100,00	180.168.024	100,00	1.470.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	3.150.168.024	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	- ,00	90,00	10.988.440.600	90,00	9.626.650.000	90,00	12.332.500.000	54,00	32.947.590.600	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN												
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	1.151.209.100	100,00	1.169.600.000	100,00	1.436.100.000	100,00	3.756.909.100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terselesaikan	%	100,00	100,00	700.246.000	100,00	1.370.000.000	100,00	1.445.000.000	100,00	3.515.246.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA,	%	100,00	100,00		100,00		100,00				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terselesaikan											
KEUANGAN												
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	%	- ,00	90,00	80.494.281.123	90,00	88.016.701.335	90,00	92.640.127.548	90,00	261.151.110.006	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	- ,00	90,00	331.448.760	90,00	584.297.388	90,00	584.297.388	90,00	1.500.043.536	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pendapatan asli daerah	%	- ,00	90,00	2.398.491.007	90,00	2.872.910.412	90,00	3.253.493.692	54,00	8.524.895.111	Badan Pengelola Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase lembaga profesi yang terbentuk	%	- ,00	- ,00	1.760.127.900	100,00	2.082.850.100	- ,00	2.033.050.100	- ,00	5.876.028.100	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Kepegawaian Tepat Waktu											
	Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi	%	- ,00	95,00		95,00		95,00		95,00		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	- ,00	0,22		0,36		0,36		0,36		
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik	%	- ,00	- ,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)	%	- ,00	- ,00		95,00		95,00		95,00		
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase ASN yang lulus ujian dinas	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	%	- ,00	35,00	84.774.000	36,00	1.850.000.000	37,00	1.600.000.000	37,00	3.534.774.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase kebijakan penelitian dan pengembangan	persen	- ,00	50,00	513.292.600	75,00	661.250.000	100,00	793.500.000	100,00	1.968.042.600	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Rekomendasi	- ,00	35,00	772.898.825	30,00	469.157.675	30,00	1.968.176.904	30,00	3.210.233.404	Inspektorat Daerah
	Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut	Rekomendasi	- ,00	40,00		35,00		30,00		30,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	hasil pemeriksaan APIP	ndasi										
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kegiatan	- ,00	15,00		15,00		15,00		15,00		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP berkembang	Perangkat Daerah	- ,00	10,00		10,00		10,00		10,00		
	Persentase penanganan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	%	- ,00	100,00	51.711.900	100,00	216.711.900	100,00	458.017.994	100,00	726.441.794	Inspektorat Daerah
KECAMATAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%	90,00	100,00	1.088.683.200	100,00	1.394.300.000	100,00	1.396.800.000	60,00	3.879.783.200	Kotamobagu Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%	100,00	100,00	541.800.000	100,00	815.000.000	100,00	880.000.000	60,00	2.236.800.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%	- ,00	100,00	1.243.500.000	100,00	1.015.800.000	100,00	1.243.500.000	100,00	3.502.800.000	Kotamobagu Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	%	90,00	95,00	46.873.000	100,00	46.873.000	100,00	46.873.000	59,00	140.619.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	%	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	6.028.000.000	100,00	6.035.000.000	60,00	13.263.000.000	Kotamobagu Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	%	85,00	90,00	606.750.000	90,00	3.185.000.000	90,00	3.187.500.000	54,00	6.979.250.000	Kotamobagu Selatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	%	- ,00	100,00	2.463.750.000	100,00	2.493.750.000	100,00	2.503.750.000	100,00	7.461.250.000	Kotamobagu Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	%	85,00	90,00	465.750.000	90,00	1.065.750.000	90,00	1.091.400.000	54,00	2.622.900.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	480.000.000	- ,00	0	- ,00	0	20,00	480.000.000	Kotamobagu Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%	100,00	100,00	325.200.000	- ,00	0	100,00	30.000.000	40,00	355.200.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah	%	- ,00	90,00	110.028.320	90,00	0	- ,00	0	54,00	110.028.320	Kotamobagu Barat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Desa/Kelurahan/Kecamatan											
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	%	- ,00	85,00	250.000.000	- ,00	0	- ,00	0	17,00	250.000.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	%	75,00	- ,00	0	90,00	46.807.900	90,00	50.000.000	54,00	96.807.900	Kotamobagu Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	%	75,00	80,00	31.530.300	80,00	60.000.000	80,00	65.000.000	48,00	156.530.300	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	%	- ,00	- ,00	0	90,00	22.203.100	90,00	40.000.000	36,00	62.203.100	Kotamobagu Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	%	- ,00	- ,00	0	90,00	162.500.000	90,00	162.500.000	54,00	325.000.000	Kotamobagu Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	yang diselesaikan tepat waktu											
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	%	- ,00	- ,00	0	80,00	40.300.000	85,00	60.000.000	48,00	100.300.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	%	- ,00	- ,00	0	90,00	35.340.000	90,00	75.000.000	36,00	110.340.000	Kotamobagu Utara
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	%	- ,00	100,00	89.197.000	100,00	109.197.000	100,00	109.197.000	100,00	307.591.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	%	- ,00	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	2.147.153.550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	- ,00	100,00	13.687.350	100,00	13.687.350	100,00	25.000.000	100,00	52.374.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	%	- ,00	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	292.053.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	%	- ,00	100,00	513.736.150	100,00	1.033.528.100	100,00	1.033.528.100	100,00	2.580.792.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.3. Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen dari Pimpinan Daerah dalam hal ini Walikota Kotamobagu untuk mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur tentang waktu satu tahun berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan; dan
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah sebagaimana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan
Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (ADHB)	Dalam juta rupiah	27,91
		PDRB Perkapita (ADHK)	Dalam juta rupiah	18,47
		Tingkat Pengangguran	%	5,55
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	5,91
3	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	87,13

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
	berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Ruang	%	100
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	77,00
4	Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,78
		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	28,00
		Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	94,26
5	Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestarian Budaya Daerah	Persentase Budaya yang dilestarikan	%	85
		Persentase Destinasi yang di Kembangkan	%	60
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Rupiah	1.400.000.000.0000 .,00
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
	responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	%	100
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	80
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	90
8	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	%	10
9	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100
		Persentase penegakan peraturan daerah	%	100
10	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	cakupan penanganan bencana	Indeks	100
11	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,84
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,50

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
		Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Kategori	MADYA
12	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Angka harapan hidup	Tahun	69,77
		Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	10,63
		Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	%	50
		Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	%	25

Program-Program berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Program berdasarkan Sasaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	957.368.400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.207.101.150
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	963.077.650

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.045.700
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	37.227.650
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	258.073.250
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.021.543.470
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	222.870.900
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.491.818.987
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.534.661.909
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.886.250
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	32.748.400
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	644.692.400
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	488.322.752
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DA MASYARAKAT HUKUM ADAT	52.841.150
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	32.522.800
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	172.985.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	534.383.500
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	426.390.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	958.489.920
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	68.960.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	55.474.460
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	189.905.800
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.109.414.912
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	336.981.924
	Sasaran: Menurunnya Angka Kemiskinan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	252.357.700
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	221.052.450
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	93.569.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.294.000
	Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.240.989.850,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	143.676.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	19.032.375.645,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	49.766.800,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	752.914.600,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	496.998.900,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	227.644.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.322.000,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	53.116.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.817.535.300

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	635.140.000
4	Sasaran: Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	914.671.966
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	955.323.100
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.958.631.600
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.128.012.102
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	18.960.750
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	56.933.300
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	171.511.050
5	Sasaran: Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestaria Budaya Daerah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	30.861.700
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	97.783.600
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	54.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	29.296.000
6	Sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	45.421.900
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	102.583.750
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif, akuntabel dan e-Government	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.360.426.627
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	640.865.050

NO	PROGRAM	ANGGARAN
7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	97.522.650
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	173.111.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.769.300
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.586.020.800
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.675.126.250
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30.000.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.760.127.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	84.774.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.899.646.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.136.250.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.352.440.600
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.151.209.100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	640.735.800
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	513.292.600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.530.300
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	469.157.675	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	51.711.900	
8	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	80.333.281.123
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	331.448.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.398.491.007
	Sasaran: Meningkatnya Keamanan ketertiban dan Kehidupan bermasyarakat yang kondusif	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.892.700
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.408.370.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	379.300.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	89.197.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	715.717.850
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.687.350
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	97.351.300
9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	31.343.350
	Sasaran: Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	684.995.924
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	151.973.600
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	102.650.600

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	149.570.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	269.272.750
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.398.800
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.908.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	333.533.100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.240.576.690
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	86.688.000
	Sasaran: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat Cerdas Kompetitif dan Kreatif	
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	112.120.797.865
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.810.584.200
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	42.426.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	478.926.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.532.658.491
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	181.902.100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	475.367.900
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	357.695.350
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	36.542.200
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	89.935.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.100.561.850
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.221.084.700

2.2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan Tanggal 01 Januari 2021 sejalan dengan perubahan RPJMD Kota Kotamobagu dengan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan tanggal 01 Desember 2021. Sehubungan dengan adanya Perubahan Sasaran dan Indikator, Target Perjanjian Kinerja Perubahan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah sebagaimana pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah Kota Kotamobagu 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	0,7
		Angka Harapan Hidup	Tahun	70,6
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase kemiskinan	%	5,4
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK	JUTA RUPIAH	2.665.631,61

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
5	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	MILIAR RUPIAH	170
6	Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Indeks	55,01
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	Indeks	58,33
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	NILAI	71
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	OPINI	WTP
		Indeks SPBE	INDEKS	2,75
		Indeks Pelayanan Publik	INDEKS	70

Program-Program berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Program berdasarkan Sasaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.177.027.661
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	90.021.600
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	483.253.800
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	239.326.200

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	413.771.550
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	600.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	160.029.600
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	952.701.800
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	221.700.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.005.880
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	120.925.400
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.227.048.990
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	30.135.000
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	317.238.500
	Sasaran: Menurunnya Angka Kemiskinan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	278.971.700
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	218.352.450
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.198.250
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	762.887.050
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	48.500.650
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.111.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.769.300
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	615.267.777
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	43.241.150
3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	48.792.600
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	139.045.550
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	263.681.750
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.065.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.558.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	364.733.100
	Sasaran: Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	172.985.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	524.080.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	925.968.400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	956.077.650
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	163.045.700
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	231.473.250
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	300.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	102.182.350
	Sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah	
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.703.350.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	489.750.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	31.129.650

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	26.849.200
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	54.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	824.327.746
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	18.551.750
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	686.058.900
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	494.047.600
	Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.557.614.221
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.477.561.909
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	102.777.900
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.527.818.987
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.309.335.929
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.299.135.825
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	80.676.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22.411.693.457
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	49.766.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.183.327.886

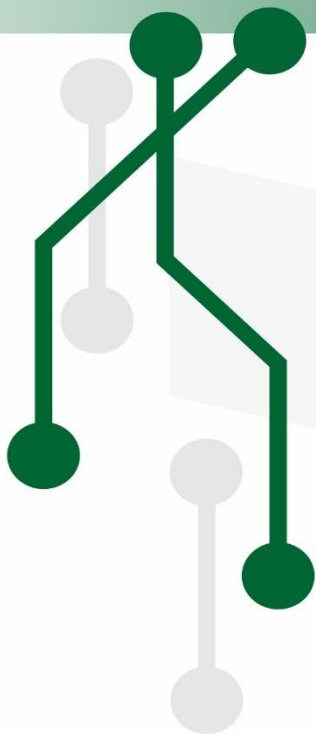
NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.587.927.700
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.637.668.186
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.649.400
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	41.509.700
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	26.916.600
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	406.669.300
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	241.392.200
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.208.000
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.908.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.297.371.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	619.088.500
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	36.794.000
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.162.628.050
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.369.070.200
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	895.104.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.332.083.250
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.997.900
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	18.498.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	65.776.300

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.181.275.100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	256.671.924
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.284.812.600
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	410.268.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	496.829.800
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	60.419.104.425
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	390.694.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.395.847.307
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.532.843.759
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	66.424.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	433.387.800
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	112.404.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.700.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.338.850.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.023.029.980
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	240.720.020
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.848.900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.949.870.219

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023.

Keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (*goal*) serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis RPJMD. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran kinerja mencakup realisasi kinerja, capaian kinerja tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir RPJMD.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masing-masing perangkat daerah.

Penghitungan persentase pencapaian capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\% \text{ Pencapaian Kinerja}}{100\%} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber Data Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 (Tabel T-E.1.)

3.1.1. Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021

Analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan Program dan

Kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan pula dalam perjanjian kinerja tahun 2021 (lihat Bab II).

Sasaran dalam rangka pencapaian visi misi Walikota adalah sebagai berikut:

- Misi 1 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran
- Misi 2 terdapat 3 tujuan, 4 sasaran dan 9 indikator sasaran
- Misi 3 terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 15 indikator sasaran

(8 tujuan, 12 sasaran dan 26 indikator sasaran)

Dari 12 (dua belas) sasaran dengan 26 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu adalah:

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 1 (4 indikator sasaran)			
1	Sangat Tinggi	-	-
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
6	Nilai belum keluar	4	-
	Jumlah	4	-

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 2 (9 indikator sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	22%
2	Tinggi	1	11%
3	Sedang	2	22%
4	Rendah	4	44%
5	Sangat Rendah	-	-
6	Nilai belum keluar	-	-
	Jumlah	9	8,55%

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
Misi 3 (15 indikator sasaran)			
1	Sangat Tinggi	9	60%
2	Tinggi	1	6%
3	Sedang	1	6%
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
5	Nilai belum keluar	4	-

No	Kategori	Jumlah indikator sasaran	Presentase
	Jumlah	15	4,8%

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 sasaran yang mencakup 28 indikator sasaran, diketahui bahwa 9 indikator sasaran bernilai Sangat Tinggi, 2 indikator sasaran Tinggi, 3 indikator bernilai Sedang, 4 indikator sasaran bernilai Rendah dan 8 indikator nilai capaian belum dirilis. Rata-rata capaian kinerja mencapai **47,67%** atau bermakna **Sangat Rendah**

Jadi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun 2021 bernilai Sedang.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.1

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
PDRB per kapita (ADHK)	Rupiah	27.91	Belum ada rilis	Belum ada rilis	30.73
Tahun 2020	Rupiah	26,50	15.81	59.66	
Tingkat Pengangguran	Persen	5.55	Belum ada rilis	Belum ada rilis	5.00
Tahun 2020	Persen	5.60	7.44	75.25	
PDRB per kapita (ADHB)	Rupiah	18.47	Belum ada rilis	Belum ada rilis	19.41
Tahun 2020	Rupiah	18.00	17.83	99.05	

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				Belum ada rilis	

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu Tahun 2021

- **Indikator Sasaran PDRB per kapita (ADHK)**

Indikator **PDRB per Kapita (ADHK)** hingga akhir bulan desember Tahun 2021 belum ada rilis dari BPS Kota Kotamobagu dari target 27.91

Indikator **PDRB per kapita (ADHK)** hingga akhir bulan desember tahun 2020 dari target 26.50 realisasi kinerja 15,81 dengan capaian kinerja 59.66%

- **Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran**

Indikator **Tingkat Pengangguran** hingga akhir bulan desember tahun 2020 sumber dari BPS Kota Kotamobagu dari target 5,60 dengan realisasi 7,44 cpaian kinerja 75,26 tingkat pengangguran meningkat di karenakan bencana pandemi Covid-19

Indikator **Tingkat Pengangguran** hingga akhir bulan desember tahun 2021 sumber dari BPS Kota Kotamobagu realisasi Belum dirilis Tingkat Pengangguran di Kota Kotamobagu.

- **Indikator Sasaran PDRB per kapita (ADHB)**

Indikator **PDRB per kapita (ADHB)** hingga akhir bulan desember tahun 2020 dengan target 18.00 dengan realisasi 17.83 dengan capaian kinerja 99.05%

Sedangkan PDRB per kapita (ADHB) tahun 2021 dengan target 18.47 dengan realisasi belum ada rilis dari BPS Kota Kotamobagu.

- **Faktor-Faktor Pendorong Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

- Peningkatan kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas pertanian dan Perikanan, karena terbatasnya lahan di Kota Kotamobagu maka kemampuan dan kemandirian kelompok tani dalam mengakses dan menerapkan teknologi pertanian menjadi fokus utama dalam

rangka peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok tani. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, diharapkan pertanin di tingkat kelompok tani dapat diberdayakan secara mandiri.

- a. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan hasil pelaksanaan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan Hewan dengan Menyediakan Obat-obatan dan Vaksinasi Hewan, Penurunan tingkat Penularan Penyakit Hewan dan Zoonosis untuk menunjang Hewan yang sehat, Mengurangi jumlah Penyakit Hewan yang menular dan Zoonosis yang berbahaya ketika terjadi Gigitan Anjing terhadap Manusia.

Permasalahan yang di hadapi:

- Masih kurangnya Kerjasama Pemerintah Kota (Desa/Kelurahan) dengan Swasta dalam pencegahan dan penanganan penyakit Hewan yang menular dan Zoonosis;
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan penyakit Hewan Menular dan Zoonosis;
 - Kesanggupan masyarakat/pemilik ternak Kesehatan Hewan untuk berswadaya;
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan hasil pelaksanaan, Meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan Sarana Pertanian / Perkebunan yang dibutuhkan oleh Petani, Menekan biaya pengolahan usaha Pertanian dan Perkebunan, Mempercepat proses pengolahan Usaha Pertanian / Perkebunan.

Permasalahan yang di hadapi:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian Sarana Pertanian (Alsintan);
- Perlunya waktu dalam mengubah kebiasaan Pertanian Tradisional ke Pertanian Modern;
- Perlunya waktu dalam merubah Perilaku, Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani dalam Proses Usaha Pertanian / Perkebunan.

- c. Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian dengan hasil pelaksanaan, Meningkatnya jumlah populasi ternak, Potensi wilayah pengembangan peternakan, Jumlah Produk Peternakan dipasarkan.

Permasalahan yang di hadapi:

- Belum tersedianya data populasi ternak yang akurat di keluraham/desa;
- Belum ada satu lokasi pengembangan usaha peternakan;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pengembangan peternakan.

- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan dengan dengan menyediakan Prasarana Perikanan yang dibutuhkan oleh Pembudidaya Ikan, Menekan biaya Pakan Ikan, Peningkatan Jumlah Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya.

Permasalahan yang di hadapi:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian Sarana Perikanan;
 - Perlunya waktu dalam mengubah kebiasaan Pembudidaya Ikan Tradisional ke Pembudidaya Ikan Modern;
 - Perlunya waktu dalam merubah Perilaku, Pengetahuan , Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani Pembudidaya Ikan dalam Proses Usaha Perikanan Budidaya.
- Peningkatan kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena terbatasnya sumber Daya air di Kota Kotamobagu maka kemampuan dan kemandirian UPTD air minum dalam mengakses dan menerapkan teknologi menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, diharapkan Sumber daya air minum UPTD air minum kota kotamobagu dapat diberdayakan secara mandiri.

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan hasil pelaksanaan Menjamin ketersediaan air dimusim kemarau, Memasok kebutuhan air pada tanaman, Mengurangi kerusakan tanah.

Permasalahan yang di hadapi:

- Perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap ketersediaan dan kebutuhan air;
 - Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah dengan hasil pelaksanaan tersedianya sistem penyediaan air limbah terpusat skala kota.
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum Di Daerah Kab/Kota dengan hasil pelaksanaan meningkatkan kapasitas produksi atau debit sumber air sesuai debit maksimum sumber air.

Permasalahan yang di hadapi:

- Menurunnya kuantitas air baku;
 - Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan.
- Peningkatan Kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Sebagai upaya penyiapan tenaga yang siap kerja, Dinas Koperasi,UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan pelatihan yang berbasis keterampilan seperti pelatihan mengemudi, satpam serta perhotelan. Dari pelatihan tersebut selanjutnya disalurkan kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota kotamobagu. Di samping itu, berkaitan dengan keamanan kerja, dijalin pula kerjasama hubungan industrial dengan perusahaan yang ada di Kota kotamobagu guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan hasil pelaksanaan Peningkatan ketrampilan tenaga kerja untuk menunjang kinerja, Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja.

Permasalahan yang di hadapi:

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- b. Program Hubungan Industrial dengan hasil pelaksanaan Peningkatan perlindungan hukum pekerja buruh, Meningkatnya kepesertaan pada bpjs ketenagakerjaan, Terwujudnya perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja buruh.

Permasalahan yang di hadapi:

- Masih terdapat perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang disebabkan masalah upah.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Industri dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi IKM dengan adanya bantuan mesin dan peralatan sebagai penunjang, Tersedianya peralatan mesin yang digunakan oleh para pelaku IKM yang sesuai kebutuhan, kemasan berkualitas, efisiensi waktu, Terwujudnya IKM yang potensial dan berbasis teknologi, Berkembangnya sumber daya manusia IKM melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan IKM, Terwujudnya standarisasi mutu produk sehingga mempunyai daya saing dengan produk daerah lainnya, Meningkatnya kualitas produk yang berbasis kearifan lokal, Terjaganya produk berbasis kearifan lokal.
- Peningkatan Kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat Kota Kotamobagu cukup aktif dalam partisipasi pembangunan, dimulai dari proses perencanaan program dan kegiatan melalui musrenbang, pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang bersumber dari anggaran kewilayahan serta memantau kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah. Dalam mendukung pembangunan berbasis kampung, masyarakat juga ikut memberikan swadaya baik berupa tenaga, jamuan maupun materiil. Di samping itu, hal yang terpenting adalah menjaga

apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah agar tidak terkotori oleh upaya vandalisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya pembayaran jaminan sosial BPJS kesehatan bagi perangkat desa sebanyak 182 orang, Pelaksanaan evaluasi Rapbdes/apbdes setiap tahun anggaran, dilaksanakannya program/kegiatan terkait dengan biaya apbdes, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, Dilaksanakannya penilaian lomba desa dan kelurahan di 33 desa dan kelurahan;
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan hasil pelaksanaan Peningkatan keterampilan perempuan di desa dan kelurahan, Dilaksanakannya kegiatan 10 program pokok PKK, Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa.

Permasalahan:

- Dalam Kondisi Pandemi Covid 19, menyebabkan kurang maksimalnya peran serta desa dan kelurahan dalam kegiatan 10 program pokok PKK karena adanya PPKM.
 - Peningkatan Kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemeliharaan sarana prasarana pasar di kota kotamobagu, penyediaan fasilitas tempat sampah, serta kebijakan pembatasan pembuangan sampah warga di TPS, pasar memudahkan pembersihan dan pengelolaan sampah pasar, sehingga standar pasar di kota kotamobagu sehat dapat terpenuhi.
- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Koperasi sehingga peserta pelatihan mampu mengatasi berbagai

persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan perkoperasian yang baik, mampu mengikuti perkembangan zaman dibidang teknologi informatika guna peningkatan level Koperasi menuju koperasi sehat.

Permasalahan:

- Kondisi Kepengurusan Koperasi banyak yang stagnan, tidak aktif, bahkan tidak ditemukan sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
- b. Program pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM dan Produk UMKM dalam rangka pengembangan produksi, digitalisasi UMKM, peningkatan pendapatan sehingga mampu bersaing di pasaran, Peningkatan Modal Pelaku Usaha Mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dimasa pandemi covid 19.

Permasalahan:

- Pengetahuan dan keterampilan yang sangat dinamis dan berkembang terus mengakibatkan terbatasnya Pengetahuan, ketrampilan dari pelaku Usaha Mikro;
- Kondisi ekonomi yang lesu dimasa pandemi, menyebabkan menurunnya omzet penjualan.
- c. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan hasil pelaksanaan, Ketersediaan Stok Kebutuhan Bahan Pokok di pasaran lebih khusus dalam rangka pelaksanaan hari Besar Keagamaan, Keterjangkauan Harga Kebutuhan Bahan Pokok di pasaran lebih khusus dalam rangka pelaksanaan hari Besar Keagamaan.
- Peningkatan Kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sala satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan adalah melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan berupa kelompok pemanfaatan lahan untuk menjadikan lahan untuk penanaman bahan pangan, dalam rangka pemanfaatan SDM untuk mengelola tanaman pangan di wilaya perkarangan dengan kelembagaan kelompok yang di bentuk pada masing-masing wilaya.

- a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan dengan hasil pelaksanaan Sudah adanya program peningkatan produksi pangan, Tersedianya lumbung pangan, Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan hasil pelaksanaan, Sudah adanya program peningkatan produksi pangan, Pelatihan yang terintegritas analisis harga pangan pokok, Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan, Tersedianya potensi lahan untuk produksi keragaman pangan lokal.

Permasalahan:

- Ketersediaan pangan masih dipengaruhi produk impor;
 - Stabilisasi harga pangan pokok belum optimal;
 - Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum optimal;
 - Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - Masih kurangnya petugas enumerator harga pangan.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan hasil pelaksanaan Pelatihan yang terintegritas sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan.
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan hasil pelaksanaan Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- Peningkatan Kesejahteraan dari sektor Perangkat Daerah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota kotamobagu mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, dengan menjadi terbaik ke II kabupaten/kota se sulut untuk kategori capain KB pasca persalinan/pasca keguguran.

- a. Program Pengendalian Penduduk tersedianya Dokumen Grand Desain Kependudukan Yang memuat 5 Pilar Pembangunan Kependudukan yaitu :
1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 4. Pembangunan Keluarga;
 5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Tujuan Disusunnya GDPK adalah :

1. Mewujudkan Kualitas penduduk Dalam Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya Yang Seimbang Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Didasarkan Pada Wawasan Kependudukan dan Lingkungan;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk Melalui Penanggulangan Kemiskinan;
4. Mewujudkan Pengarahan Mobilitas Penduduk Secara Merata Antar Wilayah kecamatan;
5. Mewujudkan Keluarga Yang Berketahanan, Sejahtera, Maju, Mandiri dan Harmonis Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan Gender Serta Mampu Merencanakan Sumber Daya Keluarga;
6. Mewujudkan Tercapainya Demografi Melalui Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk;
7. Tercapainya Data dan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipercaya.

2. SASARAN MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

Tabel 3.2

Menurunnya Angka Kemiskinan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase penduduk miskin	Persen	5,91	Belum dirilis	Belum dirilis	5,88
Tahun 2020	Persen	5.92	5.42	91.55	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021					

Sumber Data Badan Pusat Statistik

- **Indikator Sasaran Persentase penduduk miskin**

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dikotamobagu yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha kerajinan, UMKM, pemberdayaan wirausaha muda.

Pada tahun 2020 berdasarkan data BPS, realisasi penduduk miskin dikota kotamobagu sebesar 5,42 dari yang ditargetkan sebesar 5,92 sehingga capaian kinerja tahun 2020 adalah 91,55%. Dan bernilai

Pada tahun 2021 berdasarkan data BPS, Belum dirilis penduduk miskin dikota kotamobagu.

- **Faktor Pendorong Menurunnya Angka Kemiskinan**

- Menurunnya Angka Kemiskinan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Kotamobagu dengan menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terhadap pendidikan dan kesehatan Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.
- a. Program Rehabilitasi Sosial dengan hasil pelaksanaan rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Penyediaan Permakanan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Pemeliharaan anak-anak terlantar, Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.

- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial hasil pelaksanaan adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tersedianya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan, tersedianya sumber daya manusia PNS dan PSKS, tersedianya sarana dan prasarana kerja, tersedianya dukungan dana dari APBD dan APBN, adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS. peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial maka untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dilakukan peningkatan akurasi dan kualitas data kesejahteraan sosial sebagai sumber data tunggal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan/pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan PMKS oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu juga dengan meningkatkan peranan PSKS. Yang dimaksud PSKS dalam hal ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. SASARAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tabel 3.3

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas, Sehat Dan Berwawasan Lingkungan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	Persen	77.00	65.00	85.00	82,00
Tahun 2020	Persen	75.00	73.18	98.00	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	87.13	59.28	68.03	87,27
Tahun 2020	Angka	87.06	66.90	76.84	
Persentase Kesesuaian Ruang	Persen	100	39.43	39.43	100,00
Tahun 2020	Persen	100	20.70	20.07	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				64.16	

Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Sehat dan Berkualitas dilakukan dengan 3 (tiga) indikator sasaran dimana rata-rata tingkat capaian kinerja tahun 2021 sebesar **64,16%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Proposi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio panjang jalan dalam kondisi baik terus menerus dilakukan untuk membuka akses percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kerawanan lalu lintas.

Pada tahun 2020, panjang jalan keseluruhan 267,99 Km, dengan kondisi baik sepanjang 195,54 dengan kecepatan rata-rata lebih dari 40 Km/Jam. Dengan data tersebut, realisasi kinerja sebesar 73,28%, sedangkan pada Tahun 2021, panjang jalan keseluruhan 267,752 Km, berdasarkan Peraturan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu no.129 Tahun 2017 sedangkan realisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu untuk berupaya meningkatkan kondisi jalan pada Tahun 2021 mencapai 64,45% dengan kondisi jalan Baik 172,56 Km pada Tahun 2021.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar **65,00%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **82%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **79.26%**.

- **Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks kualitas lingkungan hidup kotamobagu tahun 2021 terdiri atas 3 indikator yaitu :

Indeks kualitas air =44.67

Indeks kualitas udara =91.25

Indeks kualitas tutupan lahan =59.28

Sehingga indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 sebesar **59.28**. pada tahun 2020 pada tahun kedua RPJMD target **indeks kualitas lingkungan hidup** sebesar **87.06** dengan realisasi kinerja **66.90** maka capaian kinerja di tahun 2020 sebesar **76.84%**.

pada tahun 2021 pada tahun ketiga RPJMD setara perubahan target **indeks kualitas lingkungan hidup** sebesar **87.13** dengan realisasi kinerja **59.28** maka capaian kinerja di tahun 2021 sebesar **68.03%**.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar **59.28%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **87.27%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **67.92%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Ruang**

Pada tahun 2021 luas kawasan RTH di Kota Kotamobagu masih sama dengan luas kawasan RTH tahun 2020. Luas kawasan RTH sebagaimana pada tabel berikut:

No	Nama RTH	Luas (ha)	Tempat
1	RTH Taman	34.40	Setiap desa/kelurahan
2	RTH Taman Kota	20	Kel. Kotobangon, kel. Mogolaing, Kel. Kotamobagu, Kelurahan Biga, Kelr. Motoboi kecil, dan desa moyag
3	RTH Hutan Kota	677	Kel. Mongkonai
4	RTH Kebun Raya	300	Desa bungko, desa sia, desa moyag
5	RTH Taman Keamatan	11.10	Tersebar di 4 kecamatan
6	RTH Taman resting area	10.10	Kel.mongkonai,desa moyag todulan,desa bilalang II
7	RTH kawasan Agrowisata	555.00	Desa poyowa besar I, poyowa besar II, pontodon,sea,moyag
8	RTH median jalan	4.60	Kec,Kotamobagu barat, kec.Kotamobagu timur, kec.Kotamobagu selatan
9	RTH Jalur hijau pada sisi jalan	288.40	Tersebar diseluruh wilayah Kota
10	RTH jalur hijau jalan pejalan kaki	13.50	Kel.Kotamobagu,gogagoma n,biga,desa poyowa besar 1, poyowa besar II, moyag todulan
11	RTH sempadan jalan	107.20	Kel.Kotamobagu,gogagoma n,biga, desa poyowa besar I, poyowa besar II, moyag todulan
12	RTH sempadan sungai	100.60	Terbesar disekitar sungai
13	RTH kawasan resapan air	514.00	Desa sea, pontodon,moyag todulan,bilalang I, bilalang II, kel,molinow
14	RTH pemakaman umum	9.00	Tersebar disetiap kecamatan

No	Nama RTH	Luas (ha)	Tempat
15	RTH lapangan olah raga	51.49	Tersebar disetiap kecamatan
Total Luas RTH Publik		2697,79	

Pada tahun 2020 areal Ruang Terbuka Hijau sebesar 2.697,79 ha dari total luas wilayah 6800 ha. Berdasarkan data tersebut maka jumlah minimal kawasan terbuka hijau sebesar 25% melebihi sebesar 39,67% atau sebesar 158,68%. Dengan target indikator kinerja tahun 2020 sebesar **100%**, dengan relaisasi 20.70 maka tingkat capaian indikator kinerja tahun 2020 adalah **20.70%**.

Pada tahun 2021 areal kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 45 ha, kawasan perumahan sebesar 3.122 ha, kawasan perkantoran sebesar 46 ha, kawasan transportasi sebesar 3 ha, kawasan prawisata sebesar 25 ha, kawasan perdagangan dan jasa sebesar 692 ha dari total luas wilayah 3.934 ha. Dengan target indikator kinerja tahun 2021 sebesar **100%** dengan realisasi **39.43%** dengan target capaian kinerja **39.43%**

Realiasi kinerja tahun 2021 sebesar **39.43%** dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar **100%** maka tingkat capaian realisasi kinerja terhadap tahun akhir RPJMD sebesar **39.43%**.

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas, Sehat Dan Berwawasan Lingkungan**
- Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang Berkulaitas, Sehat dan Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu telah banyak melakukan kegiatan untuk pembangunan Infrastruktur kota kotamobagu melalui bina marga melaksanakan pemeliharaan rutin berkala jalan rehap Desa/Kelurahan dan Cipta Karya melaksanakan perawatan berkala jaringan pipa, serta melaksanakan Survei Lokasi untuk IPA.
- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase hasil pelaksanaan untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu wilayah, jalan, dan lahan, sehingga lahan dapat kembali difungsikan secara optimal serta membebaskan suatu wilayah,

terutama wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk yang banyak, dari genangan air, erosi dan banjir.

Permasalahan:

- Kurangnya kesadaran masyarakat/partisipasi masyarakat yang rendah, tidak membuang sampah pada tempatnya, malah membuang sampah ke selokan pada saluran drainase sehingga mengakibatkan jalan air tidak lancar;
 - Sistem drainase yang sudah ada kurang mampu menampung kapasitas debit air hujan padahal lahan untuk pengembangan saluran drainase sudah tidak ada.
- b. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan hasil pelaksanaan meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
- c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang hasil pelaksanaan memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas, meningkatnya kualitas RTR.
- Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Sehat dan Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan kerja bakti dalam rangka memperingati hari bersih-bersih dunia atau yang dinamakan world clean-up day (wcd) di kotamobagu termasuk pasar, daerah sekitar tempat tinggal masing-masing maka dengan itu Dinas Lingkungan Hidup selalu memantau dengan perkembangan kebersihan lingkungan Kota Kotamobagu.
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil pelaksanaan perumusan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata

Ruang serta Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD maka dengan itu Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD tersusun dengan baik.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan hasil pelaksanaan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup maka koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut seraf melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan hasil pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan hasil pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia dan Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Program Pengelolaan Persampahan dengan hasil pelaksanaan Pengolahan Sampah serta Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA kota kotamobagu

maka Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan di TPA/TPST/SPA kota kotamobagu terlaksana dengan baik.

- Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Sehat dan Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan hasil pelaksanaan meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan serta Pemeliharaan Fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota untuk mengatasi permasalahan kemacetan di jalan kota kotamobagu.

4. SASARAN MENINGKATNYA PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN PERKOTAAN

TABEL 3.4

Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman Dan Perkotaan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Persen	28.00	77.56	277	32,00
Tahun 2020	Persen	26.00	70.11	269	
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	Persen	94.26	41.76	44.30	100,00
Tahun 2020	Persen	91.32	35.37	38.73	
Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,78	99.68	101	100,00
Tahun 2020	Persen	98.06	98.71	99.34	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				354	

Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kotamobagu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya penataan lingkungan pemukiman dan perkotaan dilakukan dengan 3 (tiga) indikator sasaran dimana rata-rata tingkat capaian kinerja tahun 2021 sebesar **354%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD kota kotamobagu dimana **Rumah Tangga Berakses Air Bersih** Dengan target tahun kedua 2020 adalah 26.00 dengan realisasi 70.11 maka tingkat capaian kinerja adalah **269.65%**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Rumah Tangga Berakses Air Bersih** Dengan target tahun ketiga 2021 setetela perubahan RPJMD adalah 28,00% dengan realisasi 77,56% maka tingkat capaian kinerja adalah **277%**.

Realiasi kinerja tahun 2021 sebesar **77,56%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **32%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **242%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD kota kotamobagu dimana **Rumah Tinggal Ber Sanitasi** dengan target tahun kedua 2020 adalah 91.32% dengan realisasi 35.37 maka tingkat capaian kinerja sebesar **38.37%**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Rumah Tinggal Ber Sanitasi** Dengan target tahun ketiga RPJMD setela perubahan 2021 adalah 94.26% dengan realisasi 41.76% maka tingkat capaian kinerja sebesar **44.30%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **100%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **41.76%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Rumah layak huni**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD kota kotamobagu dimana **Rumah layak huni** dengan target tahun kedua 2020 adalah 98.06 dengan realisasi 98.71 maka tingkat capaian kinerja sebesar 99.96%

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Rumah layak huni** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 98.06% dengan realisasi 99.68% maka tingkat capaian kinerja sebesar **101%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **100%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **101%**.

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman Dan Perkotaan**

- Peningkatan Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkantoran dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kotamobagu dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dengan ini memberikan kemudahan kepada

masyarakat kurang mampu di Kota Kotamobagu untuk membangun rumah melalui program (BSRS) dengan jumlah sebanyak 72 unit dan tersebar di empat kelurahan. Masing-masing yakni Kelurahan Kotobangon sebanyak 21 penerima, Gogagoman 19 penerima, Kobo Besar 17 penerima, dan Kelurahan Kotamobagu 15 penerima.

- a. Program Kawasan Permukiman dengan hasil pelaksanaan meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menyediakan Rumah Layak Huni serta Penurunan tingkat kekumuhan kawasan permukiman untuk menunjang lingkungan yang sehat dan mengurangi jumlah rumah yang berpotensi rusak/roboh ketika terjadi Bencana Alam (Gempa).

Permasalahan:

- Belum ada Kerjasama Pemerintah Kota dengan Swasta dalam pencegahan dan penanganan permukiman kumuh;
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh;
 - Kesanggupan masyarakat calon penerima bantuan untuk berswadaya, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Perubahan Status dan Kondisi Penerima Bantuan;
- b. Program Pengembangan Perumahan dengan hasil pelaksanaan Sumber Daya Manusia yang handal dan berperanaktif dalam manajemen bencana serta kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen Bencana melalui program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan hasil pelaksanaan adanya Peraturan dan Pedoman tentang mekanisme atau tata cara Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Pengembang dalam rangka penanganan PSU Perumahan dan kerjasama dan kolaborasi antara

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk penanganan PSU Perumahan.

Permasalahan:

- Keterbatasan anggaran dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Pengembang/Developer tidak mampu menyelesaikan PSU perumahan sesuai dengan Perencanaan/site plan yang diajukan pada persetujuan siteplan;

5. SASARAN MENINGKATNYA DESTINASI PARIWISATA DAERAH

TABEL 3.5
Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Presentase Budaya yang dilestarikan	Persen	85	13.33	14.97	100
Tahun 2020	Persen	75	50	66.66	
Presentase Destinasi yang dikembangkan	Persen	60	40	66	100
Tahun 2020	Persen	40	33	82.5	
Rata-Rata Capain Kinerja Tahun 2021				40.48	

- **Indikator Sasaran Presentase Budaya yang dilestarikan**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana Budaya yang dilestarikan Dengan target tahun kedua 2020 adalah 75 dengan realisasi 50 maka tingkat capaian kinerja sebesar 66,66 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **66.66%**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana Budaya yang dilestarikan Dengan target tahun ketiga 2021 adalah **85%** dengan realisasi **13.33%** maka tingkat

capaian kinerja sebesar **14.97%** maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **14.97%**.

- **Indikator Sasaran Presentase Destinasi yang dikembangkan**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD kota kotamobagu dimana Destinasi yang dikembangkan dengan target tahun kedua 2020 adalah 40 dengan realisasi 33 maka tingkat capaian kinerja sebesar 82.5 di bandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **82.5%**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan kota kotamobagu dimana Destinasi yang dikembangkan dengan target tahun ketiga tahun 2021 adalah 60% dengan realisasi 40% maka tingkat capaian kinerja sebesar 66% di bandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **66%**.

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestarian Budaya Daerah.**

- Peningkatan Destinasi Pariwisata dan Kelastarian Budaya Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dengan menyusun Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebab persoalan budaya sudah melekat dan menjadi pakaian hidup serta sebagai harga diri bagi seseorang. Jamak terjadi bagi kita pemahaman tentang pentingnya kebudayaan terkadang hanya dalam bentuk ucapan-pemanis saja-tidak dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai fondasi untuk melaksanakan kegiatan atau program. Sebuah dokumen yang bisa dipraktikkan atau dilaksanakan dikemudian hari. Sebuah dokumen yang memuat tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah landasasan untuk cerminan Kota Kotamobagu untuk menarik wisatawan.
- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan hasil pelaksanaan muatan Lokal menjadi salah satu mata pelajaran pada pendidikan formal di SD dan SMP serta adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek kepada Komunitas/sanggar seni budaya untuk mendukung peletarian seni budaya di daerah dan sistem

pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan secara online.

- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan hasil pelaksanaan banyak Benda/objek peninggalan bersejarah yang diduga cagar budaya yang dimiliki namun tidak terkelola dengan baik.

Permasalahan:

- Tidak adanya Tenaga Ahli terutama tenaga ahli Cagar Budaya, tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bersertifikasi baik di tingkat provinsi maupun di daerah, sehingga berdampak pada terhambatnya upaya penetapan dan pemeringkatan Cagar budaya serta pemanfaatan cagar budaya
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas daya Tarik Wisata pada Destinasi Wisata, serta peningkatan daya Tarik Wisata serta peningkatan amenities pada destinasi wisata serta adanya dukungan Anggaran dari kementerian RI untuk peningkatan SDM pengelola destinasi pariwisata dan Pelaksanaan Promosi potensi dan daya Tarik Wisata melalui media sosialisasi sehingga penyebarluasan informasi pariwisata lebih luas dan cepat.

Permasalahan:

- Kurangnya SDM Pengelola destinasi Wisata yang terlatih serta pemasaran dan Promosi Pariwisata yang belum maksimal sehingga berdampak pada kurangnya tingkat kunjungan Wisatawan.

6. SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

TABEL 3.6

Meningkatnya Investasi Daerah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Nilai Investasi	Rupiah	1,400,000,000,000	304.348.070.447.00	21.73	1,400,000,000,000
Tahun 2020	Rupiah	1,400,000,000,000	100.116.917.750.00	7.15	

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Kotamobagu antara lain dengan mempermudah pengurusan izin investasi dan ketepatan waktu pengurusan izin investasi dimana berdasarkan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lama waktu penerbitan izin investasi yaitu 15 menit.

Pencapaian sasaran meningkatnya investasi daerah tahun 2020 dimana dari target yang ditetapkan pada Rp. 1.400.000.000.000 dengan realisasi Rp. 100,116,917,750 maka capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **7,15%** dan bernilai Kurang

Pencapaian sasaran meningkatnya investasi daerah tahun 2021 dari target yang ditetapkan pada Rp.1.400.000.000.000 dengan realisasi Rp. 304.348.070.447.00 maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar **21.73 %**

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar Rp. **Rp. 304.348.070.447.00** dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar **Rp. 1.400.000.000.000** maka capaian kinerja tahun 2020 terhadap target tahun akhir RPJMD yaitu sebesar **21.73%.**

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Investasi Daerah**
- Peningkatan Investasi Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Kotamobagu yakni melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam penginputan by sistem terkait dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko dengan diselenggarakan secara Online Single Submission Risk Based

Approach (OSS-RBA), adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021.

- a. Program Promosi penanaman modal dengan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya media sosial dan media masa sebagai wadah untuk mempromosikan Potensi Investasi Daerah serta adanya Kegiatan Pameran Investasi Daerah yang dilaksanakan di Provinsi dan Luar Provinsi maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kotamobagu.
- b. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan hasil pelaksanaan tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta terjalinnya Kerjasama yang baik dengan Pelaku usaha untuk meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan tersedianya klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Permasalahan:

- Kurangnya transparansi Pelaku usaha dalam kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara online;
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan dilapangan;
 - Kurangnya Personil dalam melakukan kegiatan dilapangan.
- c. Program Pelayanan penanaman modal dengan hasil pelaksanaan tersedianya Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya jumlah usaha yang ada di kota kotamobagu Tersedianya Sistim Perizinan berbasis Elektronik melalui dan dipermuda dengan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan

Aplikasi Sicantik Cloud dan tersedianya Klinik Online Single Submission (OSS) maka peningkatan Pengaduan dan permintaan data Informasi dari masyarakat terlaksana dengan baik.

Permasalahan:

- Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pendaftaran/pengisian pada aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA);
- Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik;
- Kurangnya sarana prasarana dalam kegiatan pendukung pelayanan secara mobile;
- Kurangnya SDM di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Layanan Pelaporan;
- Belum adanya Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mendukung pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- Belum tersedianya ruang pengaduan dan informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat;

7. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF, AKUNTABEL DAN BERBASIS E-GOVERNMENT

TABEL 3.7

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai	80	BLM dirilis	BLM dirilis	80.00
Tahun 2020	Nilai	75	66.83	89	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	100	100
Tahun 2020	Opini BPK	WTP	WTP	100	100
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	90.00	BLM dirilis	BLM dirilis	95.00
Tahun 2020	Nilai	90.00	BLM dirilis	BLM dirilis	
Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	Persen	100	65.25	65.25	100.00
Tahun 2020	Persen	64	50	78.56	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				BLM dirilis	

- **Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja tahun 2021 Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan upaya-upaya perbaikan sistem kinerja secara terkoordinasi sebagai berikut:

- Melengkapi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sasaran
- Melakukan perubahan RPJMD di ahir tahun 2021 dengan penyesuaian kembali sasaran dan Indikator RPJMD yang di tetapkan pada awal tahun 2022
- Melakukan *review* dokumen perencanaan baik dari substansi sasaran dan indikatornya
- Menyusun IKU secara formal sebagaimana dimaksud dalam PermenPAN nomor 9 Tahun 2007 dan memanfaatkannya dalam dokumen Perencanaan termasuk dokumen PK.
- Mereview Indikator Kinerja Utama.
- Evaluasi pencapaian target per semester,
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Berbagai program kegiatan tersebut diyakini akan memberikan peningkatan signifikan realisasi kinerja tahun 2021 namun dengan bencana pandemi Covid 19 belum dapat terealisasi dengan baik.

Di tahun 2020 target nilai 75 dengan realisasi kinerja 66.83 dengan capain kinerja 89%. Pada tahun 2021 target nilai 80 dimana realisasi Belum dirilis di karenaka dengan bencana internasional pandemi Covid 19.

- **Indikator Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)**

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah, dilakukan kualifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

- Opini dengan predikat "Tidak Wajar" (TW) diberi nilai 1
- Opini dengan predikat "Disclaimer" diberi nilai 2
- Opini dengan predikat "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) diberi nilai 3
- Opini dengan predikat "Wajar tanpa Pengecualian" (WTP) diberi nilai 4

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018, mendapatkan opini WTP dari yang ditargetkan WTP. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dimana 5 (lima) tahun berturut-turut (2016, 2017 dan 2018,2019,2020) berhasil mempertahankan opini dari BPK RI yaitu WTP.

Untuk tahun 2020 opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah tahun 2019 memperoleh predikat WTP atau benilai **Baik**.

Untuk tahun 2021 opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah tahun 2020 memperoleh predikat WTP atau benilai **Baik**.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mempertahankan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Kebijakan pimpinan dalam hal transparansi pengelolaan keuangan
- Pendampingan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagi SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu masih kurangnya jumlah tenaga Fungsional Umum atau pelaksana di setiap SKPD yang menangani pengelolaan keuangan dan Pengelola Aset.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana dibidang teknis, pengelolaan keuangan, administrasi dan tenaga auditor. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan secara rutin dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Secara internal Pemerintah

Kota Kotamobagu terus meningkatkan daya saing aparatur pelaksana dengan membangun iklim persaingan sehat baik melalui pemberian *reward* langsung bagi yang berprestasi seperti promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi kemudian pemberian motivasi melalui peningkatan penerimaan tunjangan kinerja secara bertahap melalui sistem dan mekanisme perhitungan pencapaian target kinerja secara personal. Kegiatan ini menjadikan aparatur pelaksana disetiap SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki kapasitas yang mampu menyelesaikan beban tugas yang padat sehingga realiasi kinerja yang ditargetkan di RPJMD dapat tercapai secara maksimal.

- **Indikator Sasaran Zona Kepatuhan Pelayanan Publik**

Penilaian kepatuhan pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun dengan ini Pemerintah kota kotamobagu selalu melakukan evaluasi internal untuk kualitas pelayanan publik maka dengan ini pemerintah kota kotamobagu serius dalam menyikapi kepatuhan pelayanan publik di sikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan. Terhadap hasil kepatuhan pelayanan publik maka dengan ini Pemerintah Kota Kotamobagu menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar Pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Kepatuhan Pelayanan Publik** Dengan target tahun kedua 90.00% dengan adanya bencana pandemi Covid 19 di Indonesia dengan itu belum bisah dirilis nilai Tahun 2020 s/d 2021

- **Indikator Sasaran Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi**

Pada tahun 2020 merupaka tahun kedua RPJMD kota kotamobagu dimana **Area Publik ber akses Teknologi Informasi** dengan target tahun kedua 63.64% dengan realisasi 50.49% maka tingkat capaian kinerja sebesar **78.56%** dengan kondisi Pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 100% dengan realisasi 65.25% maka tingkat capaian kinerja sebesar **65.25%** dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **100%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **65.25%**.

- **Faktor – Faktor Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government.**

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan Sensus Penduduk Online (SPO) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan memberikan dukungan dalam bentuk melakukan integrasi data serta berbagai terobosan dan inovasi bagi pelayanan publik terus dikembangkan dan diperbaharui oleh Pemkot Kotamobagu salah satu produk ter update adalah aplikasi Kinalang yang digagas oleh Bidang SIKP, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu Kinalang merupakan terobosan baru dalam sistem pelayanan publik yang lebih komprehensif dan terpadu.
- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan hasil pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta arah diseminasi nasional untuk mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik serta partisipasi masyarakat dalam proses penyebarluasan informasi nasional seperti di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Misi Humas Pemerintah, membangun citra reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi, menyosialisasi kebijakan program pemerintah serta membangun kepercayaan publik seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

- b. Program Penyelenggaraan Statistis Sektoral Di lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi serta Pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas bandwidth untuk disalurkan ke OPD melalui penambahan besaran bandwidth dari ISP, Peningkatan kapasitas pusat data pemerintah daerah melalui peningkatan storage serta peningkatan kualitas transmisi intranet/internet melalui distribusi alat yang memenuhi standar kualitas serta penambahan jaringan berbasis FO dan Peningkatan penyelenggaraan e-government melalui peningkatan jumlah aplikasi, pembuatan sistem penghubung dan pembuatan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

Permasalahan:

- Belum idealnya jumlah ASN yang mampu menangani kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
- Peralatan jaringan di berbagai OPD masih belum memenuhi standar kualitas;
- Belum adanya Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan dalam pengembangan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu dengan peningkatan ASN ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijazah dan Pengembangan Kompetensi Aparatur maka dengan peningkatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu akan lebih memaksimalkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu.

- a. Program Kepegawaian Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Penyelesaian Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Pengadaan, Penempatan, Pemberhentian, Penghargaan dan urusan lainnya dibidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan OPD serta Peningkatan Mutu Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan Karir dengan memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ujian Dinas PNS serta pengendalian Disiplin kepada Aparatur Sipil Negara.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan hasil pelaksanaan Peningkatan efektivitas dan efisiensi Aparatur sesuai dengan Potensi dan Kompetensi melalui pengembangan kompetensi PNS sesuai dengan Tugas dan Fungsi baik klasikal maupun non klasikal dalam menentukan penempatan PNS sesuai dengan Pendidikan / Pelatihan.

Permasalahan:

- Indeks Profesionalitas ASN dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Kotamobagu masih Rendah.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan pemeriksaan kas dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Program – program yang telah inspektorat siapkan diantaranya, pemeriksaan kas dari semua perangkat daerah, menyambut turunnya tim audit Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan pendampingan dalam penyalahgunaan anggaran, wewenang, investigasi, dan pencegahan korupsi dan adanya

kerjasama dalam upaya mengurangi potensi hal-hal yang dinilai berisiko dan rawan dikorupsi. "Hal ini untuk mengawasi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan korupsi pada setiap program kegiatan.

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan hasil pelaksanaan meningkatnya kapabilitas APIP melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan (Diklat, Bimtek, CC, IHT, Webinar) dan meningkatnya kematangan/ maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seras terlaksananya sebagian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tanpa di dukung anggaran yang memadai meningkatnya Respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian TLRHP Inspektorat Daerah Kotamobagu, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK RI, Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat oleh APIP
- Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan hasil pelaksanaan meningkatnya kematangan/ maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terlaksananya sebagian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tanpa di dukung anggaran yang memadai serta meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara APIP dan APH meningkatnya kesadaran pejabat negara dalam pelaporan LHKPN dan Gratifikasi.

Permasalahan :

- Belum tercapainya anggaran Mandatory Spending untuk APIP sebesar 1% dari APBD sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Jumlah dan Kompetensi APIP belum mencapai standar waktu pelaksanaan capaian diklat sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;
- Jumlah dan Kompetensi APIP belum mencapai standar sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;
- Belum tersusun / termutakhir kebijakan manajemen resiko, Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko Pemerintah Daerah dan OPD;
- Kurangnya dukungan pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam Internal Audit Charter (IAC);

- Banyaknya Tugas Tambah Pengawasan yang dilaksanakan yang tidak diatur dalam PKPT;
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum terlaksana secara keseluruhan.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan membawahi 3 kelurahan dan 6 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Selatan dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan peningkatan kualitas dan kinerja Perangkat kelurahan dalam hal pelayanan Masyarakat dan tersediannya insentif perangkat kelurahan serta sebagai acuan dalam proses perencanaan pada tingkat daerah, wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan, forum musyawarah koordinasi antara pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan OPD terkait.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan peningkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, untuk percepatan peningkatan kekebalan tubuh dari virus Covid – 19 maka dilakukan Vaksinasi pada masyarakat dan memudahkan masyarakat melakukan vaksinasi dengan menyediakan gerai vaksin di wilayah kelurahan serta mencegah penyebaran Virus Covid-19, Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan hasil pelaksanaan Peningkatan prestasi Siswa/Siswi di bidang keagamaan serta meningkatkan Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar di bidang agama (pegawai Syar'I dan Petugas Agama) dan wadah penyaluran kreatifitas Siswa/Siswi di Bidang Keagamaan.

Permasalahan:

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Barat dengan membawahi 6 kelurahan dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Barat dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan terlaksananya proses pelayanan publik ditingkatkan paling bawah serta Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat dan Keinginan masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan ketersediaan vaksin yang mencukupi, adanya tenaga vaksinator yang dipersiapkan dengan matang dan kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Timur dengan membawahi 6 kelurahan dan 4 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Timur dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan Kesadaran dan kemauan masyarakat serta Kemampuan dan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi dan bertukar gagasan dengan orang lain dan tingkat pendidikan warga.

- b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk di vaksin dan banyaknya pos-pos pelayanan vaksinasi di desa dan kelurahan.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Utara dengan membawahi 3 kelurahan dan 5 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Utara dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
- a. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan peningkatan pelaksanaan PPKM, pemerintah juga menggiatkan pelaksanaan percepatan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus corona agar dapat kembali memulihkan situasi dan kondisi khususnya di Kecamatan Kotamobagu Utara. Ketersediaan vaksin yang terjaga dan kesiapan tenaga medis khususnya vaksinator yang terlatih dan ramah menjadi salah satu faktor penunjang untuk merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi demi segera terputusnya mata rantai penyebaran virus. Pemerintah juga menghimbau agar semua masyarakat menaati protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan Sesuai dengan Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebuah perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan merangsang keikutsertaan elemen masyarakat untuk hadir sehingga

pemerintah dapat mengumpulkan aspirasi – aspirasi dari masyarakat guna perencanaan pembangunan khususnya di kecamatan Kotamobagu Utara. Disamping itu dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk berintegrasi, berdiskusi dan bertukar pendapat dengan santun dan beretika sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan lomba inovasi daerah yang terbuka untuk semua kalangan dengan menyampaikan kegiatan IGA bertujuan untuk memacu perangkat daerah dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas maka pelaksanaan melakukan akselerasi kebijakan sehingga tujuan pembangunan daerah yakni menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing bisa tercapai.
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya koordinasi dengan perangkat daerah dan stekholder untuk menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia.

Permasalahan:

- Keterlambatan update data pendukung yang menyebabkan lambatnya penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan.

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung infrastruktur dan kewilayahan dan adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung Sumber Daya Alam.

Permasalahan:

Keterlambatan update data pendukung yang menyebabkan lambatnya penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- d. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah harus selaraskan dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan nasional.

Permasalahan:

Dokumen Perencanaan yang belum selaras dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat nasional.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Disdukcapil Kotamobagu merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Kotamobagu serta fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP-elektronik atau e-KTP. Untuk warga yang akan mengurus dokumen pendudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan

berkas. Informasi cara, syarat dan biaya pengurusan (jika ada) dapat diperoleh melalui call center Dukcapil atau halo Dukcapil, Anda juga bisa mengakses website resmi Dukcapil untuk informasi umum. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan langsung dapat datang langsung ke kantor Dukcapil terdekat pada hari dan jam kerja / jam buka.

- a. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan hasil pelaksanaan meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Perkawinan serta dokumen pencatatan sipil lainnya dan terlaksananya inovasi pelayanan SIMPELKAN CEPATU, Doyan Ubi menjadi pendorong dalam memenuhi target nasional dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil dan terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil serta Pemahaman tentang penggunaan dokumen kependudukan yang sebelumnya menggunakan blangko dari pusat ke kertas HVS 80 gram;

Permasalahan:

- Masih adanya masyarakat yang buta aksara, sehingga tidak semua masyarakat menerima dengan cepat pesan yang disampaikan lewat spanduk di Desa/Kelurahan;
 - Kondisi Pandemic Covid-19.
- b. Program Pendaftaran Penduduk dengan hasil pelaksanaan meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan pelayanan jemput bola ke Desa/Kelurahan serta kepemilikan dokumen kependudukan yang terus meningkat Penataan Pendaftaran Penduduk dapat terlaksana dengan pengadaan Ribbon dan Film untuk pencetakan KTP-EI dan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Pemerintah dan stakeholder terkait, adanya

Kemitraan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, sarana dan Prasarana yang memadai.

- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan hasil pelaksanaan adanya Informasi dan Data Kependudukan yang ter-update dan berkelanjutan.
 - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif, Akuntabel Dan Berbasis E-Government Daerah dari sektor Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu dengan membawahi 7 Bagian serta dengan di masing-masing Bagian melaksanakan urusan teknis dengan pelaksanaan urusan unsur staf pimpinan.
 - a. Pada Bagian Organisasi Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Penyusunan LKIP serta Reformasi Birokrasi dengan adanya Bimtek maka dapat memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LKIP dan Reformasi Birokrasi serta terfasilitasi Perangkat Daerah dan Peningkatan penyusunan Anjab dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-Undang yang berlaku, Peningkatan fasilitasi pelayanan publik perangkat Daerah serta penyusunan proses peta bisnis dan terlaksananya ketatalaksana pemerintah kota kotamobagu.
 - b. Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan MoU, dengan adanya Bimtek serta fasilitasi penyusunan laporan maka dapat memberikan pedoman serta pemahaman kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, LKPJ, SPM dan Dokumen MoU/Kerjasama Daerah dan Peningkatan kegiatan fasilitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memperbaiki administrasi pemerintahan dalam hal ini Laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (LPPKel/LPPDes) serta Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas baik Batas Daerah maupun Batas Desa/Kelurahan di Kota Kotamobagu agar tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku, Peningkatan fungsi pelayanan/fasilitasi survey pembakuan nama rupabumi yang bertujuan

agar seluruh unsur rupabumi di Kota Kotamobagu (unsur alami/buatan) dapat dibakukan dan dimasukkan ke dalam buku gazetir nasional pusat (Kementerian Dalam Negeri/Badan Informasi Geospasial).

- c. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kotamobagu dengan Program Perekonmian dan Pembangunan dengan hasil pelaksanaan Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 3 Variabel Pada Domain Proses untuk Kematangan UKPBJ dan Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 1 Variabel Pada Domain Sistem Informasi untuk Kematangan UKPBJ serta Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 3 Variabel pada Domain Kelembagaan dan Domain SDM untuk Kematangan UKPBJ.
- d. Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- e. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dengan diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi para Rohaniwan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan untuk Siswa dan Mahasiswa yang tidak mampu serta untuk Menunjang Program kegiatan dan Tugas Organisasi yang mendapatkan Bantuan Hibah Uang.
- f. Pada Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan produk Hukum Daerah dan peningkatan fasilitasi pelaksanaan RANHAM serta peningkatan penanganan perkara pemerintahan Daerah dan Bantuan Hukum Bagian Masyarakat Miskin, Peningkatan publikasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

8. SASARAN MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

TABEL 3.8

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Presentase Peningkatan PAD	Persen	10	30.83	308	50,00
Tahun 2020	Persen	10	0.11	1.1	

Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk tahun 2019 yang merupakan RPJMD Baru, Dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar **10%** dengan realisasi kinerja sebesar **0,23%** maka tingkat capaian kinerja sebesar **2,30%** atau bernilai **Kurang**, formula yang digunakan yaitu $(\text{Jumlah PAD (N)} - \text{Jumlah PAD (N-1)} / \text{Jumlah PAD tahun (N-1)} \times 100)$.

Untuk tahun 2020 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 0,11 maka tingkat capain kinerja sebesar 1,1 atau bernilai **kurang**.

Untuk tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD setela perubahan dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 30.83 maka tingkat capain kinerja sebesar 308%.

Hambatan dalam pencapaian target PAD yaitu pada penerimaan PAD sector pajak bumi dan bangunan (PBB) dimana sujumlah objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit melakukan penarikan pajak. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintesifkan penarikan PBB melalui perangkat desa dan kelurahan.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 30.83% dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 50% maka tingkat capain kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD sebesar 61.66%

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**

- Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah dari sektor Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dengan Penghargaan karena berhasil pertahankan WTP itu, diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Penyerahan itu bertepatan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan daftar Transfer ke Daeran dan Dana Desa atau TKDD dari pemerintah pusat kepada daerah maka terkait dengan keberhasilan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Komitmen Pimpinan terhadap kepatuhan anggaran Perangkat Daerah dan tepat waktu serta Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengelolah keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah terhadap penatausahaan Keuangan daerah dan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan serta Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu dan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah selaku penanggungjawab akuntansi tentang standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas pelayanan, himbauan dan sosialisasi, evaluasi secara berjenjang dan periodik serta peningkatan fasilitas layanan pembayaran secara online dan mandiri dan konsistensi petugas pajak dalam penagihan dan pelaksanaan evaluasi pajak secara berkala, pelaksanaan pemutahiran dan pendataan untuk penambahan jumlah objek pajak.

- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasil pelaksanaan Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah.

Permasalahan:

Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memahami pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah.

9. SASARAN MENINGKATNYA KEAMANAN KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF

TABEL 3.9
Meningkatnya Keamanan Ketertiban, Dan Kehidupan Bermasyarakat Yang Kondusif

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase penegakan peraturan daerah	Persen	100	100	100	100.00
Tahun 2020	Persen	100	100	100	
Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100.00
Tahun 2020	Persen	100	100	100	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				100	

- **Indikator Sasaran Persentase penegakan peraturan daerah**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Penegakan Peraturan Daerah** Dengan target tahun kedua 2020 adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat capaian kinerja sebesar 100% di kala pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setelah perubahan Kota Kotamobagu dimana **penegakan peraturan daerah** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **100%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **100%**.

- **Indikator Sasaran Persentase Penanganan Konflik Sosial**

Ditahun tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 potensi konflik tidak ada dikarenakan Pemerintah Kota Kotamobagu selalu melakukan sosialisasi tentang keberagaman umat beragama. Disamping itu juga peran dari pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh Pemuda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) di Kotamobagu sangat tinggi dalam upaya mencegah/meminimalisir timbulnya potensi konflik.

Dengan target tahun 2021 sebesar 100%, Realisasi kinerja sebesar 100% maka tingkat capaian kinerja sebesar 100% di kala pandemi Covid 19. dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian kinerja sebesar 100%.

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Keamanan Ketertiban, Dan Kehidupan Bermasyarakat Yang Kondusif.**

- Peningkatan Kualitas Meningkatnya Keamanan Ketertiban, Dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif dari sektor Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu menggelar Sosialisasi Revolusi Mental dengan pelaksanaan kegiatan ini sudah menjadi agenda setiap tahun, dengan harapan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur yang berkenaan dengan revolusi mental serta selain itu sosialisasi ini juga merupakan bentuk penyegaran dan mengingatkan kembali kepada aparatur untuk tetap menjaga sikap dan mental sebagai panutan ditengah masyarakat dan disiplin yang dimaksud harus dimulai dari lingkungan keluarga, terutama bagi anak-anak, untuk menjadikan mental baik, maka pembinaan harus dilakukan sejak dini.

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya hasil pelaksanaan terciptanya Kerukunan Hidup antar Umat Beragama dan terciptanya Toleransi Kerukunan Umat Beragama.

Permasalahan:

Selama terbentuknya FKUB belum memiliki Kantor/Sekretariat

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan hasil pelaksanaan terverifikasinya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Keterwakilan Kursi di DPRD Kota Kotamobagu guna untuk Menunjang Kegiatan-kegiatan Politik di Kota Kotamobagu.
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan hasil pelaksanaan
 1. Kegiatan FKID Peningkatan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Konflik dengan Pendeteksian Dini segala kemungkinan ancaman dan hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas di daerah dengan meningkatkan SDM dalam hal tugas untuk penguatan Satgas Penguatan deteksi dini serta mengadakan Koordinasi Pengawasan Pengamanan bersama unsur TNI/POLRI dalam deteksi dini yang dapat timbulnya konflik di masyarakat dan dilaksanakannya rapat pertemuan Koordinasi Anggota Forum Intelijen dalam rangka membahas permasalahan isu-isu Sara, Aliran Sesat, Perang antar suku, Agama, serta ancaman dari luar. Dengan adanya Kegiatan Forum Intelijen maka dapat diciptakan situasi yang kondusif.
 2. Kegiatan FKDM meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan seringnya melakukan koordinasi dengan pihak tertentu dalam upaya mengatasi konflik sosial dimasyarakat antara lain bentuk tauran anak sekolah dan warga, hal ini tentu saja meresahkan masyarakat oleh karena itu maka Pemerintah membentuk Forum-Forum Koordinasi di Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan melaksanakan pemantauan situasi di wilayah daerah dalam rangka

menciptakan kondisi aman dengan mengadakan patroli gabungan dengan instansi terkait.

3. Kegiatan Forkopimda dengan melaksanakan kegiatan Pemerintah melalui Rapat Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Daerah dari unsur Walikota, DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri yang menjadi kunci utama meraih keberhasilan setiap program Pemerintah meliputi Pembangunan, Politik, Ekonomi, Sosial dan Agama dan peran anggota Forkopimda sangat penting dalam mengatasi segala persoalan atau ujian yang dihadapi di daerah yang tidak bisa diatasi tanpa peran serta kekompakan sinergitas anggota Forkopimda dan masyarakat.

Permasalahan:

- Kegiatan FKID Belum optimalnya sosialisasi, sarasehan, pembinaan, pertemuan pada masyarakat terhadap pencegahan konflik sosial yang terjadi di Kotamobagu terhadap masyarakat, aparat pemerintah dan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI serta timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri dan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat terbatas dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kotamobagu;
- Kegiatan FKDM timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri dan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat terbatas dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kotamobagu
- Kegiatan Forkopimda timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri.
- Peningkatan Kualitas Meningkatkan Keamanan Ketertiban, Dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif dari sektor Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu akan terus tingkatkan pengawasan kebersihan lingkungan agar warga tidak membuang sampah sembarangan serta Puluhan anggota Jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dikumpulkan untuk ikuti pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana bertujuan untuk lebih menambah wawasan dari para anggota Linmas yang ada di setiap Kelurahan/Desa dan anggota Satpol PP yang bertugas bersama Tim Gabungan Pemkot Kota Kotamobagu, yang selalu memberikan imbauan kepada para pedagang terkait batas waktu berdagang, untuk pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat/badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta meningkatnya ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dan meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan:

- Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan kebutuhan;
 - Belum tersedia Sekretariat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan kurangnya Personil PPNS dan belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan hasil pelaksanaan meningkatnya Respon Time Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam menangani Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran serta meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan bahaya bencana Kebakaran.

Permasalahan:

- Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang menjangkau Lokasi bencana Kebakaran;
- Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang bersertifikat sesuai Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.

10. SASARAN MENINGKATNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA

TABEL 3.10
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Cakupan Penanganan Bencana	Indeks	100	100	100	100,00
Tahun 2020	Indeks	100	76	76	

- **Indikator Sasaran Cakupan Penanganan Bencana**
 Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Indeks Risiko Bencana** dengan target tahun kedua 2020 adalah 100% dengan realisasi 76% maka tingkat capaian kinerja sebesar 76%.
 Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **indeks Risiko Bencana** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 100% dengan realisasi 100% maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.
- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.**
- Peningkatan Kualitas Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dari sektor Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu sebagai lembaga yang mengurus kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi secara cepat dan efisien untuk daerah Kota Kotamobagu. Melalui kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa juga disingkat BPBD

melaksanakan fungsi dan tugas lainnya. Adapun tugas utama BPBD adalah sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah. Fungsi BPBD yaitu sebagai penentu pedoman dan arahan jika terjadi bencana daerah, menentukan standar keselamatan dan penanggulangan bencana, merumuskan peta daerah rawan bencana di wilayah kerjanya, mengendalikan penyumpulan sumbangan dana dan bantuan lainnya jika ada bencana, merumuskan prosedur tetap penanganan bencana, hingga pelaporan dan evaluasi penanganan bencana. Jika terjadi bencana pada wilayah kerjanya, BPBD bekerjasama dengan SAR dan BNPB untuk penanggulangan, pertolongan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan baik relawan, makanan, tenda, selimut dan lainnya. Untuk informasi lainnya Anda dapat mengunjungi kantor BPBD terdekat, menghubungi kontak nomor telepon, atau mengakses website resmi BPBD untuk informasi umum lainnya.

- a. Program Penanggulangan Bencana dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Sosialisasi pencegahan bencana serta dilakukan pemasangan papan informasi di daerah rawan bencana sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang resiko bencana serta terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana dan terlaksanya proses evakuasi pada korban bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung.

Permasalahan:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang resiko bencana;
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemulihan pasca bencana;
- Masih kurangnya peralatan pendukung pada saat kejadian bencana bagi tim evakuasi;
- Belum tersedianya dapur umum logistik.

11. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL 3.11
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	Predikat	MADYA	MADYA	100	100,00
Tahun 2020	Predikat	MADYA	MADYA	100	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	94.84	Belum dirilis	Belum dirilis	94,88
Tahun 2020	Persen	94,82	95.37	101%	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57.50	Belum dirilis	Belum dirilis	57,52
Tahun 2020	Indeks	57.49	66.42	116%	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				Belum dirilis	

- Indikator Sasaran Predikat Kota Layak Anak**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Predikat Kota Layak Anak** Dengan target tahun kedua 2020 adalah **MADYA** dengan realisasi **MADYA** maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Predikat Kota Layak Anak** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah **MADYA** dengan realisasi **MADYA** maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.
- Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Dengan target tahun kedua 2020 adalah **94.82** dengan realisasi **95.37** maka tingkat capaian kinerja sebesar **101%**.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD perubahan Kota Kotamobagu dimana **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** dengan realisasi masih menunggu rilis dari BPS.

- **Indikator Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Dengan target tahun kedua 2020 adalah **57.49** dengan realisasi **66.42** maka tingkat capaian kinerja sebesar **116%**.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** dengan realisasi masih menunggu rilis dari BPS

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.**

- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu kegiatan yang melibatkan sejumlah SKPD terkait, dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, bersama Forum Anak Daerah (FAD), personil Kecamatan, Guru Sekolah, bahkan para pelaku Dunia Usaha, serta Puskesmas, LSM. Dalam kegiatan ini membahas soal bagaimana mengimplementasikan program perlindungan hak-hak anak, kegiatan ini adalah pelatihan konvensi hak anak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, juga untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami konvensi hak anak secara utuh sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi KHA dan kegiatan ini juga sebagai salah satu indikator dalam pemenuhan hak anak dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

- a. Program Perlindungan Perempuan dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) sehingga diharapkan peserta sosialisasi dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan serta dilakukannya penanganan Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) yang dilaporkan di UPTD PPA sehingga korban kekerasan perempuan mendapatkan penyelesaian kasus dan merasa terlindungi dari kasus yang dialami.

- b. Program Perlindungan Khusus Anak dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). sehingga diharapkan peserta sosialisasi dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman apabila terjadi tindak kekerasan terhadap Anak serta dilakukannya penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan di UPTD PPA . sehingga korban kekerasan anak mendapat penanganan dan perlindungan.
- c. Program Pemenuhan Hak Anak dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak sehingga Hak Hak Anak Bisa terpenuhi antara lain Hak Pendidikan, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak dengan hasil pelaksanaan dibentuknya Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Sehingga Mempermudah koordinasi antara Pemerintah, Lembaga Nonpemerintah, LSM, Dunia Usaha untuk mewujudkan Kota Layak Anak serta dilaksanakannya Hari Anak Nasional sehingga dapat terpenuhinya Hak Anak dalam Kebebasan Berkreasi, Bermain, dan Berkumpul.

Permasalahan:

Masih kurangnya dukungan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Lembaga Nonpemerintah untuk mendukung Program Pemenuhan Hak Anak.

- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan hasil pelaksanaan buku Profil Anak sehingga mempermudah informasi tentang anak diantaranya jumlah anak, data kesehatan dasar anak, dan data pendidikan anak.

Permasalahan:

- Masih kurangnya Data Untuk Penyusunan Buku Profil Anak dari OPD terkait.
 - Masih kurangnya Tenaga Ahli dalam Penyusunan Buku Profil Anak
- f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan hasil pelaksanaan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi yang berfokus pada gender agar perwujudan kesetaraan gender boleh terlaksana.
- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan hasil pelaksanaan terlaksananya kegiatan pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan terlayannya masyarakat yang datang ke PUSPAGA.

Permasalahan:

Kegiatan di PUSPAGA masih sebatas pada pelayanan pembinaan calon pengantin disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia sebagai konselor karena terbatasnya anggaran yang tersedia.

- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu menggelar pelayanan KB gratis bagi masyarakat Kotamobagu, Pelaksanaannya sendiri akan dibagi di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di empat kecamatan dan fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun klinik mandiri dengan menambahkan, dalam pelaksanaan program KB gratis ini menyediakan kurang lebih 400 alat kontrasepsi (Alkon) yang terdiri dari berbagai jenis.
- a. Program Pengendalian Penduduk dengan pelaksanaan tersedianya Dokumen Grand Design Kependudukan Yang memuat 5 Pilar Pembangunan Kependudukan Yaitu :

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
4. Pembangunan Keluarga;
5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Tujuan Disusunnya GDPK adalah :

1. Mewujudkan Kualitas penduduk Dalam Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya Yang Seimbang Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Didasarkan Pada Wawasan Kependudukan dan Lingkungan;
 3. Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk Melalui Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Mewujudkan Pengarahan Mobilitas Penduduk Secara Merata Antar Wilayah Kecamatan;
 5. Mewujudkan Keluarga Yang Berketahanan, Sejahtera, Maju, Mandiri dan Harmonis Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan Gender Serta Mampu Merencanakan Sumber Daya Keluarga;
 6. Mewujudkan Tercapainya Demografi Melalui Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk;
 7. Tercapainya Data dan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipercaya.
- b. Program Pengendalian Penduduk dengan hasil pelaksanaan tersedianya Data Terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemabngunan Keluarga dari Mitra Kerja dan Stakeholder Yang Terkait serta adanya Sosialisasi Program KKBPK dan Peningkatan Capaian Pelaksanaan Program KKBPK.
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Peserta KB Aktif, Tersedianya Sarana KIE dan Operasional di Balai Penyuluhan KKBPK, Meningkatnya Kader dan Pokja Kampung KB Yang Terorientasi dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Keluarga Berencana.
- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan hasil pelaksanaan terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan dan Kampung KB dan

Terbentuknya Kelompok Ketahanan Keluarga serta terbentuknya Kelompok PIK-R Melalui Jalur Pendidikan dan Kemasyarakatan, terbentuknya Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Setiap Desa Kelurahan.

Permasalahan:

- Belum Tersedianya Anggaran Untuk Tenaga Teknis Pusata Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan;
- Pemahaman Tentang Pentingnya PIK-R Masih Rendah Terutama Pada Jalur Kemasyarakatan, Sarana dan Prasarana Pendukung Masih Kurang;
- Kurangnya Pemahaman Tentang BKB,BKR,BKL dan UPPKS Sehingga Masih Terdapat Kelompok Kegiatan Yang Belum Berjalan Secara Opimal, dan Masih Terdapat Pengelolaan Kelompok UPPKS Yang Bersifat Perorangan.

12. SASARAN MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, KOMPETITIF DAN KREATIF

TABEL 3.12

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	Persen	50	145	290	75,00
Tahun 2020	Persen	48	11.07	23.30	
Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	10.63	10.10	95%	11,07
Tahun 2020	Tahun	10.41	10.10	103%	
Angka harapan hidup	Tahun	69.77	70.60	101%	69,80
Tahun 2020	Tahun	69.75	70.33	100%	

Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	Persen	25	70.37	281	50,00
Tahun 2020	Persen	12.50	11.54	92.32	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				191%	

- **Indikator Sasaran Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Atlet Olahraga yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional** dengan target tahun kedua 2020 adalah **48%** dengan realisasi **11,07** maka tingkat capaian kinerja sebesar **23,30**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setelah perubahan Kota Kotamobagu dimana **Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah **50%** dengan realisasi **145%** maka tingkat capaian kinerja sebesar **290%**.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **75%**, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah **193%**.

- **Indikator Sasaran Angka Rata-Rata lama sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2015 dari target 9.6 dengan realisasi 9.75 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 101.14%, ditahun 2016 dari target yang ditetapkan 9.71 dengan realisasi 9.97 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 102.68%, ditahun 2017 dari target yang ditetapkan 9.78 dengan realisasi 9.97 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 101.94%, dan ditahun 2018 dari target yang ditetapkan 9.97 dengan realisasi 10,04 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Pada tahun 2020 dari target 10,41 dengan realisasi 10,10 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 103%

Pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan 10,19 dengan realisasi 10.63 dimana tingkat capaian kinerja sebesar 10.10% dimana tingkat capaian kinerja sebesar **95%**

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidik, dan manajemen pelayanan pendidikan.

Dengan realisasi 10,19 ditahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 11,07 maka realisasi kinerja terhadap tahun akhir RPJMD adalah sebesar 92.05%

- **Indikator Sasaran Angka harapan hidup**

Angka harapan hidup ditahun 2020 dari target yang ditetapkan 69.75 dengan realisasi 70.43 dimana tingkat capaian kinerja sebesar **100.97%**

Angka Harapan Hidup ditahun 2021 dari target yang ditetapkan 69.77 dengan realisasi 70.60 dimana tingkat capaian kinerja sebesar **101,%** bernilai **Baik Sekali**.

Dengan realisasi 70.60 ditahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 69,80 maka realisasi kinerja terhadap tahun akhir RPJMD adalah sebesar **101%.**

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indikator Angka Harapan Hidup yaitu peningkatan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, pemberdayaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

- **Indikator Sasaran Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional** dngan target tahun kedua 2020 adalah **12,50%** dengan realisasi **11,54** maka tingkat capaian kinerja sebesar **92,32%**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional** dngan target tahun ketiga 2021 adalah **25%** dengan realisasi **70.37%** maka tingkat capaian kinerja sebesar **281%**

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif.**

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Kompetitif Dan Kreatif dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinkes Kota Kotamobagu memiliki tugas untuk merumusan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang

kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya. Kunjungi kantor dinas kesehatan terdekat ini untuk aduan atau informasi seperti info kesehatan, program kesehatan, hingga berita kebijakan kesehatan serta penanganan Covid 19 sapa ke wilayah 4 Kecamatan.

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan hasil pelaksanaan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal, Pendataan dan Pemantauan Bumil Resti, Program Doyan UBI (Dokumen Pelayanan Untuk Bayi), Survei Status Gizi Masyarakat, AKI dan AKB serta Stunting masih di bawah Angka Nasional serta Pengembangan Puskesmas merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas, Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi. pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan, Peningkatan manajemen penyelenggaraan puskesmas perlu dukungan Sistem Informasi Puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara tepat, akurat, terkini, berkelanjutan dan dapat

dipertanggungjawabkan, Perencanaan dan pengadaan obat merupakan tahap yang penting dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan, Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, sebagai Standar Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dijadikan acuan pada pelaksanaan Pengadaan Obat, Vaksin dan BHP, sebagai pendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat, Tindakan dan inovasi yang sudah dilakukan dengan penerapan SIKDA Generik, *e-Logistik* dan *e-barcode*. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Promosi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dilaksanakannya penggerakan Germas berkala, berkesinambungan di semua tatanan, Peningkatan kegiatan Germas di masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup yang sehat, dilaksanakannya Pemantauan dan Pengawasan Sarana Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan untuk menjaga kualitas, Dilaksanakannya Program Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga sebagai Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Melalui pelaksanaan gerakan Aktifitas Fisik di SKPD dan pembinaan Kesehatan kerja bagi pekerja di Pos UKK.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan hasil pelaksanaan tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tindakan dan inovasi yang sudah dilakukan untuk pencapaian Program (UU No. 36 tahun 2014) tentang Tenaga Kesehatan), melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, pemutakhiran data melalui Aplikasi Sistem informasi Sumber daya Manusia Kesehatan dan Renbut Kementerian Kesehatan, terlaksananya penyusunan dokumen kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2021, alur pelayanan penerbitan perijinan Fasilitas pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga telah dilaksanakan bersama kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan, tenaga kesehatan yang mengajukan dokumen izin praktek sudah sesuai dengan standar.

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan hasil pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2020 dan Program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan minuman industri rumah tangga, sebagai kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, dengan mempertimbangkan maraknya kejadian tidak diinginkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan, alur pelayanan penerbitan perijinan Fasilitas pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga telah dilaksanakan bersama kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk

memudahkan pelayanan perizinan, hasil dari pelaksanaan program ini adalah sebanyak 90 jumlah industri rumah tangga, 43 apotek dan 11 toko obat telah memiliki izin.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan hasil pelaksanaan terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang dapat berbudaya hidup bersih dan sehat melalui tersosialisasinya program-program kesehatan, meningkatnya kemampuan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu hidup sehat serta pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, dilaksanakannya program pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat melalui pengadaan media promosi, dilaksanakannya kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Posyandu oleh Kader Kesehatan, hasil yang dicapai dari program adalah meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan minimal.

Permasalahan:

Sikap masyarakat yang masih tradisional, adanya suatu prasangka buruk terhadap program kesehatan, mempertahankan suatu adat atau kebiasaan yang dibawa sejak kecil atau yang sudah turun temurun.

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Kompetitif Dan Kreatif dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu untuk wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kota Kotamobagu bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya serta melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program

pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbel.

- a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan hasil pelaksanaan sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan setiap tahun di tingkatkan melalui dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kota, sudah tersedia Lembaga PAUD di sekolah Desa/Kelurahan yang dapat kembangkan untuk memberi pelayanan PAUD, adanya dukungan pendanaan Desa melalui APBDes, melalui dana BOP PAUD, sudah ada insentif tutor PAUD melalui APBD, adanya program rehabilitasi melalui dana DAK, adanya dana BOS untuk pengembangan perpustakaan Sekolah, adanya program Gerakan Literasi Sekolah, adanya dana untuk mengatasi kekurangan guru melalui guru Kontrak/PPPK dan adanya dukungan dana DAK untuk pembangunan jamban, adanya perencanaan pengadaan meubeler sekolah secara bertahap, sudah ada kegiatan yang menunjang kompetisi minat dan bakat siswa secara berjenjang, adanya dukungan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal serta adanya SDM Kursus yang dapat di kembangkan lebih keahliannya.
- b. Program Pengembangan Kurikulum dengan hasil pelaksanaan sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan setiap tahun di tingkatkan melalui dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kota dan Pendidikan dan pelatihan khusus tenaga kependidikan muatan lokal dengan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kota.
- c. Program Peningkatan Pendidik Dan Kependidikan dengan hasil pelaksanaan telah mendorong dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan Universitas STAIN Gorontalo serta adanya kegiatan untuk

meningkatkan kompetensi guru dan sudah tersedia dana untuk program Calon kepala sekolah, sudah dilakukan diklat calon pengawas sekolah.

Permasalahan:

- Guru yang Tersertifikasi tidak sebanding dengan guru yang memasuki masa purna bakti;
- Rendahnya Angka kelulusan guru-guru yang mengikuti PPG/Pre test UKG;
- Kepala Sekolah umumnya tidak bersertifikat Calon Kepala Sekolah;
- Pengawasan sekolah yang belum memenuhi standar
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Kompetitif Dan Kreatif dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kotamobagu dari sudut pemustaka, indikator dalam dimensi LibQual+™ yang menjadi prioritas utama perlu ditingkatkan, serta solusi teknis pengembangan kualitas pelayanan. Kualitas layanan diukur menggunakan 3 dimensi dalam LibQUAL+™ yaitu Affect of service, Information Control, dan Library as place. Hasil analisis GAP pada masing-masing variabel LibQual+™ seluruhnya bernilai negatif dengan nilai rata-rata GAP (kesenjangan) sebesar -0.82. Nilai indeks kepuasan dengan metode Costumer Satisfaction Index (CSI) sebesar 71,12%. Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan layanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Kotamobagu masih belum dapat memenuhi harapan pemustaka secara maksimal. Indikator layanan yang menjadi prioritas berdasarkan harapan pemustaka pada matriks IPA Kuadran I kemudian diintegrasikan pada matriks House of Quality (HOQ) metode QFD, sehingga 3 solusi teknis pengembangan kualitas layanan yang direkomendasikan melalui matriks HOQ secara berurutan mulai dari prioritas utama yaitu (1) Pengadaan peralatan lewat APBD setiap tahun, (2) Mengusulkan pengadaan buku melalui APBD, (3) Pengadaan buku terbitan baru melalui APBD.

- a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas dan kapasitas Gedung Perpustakaan Berbasis Modern dan Digital agar dapat meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat umum, Siswa Sekolah dan Mahasiswa perguruan Tinggi, Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Bacaan untuk Meningkatkan Wawasan dan Menambah Ilmu Pengetahuan Masyarakat Umum, Siswa Sekolah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Rak Penyimpanan Koleksi Buku Bacaan agar koleksi Buku Bacaan terlindungi dan terawat dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan Koleksi Buku bacaan dan Peningkatan sarana Perpustakaan Yang Berbasis Modern dan Digital (TIK) untuk lebih memudahkan pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan melalui perpustakaan Digital.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Ruang Penyimpanan Arsip sesuai standar, Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip, Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Arsip Digital dan Peningkatan jumlah ASN yang bersertifikat.
- c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan hasil pelaksanaan Peningkatan jumlah ASN yang berkualitas dalam menangani kegiatan persandian/keamanan informasi.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Kompetitif Dan Kreatif dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menggelar seleksi calon Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibraka) Para calon paskibraka akan diseleksi melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia 17 Agustus serta olahraga e-sport bersama Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kota Kotamobagu demi terbentuknya cabang olahraga (Cabor) e-sport di Kota Kotamobagu. Dispora Kota Kotamobagu bahwa e-sport dikategorikan dalam olahraga

hiburan harusnya ada inisiatif yang muncul dari teman-teman, selain kami dari Dispora siap memfasilitasi itu. Dispora demi peningkatan hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya yang nantinya dapat dilanjutkan sebagai usulan untuk membentuk segera wadah e-sport di Kota Kotamobagu. Paling tidak supaya bisa segera menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa bersaing tingkat Nasional, dengan banyaknya masyarakat yang kerap kali mengikuti turnamen, dapat menjadi suatu potensi besar dan baru untuk memberikan prestasi baru kepada Kota Kotamobagu melalui cabang e-sport.

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan hasil pelaksanaan dengan adanya pembinaan dan sosialisasi dalam kegiatan organisasi maka akan meningkatnya cabang-sport di kota kotamobagu serta adanya Koordinasi Lintas Organisasi maka akan terlaksananya event olahraga yang ada di kota kotamobagu.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan hasil pelaksanaan adanya pelatihan khusus Pelatih di tingkat nasional dan internasional serta peningkatan Kapasitas SDM. Pelatih Cabang Olahraga dan adanyan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK serta meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan hasil pelaksanaan adanya Kompetisi kelompok usia junior serta meningkatkan kualitas atlit dan adanya kerjasama dengan Pemerintah Pusat.

**PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	957.368.400	957.368.400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.207.101.150	1.207.101.150
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	963.077.650	963.077.650
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.045.700	175.045.700
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	37.227.650	28.857.650,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	258.073.250	258.073.250
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.021.543.470	3.021.543.470
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	222.870.900	222.870.900
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.491.818.987	2.491.818.987
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.534.661.909	6.534.661.909
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.886.250	38.886.250
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	32.748.400	32.748.400
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	644.692.400	644.692.400
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	488.322.752	488.322.752	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DA MASYARAKAT HUKUM ADAT	52.841.150	52.841.150	

	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	32.522.800	32.522.800
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	172.985.400	165.878.450,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	534.383.500	534.383.500
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	426.390.000	426.390.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.000.000	2.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	958.489.920	958.489.920
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	68.960.000	68.960.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	55.474.460	55.474.460
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	189.905.800	189.905.800
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.109.414.912	14.109.414.912
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	336.981.924	336.981.924
SASARAN MENURUNYA ANGKA KEMISKINAN			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	252.357.700	252.357.700
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	221.052.450	221.052.450
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	93.569.000	93.569.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.294.000	50.294.000
SASAR MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.240.989.850,00	1.240.989.850,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	143.676.200	143.676.200

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	19.032.375.645 ,00	19.032.375.6 45,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	49.766.800,00	49.766.800,0 0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	752.914.600,00	752.914.600, 00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	496.998.900,00	496.998.900, 00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	227.644.200,00	227.644.200, 00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.322.000,00	10.322.000,0 0
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	53.116.000,00	53.116.000,0 0
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.817.535.300	5.817.535.30 0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	635.140.000	635.140.000
SASARAN MENIGKATNYA PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN PERKOTAAN			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	914.671.966	914.671.966
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	955.323.100	955.323.100
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.958.631.600	1.958.631.60 0
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.128.012.102	4.128.012.10 2
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	18.960.750	18.960.750
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	56.933.300	56.933.300
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	171.511.050	171.511.050

SASARAN MENINGKATNYA DESTINASI PARIWISATA DAN KELEATARIAN BUDAYA DAERAH			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	30.861.700	30.861.700
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	97.783.600	97.783.600
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	54.000.000	54.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	29.296.000	29.296.000
SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH			
6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	45.421.900	45.421.900
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000	322.573.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	102.583.750	102.583.750
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF, AKUNTABEL DAN BERBASIS E-GOVERNMENT			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.360.426.627	287.360.426.627
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	640.865.050	640.865.050
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	97.522.650	97.522.650
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	173.111.000	173.111.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.769.300	8.769.300
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.586.020.800	3.586.020.800
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.675.126.250	3.675.126.250
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30.000.000	29.987.925,00

	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.760.127.900	1.760.127.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	84.774.000	84.774.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.899.646.200	2.899.646.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.136.250.000	4.136.250.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.352.440.600	11.352.440.600
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.151.209.100	1.151.209.100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	640.735.800	640.735.800
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	513.292.600	513.292.600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000	25.200.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.530.300	31.530.300
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	469.157.675	469.157.675
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	51.711.900	51.711.900
SASARAN MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH			
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	80.333.281.123	80.333.281.123
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	331.448.750	331.448.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.398.491.007	2.398.491.007
SASARAN MENINGKATNYA KEAMANAN KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF			

9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.892.700	39.892.700
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.408.370.000	1.103.693.494,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	379.300.000	379.300.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	89.197.000	89.197.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	715.717.850	715.717.850
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.687.350	13.687.350
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	97.351.300	97.351.300
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	31.343.350	31.343.350
SASARAN MENINGKATNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA			
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	684.995.924	684.995.924
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	151.973.600	151.973.600
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	102.650.600	102.650.600
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	149.570.000	149.570.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	269.272.750	269.272.750
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.398.800	7.398.800
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.908.400	85.908.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	333.533.100	333.533.100

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.240.576.690	2.240.576.690
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	86.688.000	86.688.000
SASARAN MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, KOMPETITIF, DAN KREATIF			
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	112.120.797.865	112.120.797.865
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.810.584.200	5.810.584.200
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	42.426.000	42.426.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	478.926.750	478.926.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.532.658.491	35.532.658.491
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	181.902.100	181.902.100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	475.367.900	475.367.900
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	357.695.350	357.695.350
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	36.542.200	36.542.200
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	89.935.900	89.935.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.100.561.850	1.100.561.850
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.221.084.700	1.221.084.700

3.2. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RPJMD PERUBAHAN 2021 - 2023

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis RPJMD Perubahan yang mana tela disesuaikan kembali sasaran dan indikator pada RPJMD Tahun 2021-2023. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran kinerja mencakup realisasi kinerja, capaian kinerja tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir RPJMD.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masing-masing perangkat daerah. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu dengan adanya Perubahan RPJMD di sampaikan sebagai berikut.

1. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

TABEL 3.13

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	0.7	0.7	100	0.70
Angka harapan hidup	Tahun	69.77	70.60	101%	69,80

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **indeks Kualitas Pendidikan** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 0.7 dengan realisasi 0.7 maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setelah perubahan Kota Kotamobagu dimana **Angka Harapan hidup** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 69.77 dengan realisasi 70.60 maka tingkat capaian kinerja sebesar **101%**.

- **Faktor – Faktor Pendorong Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat**
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinkes Kota Kotamobagu memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya. Kunjungi kantor dinas kesehatan terdekat ini untuk aduan atau informasi seperti info kesehatan, program kesehatan, hingga berita kebijakan kesehatan serta penanganan Covid 19 smpai ke wilayah 4 Kecamatan.
- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan hasil pelaksanaan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal, Pendataan dan Pemantauan Bumil Resti, Program Doyan UBI (Dokumen Pelayanan Untuk Bayi), Survei Status Gizi Masyarakat, AKI dan AKB serta Stunting masih di bawah Angka Nasional serta Pengembangan Puskesmas merupakan upaya kesehatan masyarakat

yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas, Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi. pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan, Peningkatan manajemen penyelenggaraan puskesmas perlu dukungan Sistem Informasi Puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara tepat, akurat, terkini, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, Perencanaan dan pengadaan obat merupakan tahap yang penting dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan, Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, sebagai Standar Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dijadikan acuan pada pelaksanaan Pengadaan Obat, Vaksin dan BHP, sebagai pendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat, Tindakan dan inovasi yang sudah dilakukan dengan penerapan SIKDA Generik, *e-Logistik* dan *e-barcode*. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Promosi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dilaksanakannya penggerakan Germas berkala, berkesinambungan di semua tatanan, Peningkatan kegiatan Germas di masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan

hidup yang sehat, dilaksanakannya Pemantauan dan Pengawasan Sarana Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan untuk menjaga kualitas, Dilaksanakannya Program Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga sebagai Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Melalui pelaksanaan gerakan Aktifitas Fisik di SKPD dan pembinaan Kesehatan kerja bagi pekerja di Pos UKK.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan hasil pelaksanaan tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tindakan dan inovasi yang sudah dilakukan untuk pencapaian Program (UU No. 36 tahun 2014) tentang Tenaga Kesehatan), melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, pemutakhiran data melalui Aplikasi Sistem informasi Sumber daya Manusia Kesehatan dan Renbut Kementerian Kesehatan, terlaksananya penyusunan dokumen kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2021, alur pelayanan penerbitan perijinan Fasilitas pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga telah dilaksanakan bersama kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan, tenaga kesehatan yang mengajukan dokumen izin praktek sudah sesuai dengan standar.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan hasil pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2020 dan Program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan minuman industri rumah tangga, sebagai kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, dengan mempertimbangkan maraknya kejadian tidak diinginkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan, alur pelayanan penerbitan perijinan Fasilitas pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga telah dilaksanakan bersama kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan, hasil dari pelaksanaan program ini adalah sebanyak 90 jumlah industri rumah tangga, 43 apotek dan 11 toko obat telah memiliki izin.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan hasil pelaksanaan terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang dapat berbudaya hidup bersih dan sehat melalui tersosialisasinya program-program kesehatan, meningkatnya kemampuan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu hidup sehat serta pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, dilaksanakannya program pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat melalui pengadaan media promosi, dilaksanakannya kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Posyandu oleh Kader Kesehatan, hasil yang dicapai dari program adalah meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan minimal.

Permasalahan:

Sikap masyarakat yang masih tradisional, adanya suatu prasangka buruk terhadap program kesehatan, mempertahankan suatu adat atau kebiasaan yang dibawa sejak kecil atau yang sudah turun temurun.

- Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu untuk

wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kota Kotamobagu bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya serta melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbel.

- a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan hasil pelaksanaan sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan setiap tahun di tingkatkan melalui dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kota, sudah tersedia Lembaga PAUD di sekolah Desa/Kelurahan yang dapat kembangkan untuk memberi pelayanan PAUD, adanya dukungan pendanaan Desa melalui APBDes, melalui dana BOP PAUD, sudah ada insentif tutor PAUD melalui APBD, adanya program rehabilitasi melalui dana DAK, adanya dana BOS untuk pengembangan perpustakaan Sekolah, adanya program Gerakan Literasi Sekolah, adanya dana untuk mengatasi kekurangan guru melalui guru Kontrak/PPPK dan adanya dukungan dana DAK untuk pembangunan jamban, adanya perencanaan pengadaan meubeler sekolah secara bertahap, sudah ada kegiatan yang menunjang kompetisi minat dan bakat siswa secara berjenjang, adanya dukungan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada

Lembaga Pendidikan Non Formal serta adanya SDM Kursus yang dapat di kembangkan lebih keahliannya.

- b. Program Pengembangan Kurikulum dengan hasil pelaksanaan sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan setiap tahun di tingkatkan melalui dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kota dan Pendidikan dan pelatihan khusus tenaga kependidikan muatan lokal dengan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kota.
- c. Program Peningkatan Pendidik Dan Kependidikan dengan hasil pelaksanaan telah mendorong dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan Universitas STAIN Gorontalo serta adanya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan sudah tersedia dana untuk program Calon kepala sekolah, sudah dilakukan diklat calon pengawas sekolah.

Permasalahan:

- Guru yang Tersertifikasi tidak sebanding dengan guru yang memasuki masa purna bakti;
- Rendahnya Angka kelulusan guru-guru yang mengikuti PPG/Pre test UKG;
- Kepala Sekolah umumnya tidak bersertifikat Calon Kepala Sekolah;
- Pengawasan sekolah yang belum memenuhi standar
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kotamobagu dari sudut pemustaka, indikator dalam dimensi LibQual+™ yang menjadi prioritas utama perlu ditingkatkan, serta solusi teknis pengembangan kualitas pelayanan. Kualitas layanan diukur menggunakan 3 dimensi dalam LibQUAL+™ yaitu Affect of service, Information Control, dan Library as place. Hasil analisis GAP pada masing-masing variabel LibQual+™ seluruhnya bernilai negatif dengan nilai rata-rata GAP (kesenjangan) sebesar -0.82. Nilai indeks kepuasan

dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI) sebesar 71,12%. Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan layanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Kotamobagu masih belum dapat memenuhi harapan pemustaka secara maksimal. Indikator layanan yang menjadi prioritas berdasarkan harapan pemustaka pada matriks IPA Kuadran I kemudian diintegrasikan pada matriks House of Quality (HOQ) metode QFD, sehingga 3 solusi teknis pengembangan kualitas layanan yang direkomendasikan melalui matriks HOQ secara berurutan mulai dari prioritas utama yaitu (1) Pengadaan peralatan lewat APBD setiap tahun, (2) Mengusulkan pengadaan buku melalui APBD, (3) Pengadaan buku terbitan baru melalui APBD.

- a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas dan kapasitas Gedung Perpustakaan Berbasis Modern dan Digital agar dapat meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat umum, Siswa Sekolah dan Mahasiswa perguruan Tinggi, Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Bacaan untuk Meningkatkan Wawasan dan Menambah Ilmu Pengetahuan Masyarakat Umum, Siswa Sekolah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Rak Penyimpanan Koleksi Buku Bacaan agar koleksi Buku Bacaan terlindungi dan terawat dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan Koleksi Buku bacaan dan Peningkatan sarana Perpustakaan Yang Berbasis Modern dan Digital (TIK) untuk lebih memudahkan pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan melalui perpustakaan Digital.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Ruang Penyimpanan Arsip sesuai standar, Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip, Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Arsip Digital dan Peningkatan jumlah ASN yang bersertifikat.

- c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan hasil pelaksanaan Peningkatan jumlah ASN yang berkualitas dalam menangani kegiatan persandian/keamanan informasi.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menggelar seleksi calon Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibraka) Para calon paskibraka akan diseleksi melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia 17 Agustus serta olahraga e-sport bersama Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kota Kotamobagu demi terbentuknya cabang olahraga (Cabor) e-sport di Kota Kotamobagu. Dispora Kota Kotamobagu bahwa e-sport dikategorikan dalam olahraga hiburan harusnya ada inisiatif yang muncul dari teman-teman, selain kami dari Dispora siap memfasilitasi itu. Dispora demi peningkatan hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya yang nantinya dapat dilanjutkan sebagai usulan untuk membentuk segera wadah e-sport di Kota Kotamobagu. Paling tidak supaya bisa segera menjadi salah satu cabor olahraga yang bisa bersaing tingkat Nasional, dengan banyaknya masyarakat yang kerap kali mengikuti turnamen, dapat menjadi suatu potensi besar dan baru untuk memberikan prestasi baru kepada Kota Kotamobagu melalui cabor e-sport.
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan hasil pelaksanaan dengan adanya pembinaan dan sosialisasi dalam kegiatan organisasi maka akan meningkatnya cabor-sport di kota kotamobagu serta adanya Koordinasi Lintas Organisasi maka akan terlaksananya event olahraga yang ada di kota kotamobagu.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan hasil pelaksanaan adanya pelatihan khusus Pelatih di tingkat nasional dan internasional serta peningkatan Kapasitas SDM. Pelatih Cabang

Olahraga dan adanya pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK serta meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan hasil pelaksanaan adanya Kompetisi kelompok usia junior serta meningkatkan kualitas atlit dan adanya kerjasama dengan Pemerintah Pusat.
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dengan menyusun Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebab persoalan budaya sudah melekat dan menjadi pakaian hidup serta sebagai harga diri bagi seseorang. Jamak terjadi bagi kita pemahaman tentang pentingnya kebudayaan terkadang hanya dalam bentuk ucapan-pemanis saja-tidak dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai fondasi untuk melaksanakan kegiatan atau program. Sebuah dokumen yang bisa dipraktikkan atau dilaksanakan dikemudian hari. Sebuah dokumen yang memuat tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah landasasan untuk cerminan Kota Kotamobagu untuk menarik wisatawan.
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan hasil pelaksanaan muatan Lokal menjadi salah satu mata pelajaran pada pendidikan formal di SD dan SMP serta adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek kepada Komunitas/sanggar seni budaya untuk mendukung peletarian seni budaya di daerah dan sistem pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan secara online.
 - b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan hasil pelaksanaan banyak Benda/objek peninggalan bersejarah yang diduga cagar budaya yang dimiliki namun tidak terkelola dengan baik.

Permasalahan:

- Tidak adanya Tenaga Ahli terutama tenaga ahli Cagar Budaya, tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bersertifikasi baik di tingkat provinsi maupun di daerah, sehingga berdampak pada terhambatnya upaya penetapan dan pemeringkatan Cagar budaya serta pemanfaatan cagar budaya

- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas daya Tarik Wisata pada Destinasi Wisata, serta peningkatan daya Tarik Wisata serta peningkatan amenitas pada destinasi wisata serta adanya dukungan Anggaran dari kementerian RI untuk peningkatan SDM pengelola destinasi pariwisata dan Pelaksanaan Promosi potensi dan daya Tarik Wisata melalui media sosialisasi sehingga penyebarluasan informasi pariwisata lebih luas dan cepat.

Permasalahan:

- Kurangnya SDM Pengelola destinasi Wisata yang terlatih serta pemasaran dan Promosi Pariwisata yang belum maksimal sehingga berdampak pada kurangnya tingkat kunjungan Wisatawan.

2. SASARAN MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

TABEL 3.14

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Persentase penduduk miskin	Persen	5,91	Belum dirilis	Belum dirilis	5,88
Tahun 2020	Persen	5.92	5.42	91.55	
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021					

Pada tahun 2021 berdasarkan data BPS, Belum dirilis penduduk miskin dikota kotamobagu.

- **Faktor Pendorong Menurunnya Angka Kemiskinan**
- Menurunnya Angka Kemiskinan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Kotamobagu dengan menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terhadap pendidikan dan kesehatan Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.
 - a. Program Rehabilitasi Sosial dengan hasil pelaksanaan rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Penyediaan Permakanan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Pemeliharaan anak-anak terlantar, Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.
 - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial hasil pelaksanaan adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tersedianya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan, tersedianya sumber daya manusia PNS dan PSKS, tersedianya sarana dan prasarana kerja, tersedianya dukungan dana dari APBD dan APBN, adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS. peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial maka untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dilakukan peningkatan akurasi dan kualitas data kesejahteraan sosial sebagai sumber data tunggal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan/pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan PMKS oleh

Dinas Sosial Kota Kotamobagu juga dengan meningkatkan peranan PSKS. Yang dimaksud PSKS dalam hal ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL 3.15

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Predikat	MADYA	MADYA	100	100,00
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	94.82	Belum dirilis	Belum dirilis	94,88
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				Belum dirilis	

- Indikator Sasaran Predikat Kota Layak Anak**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **Predikat Kota Layak Anak** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah **MADYA** dengan realisasi **MADYA** maka tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.
- Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD perubahan Kota Kotamobagu dimana **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** dengan realisasi masih menunggu rilis dari BPS.
- Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Kotamobagu kegiatan yang melibatkan sejumlah SKPD terkait, dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, bersama Forum Anak Daerah (FAD), personil Kecamatan, Guru Sekolah, bahkan para pelaku Dunia Usaha, serta Puskesmas, LSM. Dalam kegiatan ini membahas soal bagaimana mengimplementasikan program perlindungan hak-hak anak, kegiatan ini adalah pelatihan konvensi hak anak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, juga untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami konvensi hak anak secara utuh sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi KHA dan kegiatan ini juga sebagai salah satu indikator dalam pemenuhan hak anak dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

- a. Program Perlindungan Perempuan dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) sehingga diharapkan peserta sosialisasi dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan serta dilakukannya penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) yang dilaporkan di UPTD PPA sehingga korban kekerasan perempuan mendapatkan penyelesaian kasus dan merasa terlindungi dari kasus yang dialami.
- b. Program Perlindungan Khusus Anak dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). sehingga diharapkan peserta sosialisasi dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman apabila terjadi tindak kekerasan terhadap Anak serta dilakukannya penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan di UPTD PPA . sehingga korban kekerasan anak mendapat penanganan dan perlindungan.

- c. Program Pemenuhan Hak Anak dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak sehingga Hak Hak Anak Bisa terpenuhi antara lain Hak Pendidikan, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak dengan hasil pelaksanaan dibentuknya Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Sehingga Mempermudah koordinasi antara Pemerintah, Lembaga Nonpemerintah, LSM, Dunia Usaha untuk mewujudkan Kota Layak Anak serta dilaksanakannya Hari Anak Nasional sehingga dapat terpenuhinya Hak Anak dalam Kebebasan Berkreasi, Bermain, dan Berkumpul.

Permasalahan:

Masih kurangnya dukungan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Lembaga Nonpemerintah untuk mendukung Program Pemenuhan Hak Anak.

- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan hasil pelaksanaan buku Profil Anak sehingga mempermudah informasi tentang anak diantaranya jumlah anak, data kesehatan dasar anak, dan data pendidikan anak.

Permasalahan:

- Masih kurangnya Data Untuk Penyusunan Buku Profil Anak dari OPD terkait.
- Masih kurangnya Tenaga Ahli dalam Penyusunan Buku Profil Anak
- f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan hasil pelaksanaan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi yang berfokus pada gender agar perwujudan kesetaraan gender boleh terlaksana.

- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan hasil pelaksanaan terlaksananya kegiatan pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan terlayannya masyarakat yang datang ke PUSPAGA.

Permasalahan:

Kegiatan di PUSPAGA masih sebatas pada pelayanan pembinaan calon pengantin disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia sebagai konselor karena terbatasnya anggaran yang tersedia.

- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu menggelar pelayanan KB gratis bagi masyarakat Kotamobagu, Pelaksanaannya sendiri akan dibagi di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di empat kecamatan dan fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun klinik mandiri dengan menambahkan, dalam pelaksanaan program KB gratis ini menyediakan kurang lebih 400 alat kontrasepsi (Alkon) yang terdiri dari berbagai jenis.
- a. Program Pengendalian Penduduk dengan pelaksanaan tersedianya Dokumen Grand Design Kependudukan Yang memuat 5 Pilar Pembangunan Kependudukan Yaitu :
 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 4. Pembangunan Keluarga;
 5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Tujuan Disusunnya GDPK adalah :

1. Mewujudkan Kualitas penduduk Dalam Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya Yang Seimbang Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Didasarkan Pada Wawasan Kependudukan dan Lingkungan;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk Melalui Penanggulangan Kemiskinan;

4. Mewujudkan Pengarahan Mobilitas Penduduk Secara Merata Antar Wilayah Kecamatan;
 5. Mewujudkan Keluarga Yang Berketahanan, Sejahtera, Maju, Mandiri dan Harmonis Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan Gender Serta Mampu Merencanakan Sumber Daya Keluarga;
 6. Mewujudkan Tercapainya Demografi Melalui Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk;
 7. Tercapainya Data dan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipercaya.
- b. Program Pengendalian Penduduk dengan hasil pelaksanaan tersedianya Data Terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemabngunan Keluarga dari Mitra Kerja dan Stakeholder Yang Terkait serta adanya Sosialisasi Program KKBPK dan Peningkatan Capaian Pelaksanaan Program KKBPK.
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Peserta KB Aktif, Tersedianya Sarana KIE dan Operasional di Balai Penyuluhan KKBPK, Meningkatnya Kader dan Pokja Kampung KB Yang Terorientasi dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Keluarga Berencana.
- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan hasil pelaksanaan terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan dan Kampung KB dan Terbentuknya Kelompok Ketahanan Keluarga serta terbentuknya Kelompok PIK-R Melalui Jalur Pendidikan dan Kemasyarakatan, terbentuknya Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Setiap Desa Kelurahan.

Permasalahan:

- Belum Tersedianya Anggaran Untuk Tenaga Teknis Pusata Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan;
- Pemahaman Tentang Pentingnya PIK-R Masih Rendah Terutama Pada Jalur Kemasyarakatan, Sarana dan Prasarana Pendudkung Masih Kurang;

- Kurangnya Pemahaman Tentang BKB,BKR,BKL dan UPPKS Sehingga Masih Terdapat Kelompok Kegiatan Yang Belum Berjalan Secara Optimal, dan Masih Terdapat Pengelolaan Kelompok UPPKS Yang Bersifat Perorangan.

4. SASARAAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

TABEL 3.16

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
PDRB per kapita (ADHK)	Rupiah	27.91	Belum ada rilis	Belum ada rilis	30.73
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				Belum ada rilis	

Indikator **PDRB per Kapita (ADHK)** hingga akhir bulan desember Tahun 2021 belum ada rilis dari BPS Kota Kotamobagu dari target 18,00

- **Faktor-Faktor Pendorong Meningkatnya Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas pertanian dan Perikanan, karena terbatasnya lahan di Kota Kotamobagu maka kemampuan dan kemandirian kelompok tani dalam mengakses dan menerapkan teknologi pertanian menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok tani. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, diharapkan pertanin di tingkat kelompok tani dapat diberdayakan secara mandiri.
 - a. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan hasil pelaksanaan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan Hewan dengan Menyediakan Obat-obatan dan Vaksinasi Hewan, Penurunan tingkat Penularan Penyakit Hewan

dan Zoonosis untuk menunjang Hewan yang sehat, Mengurangi jumlah Penyakit Hewan yang menular dan Zoonosis yang berbahaya ketika terjadi Gigitan Anjing terhadap Manusia.

Permasalahan yang di hadapi:

- Masih kurangnya Kerjasama Pemerintah Kota (Desa/Kelurahan) dengan Swasta dalam pencegahan dan penanganan penyakit Hewan yang menular dan Zoonosis;
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan penyakit Hewan Menular dan Zoonosis;
 - Kesanggupan masyarakat/pemilik ternak Kesehatan Hewan untuk berswadaya;
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan hasil pelaksanaan, Meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan Sarana Pertanian / Perkebunan yang dibutuhkan oleh Petani, Menekan biaya pengolahan usaha Pertanian dan Perkebunan, Mempercepat proses pengolahan Usaha Pertanian / Perkebunan.

Permasalahan yang di hadapi:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian Sarana Pertanian (Alsintan);
 - Perlunya waktu dalam mengubah kebiasaan Pertanian Tradisional ke Pertanian Modern;
 - Perlunya waktu dalam merubah Perilaku, Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani dalam Proses Usaha Pertanian / Perkebunan.
- c. Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian dengan hasil pelaksanaan, Meningkatnya jumlah populasi ternak, Potensi wilayah pengembangan peternakan, Jumlah Produk Peternakan dipasarkan.

Permasalahan yang di hadapi:

- Belum tersedianya data populasi ternak yang akurat di keluraham/desa;
- Belum ada satu lokasi pengembangan usaha peternakan;

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pengembangan peternakan.
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan dengan dengan menyediakan Prasarana Perikanan yang dibutuhkan oleh Pembudidaya Ikan, Menekan biaya Pakan Ikan, Peningkatan Jumlah Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya.

Permasalahan yang di hadapi:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian Sarana Perikanan;
- Perlunya waktu dalam mengubah kebiasaan Pembudidaya Ikan Tradisional ke Pembudidaya Ikan Modern;
- Perlunya waktu dalam merubah Perilaku, Pengetahuan , Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani Pembudidaya Ikan dalam Proses Usaha Perikanan Budidaya.
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena terbatasnya sumber Daya air di Kota Kotamobagu maka kemampuan dan kemandirian UPTD air minum dalam mengakses dan menerapkan teknologi menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas, diharapkan Sumber daya air minum UPTD air minum kota kotamobagu dapat diberdayakan secara mandiri.
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan hasil pelaksanaan Menjamin ketersediaan air dimusim kemarau, Memasok kebutuhan air pada tanaman, Mengurangi kerusakan tanah.

Permasalahan yang di hadapi:

- Perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap ketersediaan dan kebutuhan air;
- Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan.

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah dengan hasil pelaksanaan tersedianya sistem penyediaan air limbah terpusat skala kota.
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum Di Daerah Kab/Kota dengan hasil pelaksanaan meningkatkan kapasitas produksi atau debit sumber air sesuai debit maksimum sumber air.

Permasalahan yang di hadapi:

- Menurunnya kuantitas air baku;
 - Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan.
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Sebagai upaya penyiapan tenaga yang siap kerja, Dinas Koperasi,UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan pelatihan yang berbasis keterampilan seperti pelatihan mengemudi, satpam serta perhotelan. Dari pelatihan tersebut selanjutnya disalurkan kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota kotamobagu. Di samping itu, berkaitan dengan keamanan kerja, dijalin pula kerjasama hubungan industrial dengan perusahaan yang ada di Kota kotamobagu guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan hasil pelaksanaan Peningkatan ketrampilan tenaga kerja untuk menunjang kinerja, Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja.

Permasalahan yang di hadapi:

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- b. Program Hubungan Industrial dengan hasil pelaksanaan Peningkatan perlindungan hukum pekerja buruh, Meningkatnya kepesertaan pada

bpjs ketenagakerjaan, Terwujudnya perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja buruh.

Permasalahan yang di hadapi:

- Masih terdapat perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang disebabkan masalah upah.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Industri dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi IKM dengan adanya bantuan mesin dan peralatan sebagai penunjang, Tersedianya peralatan mesin yang digunakan oleh para pelaku IKM yang sesuai kebutuhan, kemasan berkualitas, efisiensi waktu, Terwujudnya IKM yang potensial dan berbasis teknologi, Berkembangnya sumber daya manusia IKM melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan IKM, Terwujudnya standarisasi mutu produk sehingga mempunyai daya saing dengan produk daerah lainnya, Meningkatnya kualitas produk yang berbasis kearifan lokal, Terjaganya produk berbasis kearifan lokal.
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat Kota Kotamobagu cukup aktif dalam partisipasi pembangunan, dimulai dari proses perencanaan program dan kegiatan melalui musrenbang, pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang bersumber dari anggaran kewilayahan serta memantau kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah. Dalam mendukung pembangunan berbasis kampung, masyarakat juga ikut memberikan swadaya baik berupa tenaga, jamuan maupun materiil. Di samping itu, hal yang terpenting adalah menjaga apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah agar tidak terkotori oleh upaya vandalism oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan hasil pelaksanaan dilaksanakannya pembayaran jaminan sosial BPJS kesehatan bagi perangkat desa sebanyak 182 orang, Pelaksanaan evaluasi

Rapbdes/apbdes setiap tahun anggaran, dilaksanakannya program/kegiatan terkait dengan biaya apbdes, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, Dilaksanakannya penilaian lomba desa dan kelurahan di 33 desa dan kelurahan;

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan hasil pelaksanaan Peningkatan keterampilan perempuan di desa dan kelurahan, Dilaksanakannya kegiatan 10 program pokok PKK, Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa.

Permasalahan:

- Dalam Kondisi Pandemi Covid 19, menyebabkan kurang maksimalnya peran serta desa dan kelurahan dalam kegiatan 10 program pokok PKK karena adanya PPKM.
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemeliharaan sarana prasarana pasar di kota kotamobagu, penyediaan fasilitas tempat sampah, serta kebijakan pembatasan pembuangan sampah warga di TPS, pasar memudahkan pembersihan dan pengelolaan sampah pasar, sehingga standar pasar di kota kotamobagu sehat dapat terpenuhi.
- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Koperasi sehingga peserta pelatihan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan perkoperasian yang baik, mampu mengikuti perkembangan zaman dibidang teknologi informatika guna peningkatan level Koperasi menuju koperasi sehat.

Permasalahan:

- Kondisi Kepengurusan Koperasi banyak yang stagnan, tidak aktif, bahkan tidak ditemukan sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
- b. Program pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan hasil pelaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM dan Produk UMKM dalam rangka pengembangan produksi, digitalisasi UMKM, peningkatan pendapatan sehingga mampu bersaing di pasaran, Peningkatan Modal Pelaku Usaha Mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dimasa pandemi covid 19.

Permasalahan:

- Pengetahuan dan keterampilan yang sangat dinamis dan berkembang terus mengakibatkan terbatasnya Pengetahuan, ketrampilan dari pelaku Usaha Mikro;
- Kondisi ekonomi yang lesu dimasa pandemi, menyebabkan menurunnya omzet penjualan.
- c. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan hasil pelaksanaan, Ketersediaan Stok Kebutuhan Bahan Pokok di pasaran lebih khusus dalam rangka pelaksanaan hari Besar Keagamaan, Keterjangkauan Harga Kebutuhan Bahan Pokok di pasaran lebih khusus dalam rangka pelaksanaan hari Besar Keagamaan.
- Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sala satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan adalah melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan berupa kelompok pemanfaatan lahan untuk menjadikan lahan untuk penanaman bahan pangan, dalam rangka pemanfaatan SDM untuk mengelola tanaman pangan di wilaya perkarangan dengan kelembagaan kelompok yang di bentuk pada masing-masing wilaya.
- a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan dengan hasil pelaksanaan Sudah adanya program peningkatan produksi

pangan, Tersedianya lumbung pangan, Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan hasil pelaksanaan, Sudah adanya program peningkatan produksi pangan, Pelatihan yang terintegritas analisis harga pangan pokok, Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan, Tersedianya potensi lahan untuk produksi keragaman pangan lokal.

Permasalahan:

- Ketersediaan pangan masih dipengaruhi produk impor;
 - Stabilisasi harga pangan pokok belum optimal;
 - Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum optimal;
 - Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - Masih kurangnya petugas enumerator harga pangan.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan hasil pelaksanaan Pelatihan yang terintegritas sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan.
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan hasil pelaksanaan Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 - Peningkatan Kontribusi PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perangkat Daerah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota kotamobagu mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, dengan menjadi terbaik ke II kabupaten/kota se sulut untuk kategori capain KB pasca persalinan/pasca keguguran.
 - a. Program Pengendalian Penduduk tersedianya Dokumen Grand Desain Kependudukan Yang memuat 5 Pilar Pembangunan Kependudukan yaitu:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;

2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
4. Pembangunan Keluarga;
5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Tujuan Disusunnya GDPK adalah :

1. Mewujudkan Kualitas penduduk Dalam Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya Yang Seimbang Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Didasarkan Pada Wawasan Kependudukan dan Lingkungan;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk Melalui Penanggulangan Kemiskinan;
4. Mewujudkan Pengarahan Mobilitas Penduduk Secara Merata Antar Wilayah kecamatan;
5. Mewujudkan Keluarga Yang Berketahanan, Sejahtera, Maju, Mandiri dan Harmonis Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan Gender Serta Mampu Merencanakan Sumber Daya Keluarga;
6. Mewujudkan Tercapainya Demografi Melalui Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk;
7. Tercapainya Data dan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipercaya.

5. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

TABEL 3.17

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Nilai Investasi	Rupiah	1,400,000,000,000	304.348.070.447.00	21.73	1,400,000,000,000

Pencapaian sasaran meningkatnya investasi daerah tahun 2021 dari target yang ditetapkan pada Rp.1.400.000.000.000 dengan realisasi Rp. 304.348.070.447.00 maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar **21.73 %**

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Investasi Daerah**
- Peningkatan Investasi Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Kotamobagu yakni melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam penginputan by sistem terkait dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko dengan diselenggarakan secara Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021.
 - a. Program Promosi penanaman modal dengan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya media sosial dan media masa sebagai wadah untuk mempromosikan Potensi Investasi Daerah serta adanya Kegiatan Pameran Investasi Daerah yang dilaksanakan di Provinsi dan Luar Provinsi maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kotamobagu.

- b. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan hasil pelaksanaan tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta terjalinnya Kerjasama yang baik dengan Pelaku usaha untuk meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan tersedianya klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Permasalahan:

- Kurangnya transparansi Pelaku usaha dalam kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara online;
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan dilapangan;
 - Kurangnya Personil dalam melakukan kegiatan dilapangan.
- c. Program Pelayanan penanaman modal dengan hasil pelaksanaan tersedianya Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya jumlah usaha yang ada di kota kotamobagu Tersedianya Sistim Perizinan berbasis Elektronik melalui dan dipermuda dengan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Aplikasi Sicantik Cloud dan tersedianya Klinik Online Single Submission (OSS) maka peningkatan Pengaduan dan permintaan data Informasi dari masyarakat terlaksana dengan baik.

Permasalahan:

- Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pendaftaran/pengisian pada aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA);
- Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik;
- Kurangnya sarana prasarana dalam kegiatan pendukung pelayanan secara mobile;
- Kurangnya SDM di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Layanan Pelaporan;
- Belum adanya Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mendukung pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;

- Belum tersedianya ruang pengaduan dan informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat;

6. SASARAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TABEL 3.18

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Infrastruktur	Indeks	54.99	54.97	99.96	55.09
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	87.13	59.28	68.03	87,27

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setela perubahan Kota Kotamobagu dimana **indeks Infrastruktur** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 54.99 dengan realisasi 54.97 maka tingkat capaian kinerja sebesar **99.96%**.

pada tahun 2021 pada tahun ketiga RPJMD setela perubahan target **indeks kualitas lingkungan hidup** sebesar **87.13** dengan realiasi kinerja **59.28** maka capaian kinerja di tahun 2021 sebesar **68.03%**.

- **Faktor – Faktor Pendorong Meningkatnya Meningkatnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan**
- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu telah banyak melakukan kegiatan untuk pembangunan Infrastruktur kota kotamobagu melalui bina marga melaksanakan pemeliharaan rutin berkala jalan rehap Desa/Kelurahan dan Cipta Karya melaksanakan perawatan berkala jaringan pipa, serta melaksanakan Survei Lokasi untuk IPA.
 - a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase hasil pelaksanaan untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu wilayah, jalan, dan lahan, sehingga lahan dapat kembali difungsikan secara optimal serta membebaskan suatu wilayah,

terutama wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk yang banyak, dari genangan air, erosi dan banjir.

Permasalahan:

- Kurangnya kesadaran masyarakat/partisipasi masyarakat yang rendah, tidak membuang sampah pada tempatnya, malah membuang sampah ke selokan pada saluran drainase sehingga mengakibatkan jalan air tidak lancar;
 - Sistem drainase yang sudah ada kurang mampu menampung kapasitas debit air hujan padahal lahan untuk pengembangan saluran drainase sudah tidak ada.
- b. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan hasil pelaksanaan meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
- c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang hasil pelaksanaan memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas, meningkatnya kualitas RTR.
- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan kerja bakti dalam rangka memperingati hari bersih-bersih dunia atau yang dinamakan world clean-up day (wcd) di kotamobagu termasuk pasar, daerah sekitar tempat tinggal masing-masing maka dengan itu Dinas Lingkungan Hidup selalu memantau dengan perkembangan kebersihan lingkungan Kota Kotamobagu.
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil pelaksanaan perumusan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD maka

dengan itu Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Perubahan RPJMD tersusun dengan baik.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan hasil pelaksanaan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup maka koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut seraf melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan hasil pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan hasil pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia dan Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Program Pengelolaan Persampahan dengan hasil pelaksanaan Pengolahan Sampah serta Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA kota kotamobagu maka Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan di TPA/TPST/SPA kota kotamobagu terlaksana dengan baik.

- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan hasil pelaksanaan meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan serta Pemeliharaan Fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota untuk mengatasi permasalahan kemacetan di jalan kota kotamobagu.
- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kotamobagu dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dengan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Kotamobagu untuk membangun rumah melalui program (BSRS) dengan jumlah sebanyak 72 unit dan tersebar di empat

kelurahan. Masing-masing yakni Kelurahan Kotobangon sebanyak 21 penerima, Gogagoman 19 penerima, Kobo Besar 17 penerima, dan Kelurahan Kotamobagu 15 penerima.

- a. Program Kawasan Permukiman dengan hasil pelaksanaan meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menyediakan Rumah Layak Huni serta Penurunan tingkat kekumuhan kawasan permukiman untuk menunjang lingkungan yang sehat dan mengurangi jumlah rumah yang berpotensi rusak/robok ketika terjadi Bencana Alam (Gempa).

Permasalahan:

- Belum ada Kerjasama Pemerintah Kota dengan Swasta dalam pencegahan dan penanganan permukiman kumuh;
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh;
 - Kesanggupan masyarakat calon penerima bantuan untuk berswadaya, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Perubahan Status dan Kondisi Penerima Bantuan;
- b. Program Pengembangan Perumahan dengan hasil pelaksanaan Sumber Daya Manusia yang handal dan berperanaktif dalam manajemen bencana serta kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen Bencana melalui program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan hasil pelaksanaan adanya Peraturan dan Pedoman tentang mekanisme atau tata cara Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Pengembang dalam rangka penanganan PSU Perumahan dan kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk penanganan PSU Perumahan.

Permasalahan:

- Keterbatasan anggaran dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Pengembang/Developer tidak mampu menyelesaikan PSU perumahan sesuai dengan Perencanaan/site plan yang diajukan pada persetujuan siteplan;
- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu menggelar Sosialisasi Revolusi Mental dengan pelaksanaan kegiatan ini sudah menjadi agenda setiap tahun, dengan harapan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur yang berkenaan dengan revolusi mental serta selain itu sosialisasi ini juga merupakan bentuk penyegaran dan mengingatkan kembali kepada aparatur untuk tetap menjaga sikap dan mental sebagai panutan ditengah masyarakat dan disiplin yang dimaksud harus dimulai dari lingkungan keluarga, terutama bagi anak-anak, untuk menjadikan mental baik, maka pembinaan harus dilakukan sejak dini.
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya hasil pelaksanaan terciptanya Kerukunan Hidup antar Umat Beragama dan terciptanya Toleransi Kerukunan Umat Beragama.

Permasalahan:

Selama terbentuknya FKUB belum memiliki Kantor/Sekretariat

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan hasil pelaksanaan terverifikasinya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Keterwakilan Kursi di DPRD Kota Kotamobagu guna untuk Menunjang Kegiatan-kegiatan Politik di Kota Kotamobagu.

- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan hasil pelaksanaan
1. Kegiatan FKID Peningkatan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Konflik dengan Pendeteksian Dini segala kemungkinan ancaman dan hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas di daerah dengan meningkatkan SDM dalam hal tugas untuk penguatan Satgas Penguatan deteksi dini serta mengadakan Koordinasi Pengawasan Pengamanan bersama unsur TNI/POLRI dalam deteksi dini yang dapat timbulnya konflik di masyarakat dan dilaksanakannya rapat pertemuan Koordinasi Anggota Forum Intelijen dalam rangka membahas permasalahan isu-isu Sara, Aliran Sesat, Perang antar suku, Agama, serta ancaman dari luar. Dengan adanya Kegiatan Forum Intelijen maka dapat diciptakan situasi yang kondusif.
 2. Kegiatan FKDM meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan seringnya melakukan koordinasi dengan pihak tertentu dalam upaya mengatasi konflik sosial dimasyarakat antara lain bentuk tauran anak sekolah dan warga, hal ini tentu saja meresahkan masyarakat oleh karena itu maka Pemerintah membentuk Forum-Forum Koordinasi di Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan melaksanakan pemantauan situasi di wilayah daerah dalam rangka menciptakan kondisi aman dengan mengadakan patroli gabungan dengan instansi terkait.
 3. Kegiatan Forkopimda dengan melaksanakan kegiatan Pemerintah melalui Rapat Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Daerah dari unsur Walikota, DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri yang menjadi kunci utama meraih keberhasilan setiap program Pemerintah meliputi Pembangunan, Politik, Ekonomi, Sosial dan Agama dan peran anggota Forkopimda sangat penting dalam mengatasi segala persoalan atau ujian yang dihadapi di daerah yang

tidak bisa diatasi tanpa peran serta kekompakan sinergitas anggota Forkopimda dan masyarakat.

Permasalahan:

- Kegiatan FKID Belum optimalnya sosialisasi, sarasehan, pembinaan, pertemuan pada masyarakat terhadap pencegahan konflik sosial yang terjadi di Kotamobagu terhadap masyarakat, aparat pemerintah dan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI serta timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri dan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat terbatas dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kotamobagu;
- Kegiatan FKDM timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri dan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat terbatas dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kotamobagu
- Kegiatan Forkopimda timbulnya pengaruh paham-paham radikal/keras dan Sara serta pengaruh penyebaran penyalahgunaan bahaya narkoba dari luar negeri.
- Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dari sektor Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu akan terus tingkatkan pengawasan kebersihan lingkungan agar warga tidak membuang sampah sembarangan serta Puluhan anggota Jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dikumpulkan untuk ikuti pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana bertujuan untuk lebih menambah wawasan dari para anggota Linmas yang ada di setiap Kelurahan/Desa dan anggota Satpol PP yang bertugas bersama Tim Gabungan Pemkot Kota Kotamobagu, yang selalu memberikan imbauan

kepada para pedagang terkait batas waktu berdagang, untuk pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat/ badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta meningkatnya ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dan meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan:

- Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan kebutuhan;
 - Belum tersedia Sekretariat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan kurangnya Personil PPNS dan belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan hasil pelaksanaan meningkatnya Respon Time Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam menangani Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran serta meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan bahaya bencana Kebakaran.

Permasalahan:

- Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang menjangkau Lokasi bencana Kebakaran;
- Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang bersertifikat sesuai Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.

7. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

TABEL 3.19

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai	80	BLM dirilis	BLM dirilis	80.00
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	100	100
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	90.00	BLM dirilis	BLM dirilis	95.00
Indeks SPBE	Indeks	2.5	2.41	96.4	2,85
Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021				BLM dirilis	

- **Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**

Berbagai program kegiatan tersebut diyakini akan memberikan peningkatan signifikan realisasi kinerja tahun 2021 namun dengan bencana pandemi Covid 19 belum dapat terealisasi dengan baik.
- **Indikator Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)**

Untuk tahun 2021 opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah tahun 2020 memperoleh predikat WTP atau benilai **Baik**.
- **Indikator Sasaran Zona Kepatuhan Pelayanan Publik**

Pada tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu dimana **Kepatuhan Pelayanan Publik** Dengan target tahun kedua 90.00% dengan adanya bencana pandemi Covid 19 di Indonesia dengan itu belum bisah dirilis nilai Tahun 2020 s/d 2021

- **Indikator Sasaran Indeks SPBE**

Pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD setelah perubahan Kota Kotamobagu dimana **Indeks SPBE** Dengan target tahun ketiga 2021 adalah 2,85 dengan realisasi 2.41 maka tingkat capaian kinerja sebesar 96.4 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2.85 maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 84%

- **Faktor – Faktor Peningkatnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Daerah dari sektor Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan Sensus Penduduk Online (SPO) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan memberikan dukungan dalam bentuk melakukan integrasi data serta berbagai terobosan dan inovasi bagi pelayanan publik terus dikembangkan dan diperbaharui oleh Pemkot Kotamobagu salah satu produk ter update adalah aplikasi Kinalang yang digagas oleh Bidang SIKP, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu Kinalang merupakan terobosan baru dalam sistem pelayanan publik yang lebih komprehensif dan terpadu.

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan hasil pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta arah diseminasi nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi nasional seperti di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Misi Humas Pemerintah,

membangun citra reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi, menyosialisasi kebijakan program pemerintah serta membangun kepercayaan publik seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

- b. Program Penyelenggaraan Statistis Sektoral Di lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi serta Pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas bandwidth untuk disalurkan ke OPD melalui penambahan besaran bandwidth dari ISP, Peningkatan kapasitas pusat data pemerintah daerah melalui peningkatan storage serta peningkatan kualitas transmisi intranet/internet melalui distribusi alat yang memenuhi standar kualitas serta penambahan jaringan berbasis FO dan Peningkatan penyelenggaraan e-government melalui peningkatan jumlah aplikasi, pembuatan sistem penghubung dan pembuatan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

Permasalahan:

- Belum idealnya jumlah ASN yang mampu menangani kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
- Peralatan jaringan di berbagai OPD masih belum memenuhi standar kualitas;

- Belum adanya Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan dalam pengembangan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Daerah dari sektor Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu dengan peningkatan ASN ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dan Pengembangan Kompetensi Aparatur maka dengan peningkatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu akan lebih memaksimalkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu.
 - a. Program Kepegawaian Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Penyelesaian Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Pengadaan, Penempatan, Pemberhentian, Penghargaan dan urusan lainnya dibidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan OPD serta Peningkatan Mutu Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan Karir dengan memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ujian Dinas PNS serta pengendalian Disiplin kepada Aparatur Sipil Negara.
 - b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan hasil pelaksanaan Peningkatan efektivitas dan efisiensi Aparatur sesuai dengan Potensi dan Kompetensi melalui pengembangan kompetensi PNS sesuai dengan Tugas dan Fungsi baik klasikal maupun non klasikal dalam menentukan penempatan PNS sesuai dengan Pendidikan / Pelatihan.

Permasalahan:

- Indeks Profesionalitas ASN dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Kotamobagu masih Rendah.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Daerah dari sektor Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan

pemeriksaan kas dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Program – program yang telah inspektorat siapkan diantaranya, pemeriksaan kas dari semua perangkat daerah, menyambut turunnya tim audit Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan pendampingan dalam penyalahgunaan anggaran, wewenang, investigasi, dan pencegahan korupsi dan adanya kerjasama dalam upaya mengurangi potensi hal-hal yang dinilai berisiko dan rawan dikorupsi. “Hal ini untuk mengawasi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan korupsi pada setiap program kegiatan.

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan hasil pelaksanaan meningkatnya kapabilitas APIP melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan (Diklat, Bimtek, CC, IHT, Webinar) dan meningkatnya kematangan/ maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seras terlaksananya sebagian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tanpa di dukung anggaran yang memadai meningkatnya Respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian TLRHP Inspektorat Daerah Kotamobagu, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK RI, Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat oleh APIP.
- b. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan hasil pelaksanaan meningkatnya kematangan/ maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terlaksananya sebagian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tanpa di dukung anggaran yang memadai serta meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara APIP dan APH meningkatnya kesadaran pejabat negara dalam pelaporan LHKPN dan Gratifikasi.

Permasalahan :

- Belum tercapainya anggaran Mandatory Spending untuk APIP sebesar 1% dari APBD sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Jumlah dan Kompetensi APIP belum mencapai standar waktu pelaksanaan capaian diklat sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;

- Jumlah dan Kompetensi APIP belum mencapai standar sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;
 - Belum tersusun / termutakhir kebijakan manajemen resiko, Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko Pemerintah Daerah dan OPD;
 - Kurangnya dukungan pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam Internal Audit Charter (IAC);
 - Banyaknya Tugas Tambahan Pengawasan yang dilaksanakan yang tidak diatur dalam PKPT;
 - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum terlaksana secara keseluruhan.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Daerah dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan membawahi 3 kelurahan dan 6 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Selatan dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan peningkatan kualitas dan kinerja Perangkat kelurahan dalam hal pelayanan Masyarakat dan tersediannya insentif perangkat kelurahan serta sebagai acuan dalam proses perencanaan pada tingkat daerah, wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan, forum musyawarah koordinasi antara pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan OPD terkait.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan peningkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, untuk percepatan peningkatan kekebalan tubuh dari virus Covid – 19 maka dilakukan Vaksinasi pada masyarakat dan memudahkan masyarakat melakukan vaksinasi dengan menyediakan gerai vaksin di wilayah kelurahan serta mencegah penyebaran Virus

Covid-19, Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan hasil pelaksanaan Peningkatan prestasi Siswa/Siswi di bidang keagamaan serta meningkatkan Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar di bidang agama (pegawai Syar'I dan Petugas Agama) dan wadah penyaluran kreatifitas Siswa/Siswi di Bidang Keagamaan.

Permasalahan:

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Barat dengan membawahi 6 kelurahan dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Barat dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan terlaksananya proses pelayanan publik ditingkatkan paling bawah serta Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat dan Keinginan masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan ketersediaan vaksin yang mencukupi, adanya tenaga vaksinator yang dipersiapkan dengan matang dan kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Timur dengan membawahi 6 kelurahan dan 4 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Timur dari aspek pelayanan

kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan Kesadaran dan kemauan masyarakat serta Kemampuan dan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi dan bertukar gagasan dengan orang lain dan tingkat pendidikan warga.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk di vaksin dan banyaknya pos-pos pelayanan vaksinasi di desa dan kelurahan.
- Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Kecamatan Kotamobagu Utara dengan membawahi 3 kelurahan dan 5 Desa dengan penguatan di wilayah kecamatan kotamobagu Utara dari aspek pelayanan kemasyarakatan dan musawarah pembangunan Desa/Kelurahan serta penertiban keamanan di wilayah kecamatan.
- a. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan hasil pelaksanaan peningkatan pelaksanaan PPKM, pemerintah juga menggiatkan pelaksanaan percepatan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus corona agar dapat kembali memulihkan situasi dan kondisi khususnya di Kecamatan Kotamobagu Utara. Ketersediaan vaksin yang terjaga dan kesiapan tenaga medis khususnya vaksinator yang terlatih dan ramah menjadi salah satu faktor penunjang untuk merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi demi segera terputusnya mata rantai penyebaran virus. Pemerintah juga menghimbau agar semua masyarakat menaati protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan hasil pelaksanaan Sesuai dengan Undang – undang nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebuah perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan merangsang keikutsertaan elemen masyarakat untuk hadir sehingga pemerintah dapat mengumpulkan aspirasi – aspirasi dari masyarakat guna perencanaan pembangunan khususnya di kecamatan Kotamobagu Utara. Disamping itu dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk berintegrasi, berdiskusi dan bertukar pendapat dengan santun dan beretika sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan lomba inovasi daerah yang terbuka untuk semua kalangan dengan menyampaikan kegiatan IGA bertujuan untuk memacu perangkat daerah dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas maka pelaksanaan melakukan akselerasi kebijakan sehingga tujuan pembangunan daerah yakni menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing bisa tercapai.
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya koordinasi dengan perangkat daerah dan stekholder untuk menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Program Kegiatan

yang ada di SKPD / OPD yang mendukung Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia.

Permasalahan:

- Keterlambatan update data pendukung yang menyebabkan lambatnya penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan.
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung infrastruktur dan kewilayahan dan adanya dukungan Program Kegiatan yang ada di SKPD / OPD yang mendukung Sumber Daya Alam.

Permasalahan:

Keterlambatan update data pendukung yang menyebabkan lambatnya penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- d. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah harus selaraskan dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota, propinsi dan nasional.

Permasalahan:

Dokumen Perencanaan yang belum selaras dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat nasional.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Disdukcapil Kotamobagu merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan

236

lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Kotamobagu serta fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP-elektronik atau e-KTP. Untuk warga yang akan mengurus dokumen pendudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan berkas. Informasi cara, syarat dan biaya pengurusan (jika ada) dapat diperoleh melalui call center Dukcapil atau halo Dukcapil, Anda juga bisa mengakses website resmi Dukcapil untuk informasi umum. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan langsung dapat datang langsung ke kantor Dukcapil terdekat pada hari dan jam kerja / jam buka.

- a. Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan hasil pelaksanaan meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Perkawinan serta dokumen pencatatan sipil lainnya dan terlaksananya inovasi pelayanan SIMPELKAN CEPATU, Doyan Ubi menjadi pendorong dalam memenuhi target nasional dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil dan terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil serta Pemahaman tentang penggunaan dokumen kependudukan yang sebelumnya menggunakan blangko dari pusat ke kertas HVS 80 gram;

Permasalahan:

- Masih adanya masyarakat yang buta aksara, sehingga tidak semua masyarakat menerima dengan cepat pesan yang disampaikan lewat spanduk di Desa/Kelurahan;
 - Kondisi Pandemic Covid-19.
- b. Program Pendaftaran Penduduk dengan hasil pelaksanaan meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan pelayanan

jemput bola ke Desa/Kelurahan serta kepemilikan dokumen kependudukan yang terus meningkat Penataan Pendaftaran Penduduk dapat terlaksana dengan pengadaan Ribbon dan Film untuk pencetakan KTP-El dan Kartu Identitas Anak (KIA).

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan hasil pelaksanaan adanya dukungan Pemerintah dan stakeholder terkait, adanya Kemitraan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, sarana dan Prasarana yang memadai.
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan hasil pelaksanaan adanya Informasi dan Data Kependudukan yang ter-update dan berkelanjutan.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu dengan membawahi 7 Bagian serta dengan di masing-masing Bagian melaksanakan urusan teknis dengan pelaksanaan urusan unsur staf pimpinan.
 - a. Pada Bagian Organisasi Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Penyusunan LKIP serta Reformasi Birokrasi dengan adanya Bimtek maka dapat memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LKIP dan Reformasi Birokrasi serta terfasilitasi Perangkat Daerah dan Peningkatan penyusunan Anjab dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, Peningkatan fasilitasi pelayanan publik perangkat Daerah serta penyusunan proses peta bisnis dan terlaksananya ketatalaksana pemerintah kota kotamobagu.
 - b. Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Penyusunan Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan MoU, dengan adanya Bimtek serta fasilitasi penyusunan laporan maka dapat memberikan pedoman serta pemahaman kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, LKPJ, SPM dan Dokumen MoU/Kerjasama Daerah dan Peningkatan kegiatan fasilitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memperbaiki administrasi pemerintahan dalam hal ini Laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (LPPKel/LPPDes) serta Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas baik Batas Daerah maupun Batas Desa/Kelurahan di Kota Kotamobagu agar tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku, Peningkatan fungsi pelayanan/fasilitasi survey pembakuan nama rupabumi yang bertujuan agar seluruh unsur rupabumi di Kota Kotamobagu (unsur alami/buatan) dapat dibakukan dan dimasukkan ke dalam buku gazetir nasional pusat (Kementerian Dalam Negeri/Badan Informasi Geospasial).

- c. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kotamobagu dengan Program Perekonmian dan Pembangunan dengan hasil pelaksanaan Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 3 Variabel Pada Domain Proses untuk Kematangan UKPBJ dan Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 1 Variabel Pada Domain Sistem Informasi untuk Kematangan UKPBJ serta Peningkatan pada Pelaksanaan Pemenuhan 3 Variabel pada Domain Kelembagaan dan Domain SDM untuk Kematangan UKPBJ.
- d. Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- e. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dengan diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi para Rohaniwan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan untuk Siswa dan Mahasiswa yang tidak mampu serta untuk Menunjang Program kegiatan dan Tugas Organisasi yang mendapatkan Bantuan Hibah Uang.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari sektor Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dengan Penghargaan karena berhasil pertahankan WTP itu, diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Penyerahan itu bertepatan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan daftar Transfer ke Daeran dan Dana Desa atau TKDD dari pemerintah pusat kepada daerah maka terkait dengan keberhasilan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan Komitmen Pimpinan terhadap kepatuhan anggaran Perangkat Daerah dan tepat waktu serta Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengelolah keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah terhadap penatausahaan Keuangan daerah dan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan serta Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu dan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah selaku

penanggungjawab akuntansi tentang standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan hasil pelaksanaan Peningkatan kualitas pelayanan, himbauan dan sosialisasi, evaluasi secara berjenjang dan periodik serta peningkatan fasilitas layanan pembayaran secara online dan mandiri dan konsistensi petugas pajak dalam penagihan dan pelaksanaan evaluasi pajak secara berkala, pelaksanaan pemutahiran dan pendataan untuk penambahan jumlah objek pajak.
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan hasil pelaksanaan Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah.

Permasalahan:

Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memahami pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah.

**PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.177.027.61	35.177.027.66 1
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	90.021.600	89.367.400,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	483.253.800	477.498.400,0 0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	239.326.200	239.326.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	413.771.550	413.771.550
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	600.000.000	598.500.000,0 0
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	160.029.600	160.029.600
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	952.701.800	952.701.800
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	221.700.000	202.667.500,0 0
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.005.880	39.607.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	120.925.400	120.925.400
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.227.048.990	2.227.048.990
SASARAN MENURUNYA ANGKA KEMISKINAN			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	30.135.000	30.135.000

	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	317.238.500	317.238.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	278.971.700	278.971.700
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	218.352.450	218.352.450
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.198.250	30.198.250
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	762.887.050	762.887.050
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	48.500.650	48.500.650
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.111.000	99.548.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.769.300	8.769.300
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	615.267.777	345.232.413,00
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	43.241.150	42.945.750,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	48.792.600	44.600.575,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	139.045.550	139.045.550
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	263.681.750	263.681.750
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.065.000	5.065.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.558.400	55.558.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	364.733.100	364.733.100
SASARAN MENINGKATKAN KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI			

4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	172.985.400	165.878.450,0 0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	524.080.800	524.080.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	925.968.400	925.968.400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	956.077.650	956.077.650
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	163.045.700	163.045.700
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	231.473.250	218.213.550,0 0
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	300.000.000	285.780.000,0 0
SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI DERAH			
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	102.182.350	102.181.200,0 0
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.703.350.000	1.703.350.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	489.750.000	489.750.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	31.129.650	30.631.050,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000	312.880.785,0 0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	26.849.200	26.849.200
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	54.000.000	54.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	824.327.746	792.397.900,0 0

	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18.551.750	17.873.550,00
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	686.058.900	686.058.900
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	494.047.600	425.977.600,00
SASARAN MENINGKATKANYA INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			
6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.557.614.221	3.557.614.221
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.477.561.909	6.318.704.958,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	102.777.900	102.777.900
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.527.818.987	2.527.818.987
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.309.335.929	2.273.559.917,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.299.135.825	1.299.135.825
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	80.676.200	80.676.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22.411.693.457	21.319.565.639,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	49.766.800	49.766.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.183.327.886	1.183.327.886

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.587.927.700	1.567.738.100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.637.668.186	3.586.858.396,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.649.400	3.649.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	41.509.700	40.559.700,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	26.916.600	26.916.600
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	406.669.300	406.414.100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	241.392.200	240.984.600,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.208.000	6.165.600,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.908.000	46.908.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.297.371.500	7.297.371.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	619.088.500	619.088.500
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	36.794.000	36.794.000
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.162.628.050	4.118.241.670,00
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.369.070.200	3.369.070.200
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	895.104.100	895.104.100

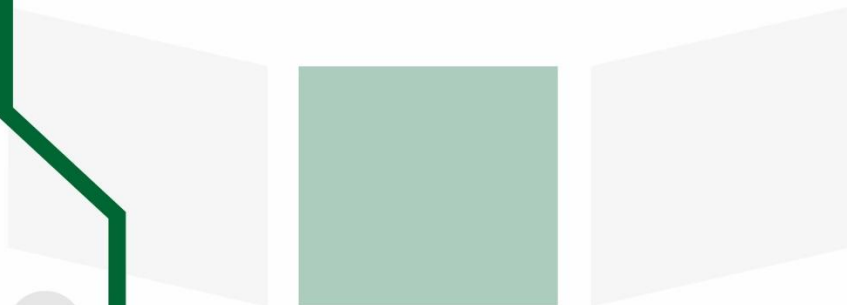
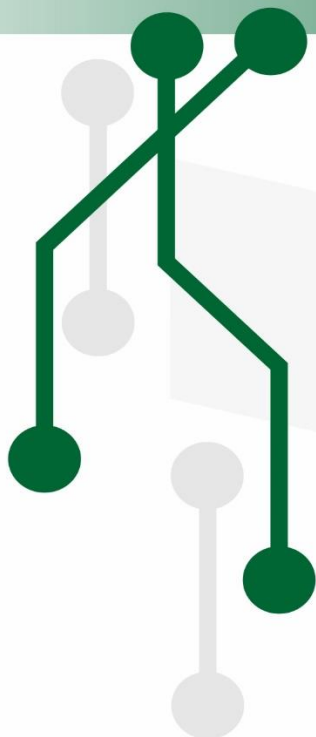
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.332.083.250	1.332.083.250
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.997.900	29.987.925,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	18.498.400	18.486.600,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	65.776.300	64.075.700,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.181.275.100	12.181.275.10 0
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	256.671.924	256.671.924
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.284.812.600	11.284.812.60 0
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	410.268.000	410.268.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	496.829.800	496.829.800
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	60.419.104.425	60.419.104.42 5
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	390.694.500	345.738.700,0 0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.395.847.307	2.395.847.307
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.532.843.759	1.532.843.759
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	66.424.000	66.424.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	433.387.800	433.387.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	112.404.000	112.404.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.700.000	20.700.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.338.850.000	1.338.850.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.023.029.980	1.023.029.980
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	240.720.020	240.720.020
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.848.900	17.837.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.949.870.219	1.949.870.219

BAB IV



PENUTUP



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator sasaran dapat terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan berhasil walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga masuk dalam kategori kurang dan perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Saran

Untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-

program pembangunan kota Kotamobagu sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu.

2. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah kota Kotamobagu yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah kota Kotamobagu.
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah kota Kotamobagu dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai pemerintah kota Kotamobagu dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Kotamobagu Tahun 2021 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.